

**UPAYA PEMBERDAYAAN  
INDUSTRI KECIL KERAMIK DINOYO OLEH  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**INDRA HADI PRASETYO  
NIM. 0510313074**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
MALANG  
2010**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **Upaya Pemberdayaan Industri Kecil Keramik Dinoyo Oleh  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang**

Disusun Oleh : Indra Hadi Prasetyo

NIM : 0510313074

Fakultas : Ilmu Administrasi

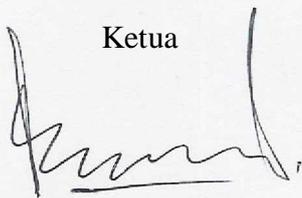
Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pembangunan

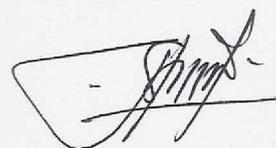
Malang, 15 Januari 2010

Komisi Pembimbing

Ketua



Anggota



**Drs. Aspan Munadi, MAP**  
NIP. 19460827 197302 1 001

**Drs. Siswidiyanto, MS**  
NIP. 19600717 198601 1 001

## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 02 Pebruari 2010  
Jam : 11.00 – 12.00 WIB  
Skripsi atas nama : Indra Hadi Prasetyo  
Judul : Upaya Pemberdayaan Industri Kecil Keramik  
Dinoyo Oleh Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan Kota Malang

**Dan dinyatakan lulus**

MAJELIS PENGUJI

Ketua,

Anggota,

**Drs. Aspan Munadi, MAP**  
NIP. 19460827 197302 1 001

**Drs. Siswidiyanto, MS**  
NIP. 19600717 198601 1 001

Anggota,

Anggota,

**Drs. Choirul Saleh, M.Si**  
NIP. 19600112 198701 1 001

**Drs. Dwi Sulisty, MPA**  
NIP. 19590529 198403 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat, anugerah serta hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **Upaya Pemberdayaan Industri Kecil Keramik Dinoyo Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana administrasi publik (SAP) pada fakultas ilmu administrasi universitas brawijaya malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

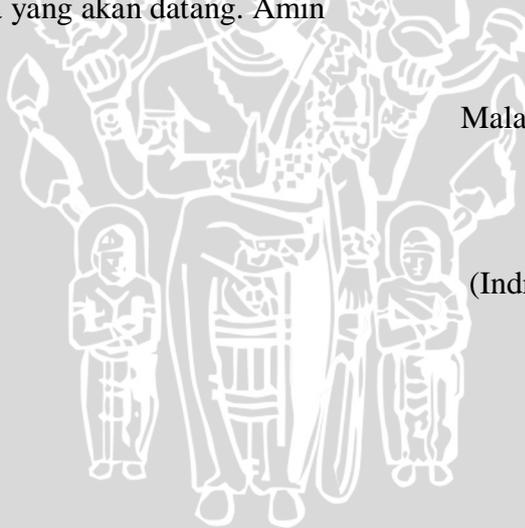
1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suhadi dan Ibu Siti Romelah serta adikku tersayang Irawan Hadi Wiranata, terima kasih atas doa dan dukungan kalian baik moral maupun materiil.
2. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Drs. Aspan Munadi, MAP selaku Komisi Pembimbing I atas masukan dan saran-sarannya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Siswidiyanto, MS selaku Komisi Pembimbing II atas masukan dan saran-sarannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Publik atas segala ilmu yang telah diberikan.
6. Pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta para pengrajin industri kecil keramik Dinoyo atas bantuan dan kerjasamanya.
7. Teman-teman Administrasi Publik angkatan 2005 khususnya kelas D, terima kasih atas segala bantuan, kenangan dan pengalamannya.
8. Teman-teman Sigura-gura VI No.14 dan juga teman-teman Bend. Sutami VII yang telah mendukung dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

9. Keluarga besar “Mbah Paidjo dan Mbah Langkir”, terima kasih atas doa dan dukungannya.
10. cINTA\_Q, terima kasih buat semuanya.
11. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga ALLAH SWT akan membalas budi baik semua pihak yang telah membantu pelaksanaan sampai penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh hasil yang terbaik, namun apabila masih kurang sempurna penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi sempurnanya skripsi ini. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah, itu semata-mata datang dari saya, dan jika ada yang bermanfaat itu semata-mata datang dari ALLAH SWT. Karena penulis menyadari bahwa penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Akhir kata penulis mengharapkan banyak manfaat dari skripsi ini baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Amin

Malang, Januari 2010

(Indra Hadi Prasetyo)



DAFTAR ISI

Halaman

<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kontribusi Penelitian .....	10
E. Sistematika Pembahasan .....	10

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Administrasi Pembangunan .....	13
1. Pengertian Administrasi Pembangunan .....	13
2. Paradigma Pembangunan .....	18
3. Peran dan Fungsi Pemerintah Dalam Pembangunan .....	19
B. Pemberdayaan .....	22
1. Pengertian Pemberdayaan .....	22
2. Tujuan Pemberdayaan .....	25
3. Tahap-tahap Pemberdayaan .....	27
4. Sasaran Pemberdayaan .....	29
5. Model-model Pemberdayaan .....	30
6. Indikator Pemberdayaan .....	34
7. Upaya Pemberdayaan .....	37
8. Pendekatan dan Strategi Pemberdayaan .....	39
C. Industri Kecil .....	41
1. Pengertian Industri Kecil .....	41
2. Klasifikasi Industri .....	42
3. Pengembangan Industri Kecil .....	45
a) Pentingnya Pengembangan Industri Kecil .....	45
b) Bentuk Pengembangan Industri Kecil .....	48
c) Strategi Pengembangan Industri Kecil .....	48
4. Pembinaan Industri Kecil .....	51
a) Pengertian Pembinaan .....	51
b) Pola Pembinaan Industri Kecil .....	51



c) Tujuan Pembinaan Industri Kecil .....	52
5. Keunggulan dan Kelemahan Industri Kecil .....	53
6. Permasalahan Yang Dihadapi Industri Kecil .....	54

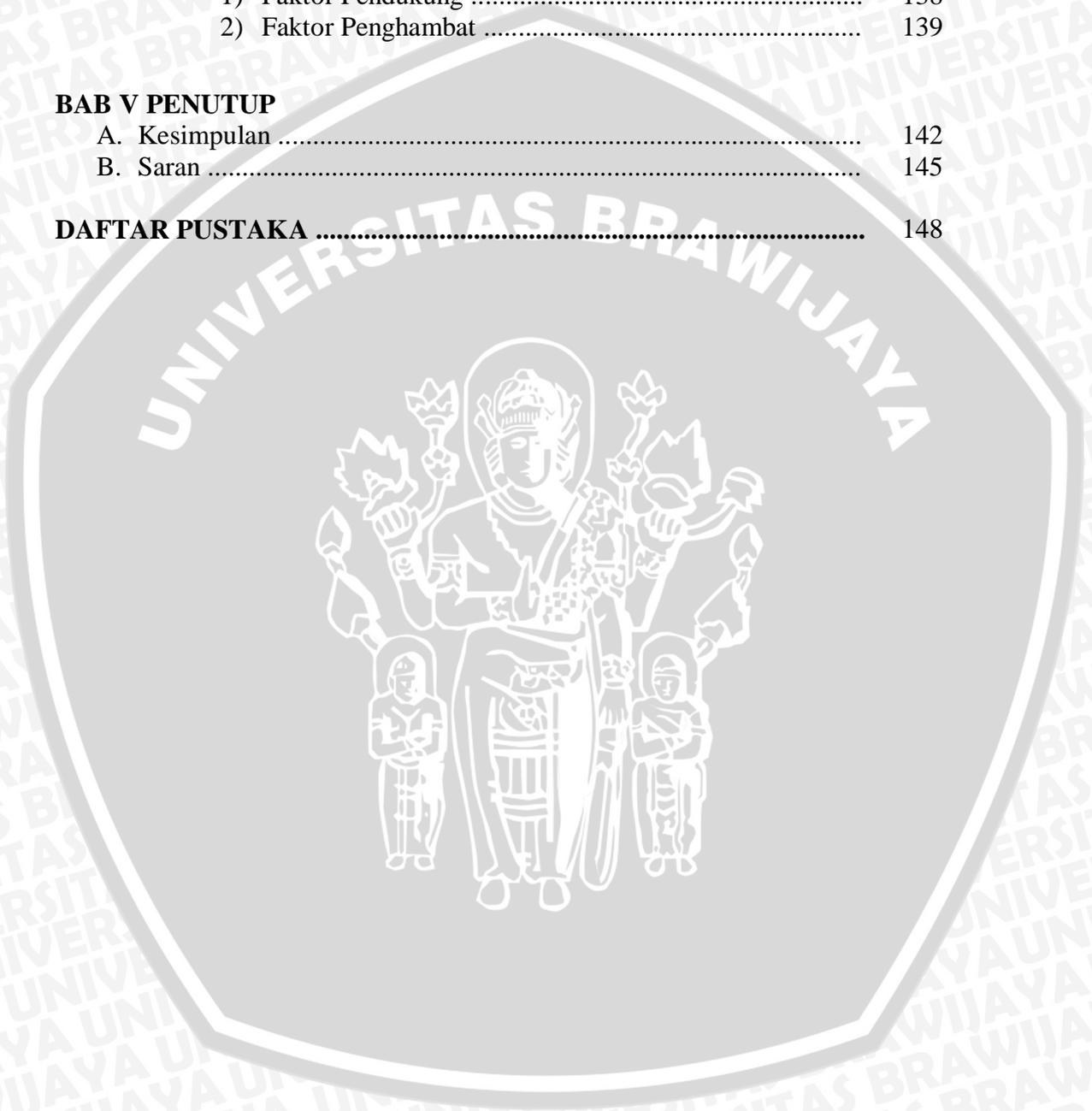
### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	56
B. Fokus Penelitian .....	56
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	57
D. Sumber Data .....	58
E. Teknik Pengumpulan Data .....	59
F. Instrumen Penelitian .....	60
G. Analisa Data .....	61
H. Keabsahan Data .....	62

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	65
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	65
a) Gambaran Umum Kota Malang .....	65
b) Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang .....	76
c) Gambaran Umum Kelurahan Dinoyo .....	87
d) Profil Industri Kecil Keramik Dinoyo .....	91
2. Penyajian Data .....	96
a) Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam rangka memberdayakan Industri Kecil Keramik Dinoyo .....	96
1) Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	108
a. Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) .....	108
b. Studi Banding .....	110
c. Pembinaan Manajerial .....	111
2) Pengembangan Teknologi Produksi .....	113
3) Promosi Pemasaran .....	116
4) Pembinaan Permodalan .....	119
5) Pengadaan Bahan Baku .....	121
b) Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Proses Pemberdayaan Yang Dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang .....	122
1) Faktor Pendukung .....	123
2) Faktor Penghambat .....	124
B. Pembahasan .....	127
a) Analisis upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam rangka memberdayakan Industri Kecil Keramik Dinoyo .....	127
1) Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	131
a. Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) .....	132
b. Studi Banding .....	133
c. Pembinaan Manajerial .....	134
2) Pengembangan Teknologi Produksi .....	134

3) Promosi Pemasaran .....	135
4) Pembinaan Permodalan .....	135
5) Pengadaan Bahan Baku .....	137
b) Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Proses Pemberdayaan Yang Dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang .....	138
1) Faktor Pendukung .....	138
2) Faktor Penghambat .....	139
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	142
B. Saran .....	145
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>148</b>



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1.	Lingkaran Setan Kemiskinan	32
2.	Analisis Model Interaktif	61
3.	Peta Lokasi Kota Malang	65
4.	Penduduk Kota Malang Tahun 2000-2007	69
5.	Lambang Kota Malang	73
6.	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang	77
7.	Rak Promosi Produk	118
8.	Papan Promosi/Neon Box	119
9.	Katalog Wisata Kerajinan Keramik Dinoyo	119



## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.	Indikator Keberdayaan Masyarakat	36
2.	Luas Kecamatan (km <sup>2</sup> ) dan Persentase Terhadap Luas Kota Tahun 2007	67
3.	Nama-nama Kelurahan Menurut Kecamatan Tahun 2007	68
4.	Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000	70
5.	Data Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menurut Golongan Tahun 2009	84
6.	Data Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menurut Pendidikan Tahun 2009	85
7.	Luas dan Jenis Penggunaan Tanah Kelurahan Dinoyo Tahun 2009	88
8.	Distribusi Penduduk Kelurahan Dinoyo Berdasarkan Kependudukan Tahun 2009	88
9.	Distribusi Penduduk Kelurahan Dinoyo Berdasarkan Kelompok Pendidikan Umum Tahun 2009	89
10.	Distribusi Penduduk Kelurahan Dinoyo Berdasarkan Mata Pencarian Tahun 2009	90
11.	Distribusi Jumlah Pengusaha/Usaha dan Tenaga Kerja Kelurahan Dinoyo Tahun 2009	91
12.	Program dan Kegiatan Disperindag Kota Malang	100
13.	Nama dan Alamat Pengrajin Keramik Dinoyo	102
14.	Nama dan Alamat Pengrajin Keramik Dinoyo	103
15.	Pelaksanaan Diklat dan Kursus Tahun 2008	109
16.	Materi dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Tahun 2008	113
17.	Distribusi Bantuan Peralatan oleh Disperindag Kota Malang Kepada Pengrajin Keramik Dinoyo	115
18.	Pameran Yang Pernah Diikuti Pengrajin Keramik Dinoyo	116
19.	Jangkauan Pemasaran Industri Kecil Keramik Dinoyo	117
20.	Perkembangan Industri di Kota Malang Tahun 2004-2008	128

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal.
1.	Interview Guide	152
2.	Nama Pengrajin Keramik, Pengrajin Gips, dan Showroom Keramik	154
3	Foto Dokumentasi	157
4	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil	158
5	Surat Keterangan Pernah Melakukan Penelitian	169



## RINGKASAN

Indra Hadi Prasetyo, 2010. **Upaya Pemberdayaan Industri Kecil Keramik Dinoyo Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang**. Skripsi. Konsentrasi Administrasi Pembangunan. Jurusan Administrasi Publik. Universitas Brawijaya Malang. **Dosen Pembimbing: (1). Drs. Aspan Munadi, MAP, (2). Drs. Siswidiyanto, MS.** 147 Halaman + xvii

---

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang merupakan instansi perangkat daerah yang mempunyai tujuan pokok yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap sektor industri, baik industri besar, sedang, maupun kecil. Kebijakan yang diambil oleh Disperindag Kota Malang dalam memberdayakan industri kecil keramik Dinoyo meliputi lima (5) program. Lima (5) program itu yang dijadikan fokus penelitian dan dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dan melakukan observasi serta mencari dokumen-dokumen yang terkait. Fokus dari penelitian ini antara lain 1. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam rangka memberdayakan industri kecil keramik Dinoyo: a. Pengembangan sumber daya manusia, b. Pengembangan teknologi produksi, c. Promosi pemasaran, d. Pembinaan permodalan, e. Pengadaan bahan baku. 2. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Berdasarkan hasil penelitian ini upaya pemberdayaan industri kecil keramik Dinoyo yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yaitu: 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia, meliputi aspek: a. Diklat (pendidikan dan pelatihan), diklat yang dilakukan Disperindag Kota Malang ini mengacu pada bidang teknis dan manajerial. Materi yang pernah diberikan dalam diklat meliputi pelatihan teknologi produksi, baik berupa desain keramik maupun pewarnaan serta diversifikasi produk. Namun diklat tersebut tidak bisa dilakukan setiap tahun oleh Disperindag Kota Malang karena harus bergantian dengan instansi lain; b. Studi Banding, dalam studi banding ini pihak Disperindag Kota Malang pernah mengirim pengrajin keramik Dinoyo untuk melakukan studi banding ke Bandung, Yogyakarta, Jepang, Taiwan dan ke Probolinggo pada pertengahan tahun 2007. Khusus untuk studi banding keluar negeri, Disperindag Kota Malang di undang oleh pemerintah negara tersebut; c. Pembinaan Manajerial, dalam pembinaan manajerial ini Disperindag Kota Malang memberikan bimbingan dan penyuluhan yang bertujuan agar para pengusaha industri kecil dan pengrajin mempunyai kemampuan yang bersifat *managerial skill*. Namun dalam pelaksanaannya program tersebut masih bersifat temporer, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu, tidak secara berkelanjutan. 2. Pengembangan Teknologi Produksi, upaya yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang adalah dengan memberikan bantuan peralatan. Tujuannya yaitu untuk sosialisasi penggunaan teknologi tepat guna dan meningkatkan mutu produksi. Namun karena alasan dana, pemberian bantuan peralatan tersebut sangat terbatas jumlah maupun tingkat kemajuannya. 3. Promosi Pemasaran, upaya

Disperindag Kota Malang yaitu dengan mengikutsertakan para pengrajin untuk mengikuti pameran. Namun keikutsertaan para pengrajin keramik Dinoyo ini secara bergantian. Selain itu pihak Disperindag Kota Malang juga membuat *website* yang berisi potensi industri kecil yang ada di Kota Malang. 4. Pembinaan Permodalan, yaitu dengan memberikan informasi bantuan modal yang juga meliputi pemberian bimbingan terhadap pengajuan proposal kepada lembaga keuangan. Saat ini Disperindag Kota Malang tidak memberikan bantuan modal dalam bentuk uang, hal ini dikarenakan sering terjadi penyelewengan. Pembinaan permodalan ini, sayangnya kurang mendapat antusias dari pengusaha industri kecil. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengusaha industri kecil tersebut belum mempunyai legalitas usaha sehingga sangat sulit untuk mendapatkan pinjaman modal. 5. Pengadaan Bahan Baku, kebijakan yang diberikan Disperindag Kota Malang adalah melakukan kerjasama dengan BPTIK (Balai Pelayanan Teknis Industri Keramik) melalui penyediaan bahan baku yang berkualitas.

Sementara faktor pendukung dalam upaya pemberdayaan industri kecil keramik Dinoyo yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang meliputi: 1. Lokasi Industri yang Strategis, faktor lokasi serta keberadaan industri kecil keramik Dinoyo ini sudah merupakan modal tersendiri dalam pengembangan industri kecil keramik agar bisa lebih meningkatkan produksinya. 2. Kualitas Produk yang Sudah Dikenal Masyarakat, kerajinan keramik Dinoyo merupakan salah satu sentra industri kecil yang kualitas produknya sudah terkenal. Produknya yang berupa keramik hias dan souvenir keramik banyak dipesan oleh beberapa konsumen.

Selain faktor pendukung, adapula faktor penghambat dalam upaya pemberdayaan industri kecil keramik Dinoyo yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang, yaitu meliputi: 1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kendala yang dihadapi. Hal ini disebabkan latar belakang pendidikan formal para pengrajin keramik ini tergolong rendah yaitu antara lulusan SD sampai SMA. Secara tidak langsung hal ini berpengaruh terhadap pola pikir dan pola hubungan dengan pihak luar. 2. Kurangnya Faktor Modal, untuk mendapatkan bantuan modal dari lembaga keuangan seperti bank, sebagian besar dari pengrajin keramik masih belum berani karena belum mempunyai jaminan atau agunan, disamping itu para pengrajin itu juga masih belum memiliki legalitas usaha. 3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pemasaran, para pengrajin keramik Dinoyo selama ini mengeluhkan kurangnya peran dan perhatian pemerintah dalam hal pengadaan sarana dan prasarana promosi, seperti baliho, iklan, papan promosi sebagai petunjuk keberadaan industri kecil keramik yang ada di Kota Malang. Sehingga untuk saat ini para pengrajin sering menjual hasil usahanya kepada para pengepul.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa upaya pemberdayaan industri kecil keramik Dinoyo yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang berdasarkan program-program pembinaan dan pengembangannya lebih mengacu kepada aspek bisnisnya. Namun sayangnya arah dari program-program pemberdayaan tersebut masih belum jelas. Hal ini terbukti bahwa Disperindag hanya asal memberi pembinaan tanpa melihat aspek keberlanjutannya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu wujud dari kemauan dan kemampuan suatu negara untuk dapat berkembang kearah yang lebih baik lagi. Begitu juga dalam pembangunan nasional yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia. Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terangkum dalam satu wadah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional Indonesia meliputi berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia mengacu pada UU No 32 tahun 2004 dimana telah terjadi pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yakni dari pola sentralisasi ke pola desentralisasi yang berupa pemberian otonomi kepada daerah. Pelaksanaan dari UU No 32 tahun 2004 ini menganut prinsip: 1. penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta potensi dan keanekaragaman daerah; 2. harus lebih meningkatkan kemandirian daerah; 3. didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab; 4. harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga terjamin hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah serta antar daerah. Berdasarkan prinsip tersebut, peran pemerintah bergeser dan berubah yaitu dari pelaksana menjadi fasilitator, dari pemberian institusi menjadi melayani masyarakat dan dari mengatur menjadi memberdayakan masyarakat.

Menurut Siagian (2003, h.4), pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Pembangunan di Indonesia saat ini dihadapkan pada suatu permasalahan yang sangat kompleks yaitu masalah kemiskinan. Dengan

tingginya angka kemiskinan, hal itu berarti juga menggambarkan rendahnya taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya.

Pada dasarnya kemiskinan itu bukan sekedar fenomena, tetapi lebih merupakan proses yang terjadi karena kerentanan yang melanda banyak faktor. Mengingat kemiskinan bukan sekedar fenomena, maka tidak bisa dibenarkan bila program-program pengentasan kemiskinan hanya terfokus pada upaya bagaimana kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Pemikiran yang seperti itulah yang menyebabkan program penanggulangan kemiskinan selama ini dianggap tidak mampu memecahkan masalah yang sebenarnya.

Hal ini terbukti bahwa sampai saat ini Indonesia masih belum mampu terbebas dari kemiskinan. Dari data yang ada, jumlah penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2007 berjumlah 37,17 juta atau 16,58%. Sementara pada Maret 2008 jumlah penduduk miskin di Indonesia yaitu 34,96 juta atau 15,42% (<http://hariansib.com/>).

Agar kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat memecahkan masalah kemiskinan, maka kebijakan tersebut tidak boleh lepas dari konteks pembangunan masyarakat. Menurut Korten dalam Sulistiyani (2004, h.37), ada dua pendekatan dalam pembangunan yang dilakukan selama ini, yaitu pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom-up*.

Pendekatan *top-down* merupakan bentuk *blue-print strategy* (cetak biru) yang merupakan pendekatan yang bersumber pada pemerintah, dengan demikian masyarakat hanyalah sebagai sasaran atau objek pembangunan saja. Sedangkan pendekatan *bottom-up* adalah pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai pusat pembangunan atau pusat perubahan sehingga terlibat di dalam proses perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai *people centre development* (Sulistiyani, 2004, h.37).

Pendekatan pembangunan yang berusaha menumbuhkan keberdayaan kepada masyarakat hendaknya menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan, bukan lagi sebagai objek pembangunan. Dengan kata lain, pendekatan yang dirasa cocok untuk dilaksanakan adalah pendekatan *bottom-up*. Dengan pendekatan *bottom-up*, diharapkan masyarakat dapat terlibat dalam

pengentasan kemiskinan secara langsung. Sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat dapat terwujud.

Berbicara mengenai masalah ekonomi rakyat, tentunya tidak lepas dari pembicaraan tentang salah satu roda penggerak perekonomian rakyat, yaitu industri. Sektor industri mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan. Sektor industri juga tidak lepas dari usaha meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumber daya alam yang ada.

Sektor industri juga merupakan suatu wadah usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja manusia yang disertai usaha untuk meluaskan ruang lingkup kegiatan manusia. Dengan demikian, secara vertikal sektor industri dapat memperbesar nilai tambah pada kegiatan ekonomi dan sekaligus secara horizontal dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk.

Berkaitan dengan industri, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur serta memberikan perlindungan terhadap perkembangan industri di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Melalui Undang-undang tersebut, pemerintah menggariskan lima bidang yang diutamakan dalam pengembangan industri. Bidang-bidang tersebut yaitu:

1. Industri yang menunjang sektor pertanian dengan produksi sarana-sarana pertanian/mengolah hasil pertanian sehingga dengan demikian pembangunan sektor pertanian menarik dan merangsang sektor industri;
2. Industri yang menghasilkan devisa atau menghemat devisa dengan jalan menghasilkan barang-barang pengganti impor, untuk barang-barang ini jelas ada pasarnya di dalam negeri;
3. Industri yang mengolah lebih banyak bahan-bahan dalam negeri dari pada bahan-bahan luar negeri;
4. Industri yang relatif menggunakan lebih banyak tenaga kerja dari pada modal untuk memperluas lapangan kerja;
5. Industri yang dapat membangkitkan kegiatan pembangunan daerah.

Melalui peraturan tersebut, Departemen Perindustrian juga memberikan batasan bahwa penerapan strategi dasar yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengembangkan industri dititikberatkan pada:

1. Industri yang mendayagunakan keunggulan komparatif dari aspek pengelolaan sumber daya alam yang kita miliki (*Resources Based Industries*).

2. Industri yang menggunakan tenaga kerja banyak (*Labour Intensive Industries*).
3. Industri yang bercirikan padat teknologi (*Technology Based Industries*) (Marpaung, 1994, h.6).

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa sektor industri memang mempunyai prospek dan kontribusi yang lebih besar dari sektor lainnya. Karena itulah potensi pengembangan sektor industri diarahkan untuk lebih berperan dalam menunjang pertumbuhan daerah, memperluas lapangan kerja, menumbuhkan kegiatan ekonomi dan persebaran industri di daerah-daerah.

Pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pembangunan nasional diarahkan untuk mampu mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, serta meningkatkan taraf hidup atau perekonomian dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan industri yang tepat dan sesuai dengan karakteristik daerahnya menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air.

Namun dalam perkembangannya, sektor industri mengalami berbagai masalah. Diantaranya adanya iklim usaha yang kurang kondusif (regulasi yang overlap dan tidak efisien, ekonomi biaya tinggi, penyelundupan, dll), terkonsentrasinya industri di Pulau Jawa, pemanfaatan teknologi yang masih rendah di tengah persaingan industri dunia yang semakin tajam, serta masih lemahnya peranan sektor industri kecil dan menengah (IKM). Hal tersebut tentunya merupakan tantangan utama pengembangan industri nasional yang layak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Bila di cermati lebih jauh, tantangan utama ini bertitik fokus pada 2 (dua) bagian besar, yaitu peranan kebijakan makroekonomi dan rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi dan distribusi, yang merupakan permasalahan internal industri. Dalam hubungannya dengan IKM di Indonesia, formulasi kebijakan makroekonomi dan kendala pemanfaatan teknologi juga merupakan fokus utama strategi pengembangan industri ini. Masalah lanjutan pemanfaatan teknologi adalah rendahnya standarisasi mutu produk yang memenuhi kriteria pasar manca negara dan rendahnya nilai tambah produk jadi (<http://io.ppi-jepang.org/>).

Pada sektor industri, industri kecil dan UKM lebih banyak mendapat tantangan dan kendala. Bahkan tidak jarang keberadaannya mudah gulung tikar.

Terlebih lagi ketika krisis melanda, keberadaan industri kecil ini sungguh sangat memprihatinkan. Hal ini ditekankan oleh Juwaini (1996, h.15), bahwa “Jika kita hendak mengamati profil industri kecil di Indonesia, maka kita akan mendapati bahwa permasalahan utama industri kecil adalah rendahnya tingkat kemampuan, ketrampilan, keahlian, sumber daya manusia yang ada pada industri kecil”. Permasalahan utama tersebut dapat menjadi penyebab munculnya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil. Beberapa permasalahan industri kecil menurut Juwaini (1996, h.15), antara lain yaitu:

1. Kelemahan dalam mempunyai peluang (akses) pasar dan memperbesar pangsa pasar;
2. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur (akses) terhadap sumber-sumber permodalan;
3. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen;
4. Keterbatasan dalam pemanfaatan dan penguasaan teknologi;
5. Keterbatasan dalam jaringan usaha dan kerjasama usahanya;
6. Kelemahan dalam mentalitas usaha;

Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Hardjanto (2006, h.42), kendala/tantangan yang sering dihadapi oleh kebanyakan industri kecil adalah sebagai berikut:

1. Kelemahan Struktural, yaitu kelemahan dalam struktur perusahaan semisal kelemahan manajemen, pengendalian mutu, penguasaan teknologi, permodalan dan terbatasnya akses pasar;
2. Kelemahan Kultural, yaitu merupakan kelemahan yang menyebabkan kelemahan-kelemahan kultural seperti: informasi peluang, informasi mendapatkan bahan baku, informasi pengembangan produk, dll.

Sangat disayangkan bila keberadaan industri kecil dan UKM ini hanya mampu bertahan sesaat saja. Hal ini mengingat peran dari industri kecil dan UKM ini dalam perekonomian Indonesia. Selama tahun 2000 – 2003 saja, peranan usaha mikro, kecil dan menengah dalam penciptaan nilai tambah terus meningkat dari 54,51% pada tahun 2000 menjadi 56,72% pada tahun 2003. Sebaliknya peranan usaha besar semakin berkurang dari 45,49% pada tahun 2000 menjadi 43,28% pada tahun 2003. Usaha mikro, kecil dan menengah menyediakan 43,8% kebutuhan barang dan jasa nasional, sementara usaha besar 42,1% dan impor 14,1% (<http://www.depkop.go.id/>).

Hal yang sangat mendasar bahwa jangkauan dari industri kecil yang sangat luas dan mampu mencapai daerah-daerah pada umumnya yang disesuaikan dengan potensi sumber daya alam yang mendukungnya. Dengan adanya industri kecil ini akan membawa dampak pemerataan kesempatan kerja, pemerataan berusaha, pemerataan pendapatan serta pemerataan-pemerataan di bidang lain sehingga dalam jangka panjang akan membentuk struktur industri yang kuat guna mendukung perekonomian dan pembangunan nasional.

Kedudukan industri kecil tidak hanya sebagai usaha bagi pemerataan pembangunan, tetapi juga sebagai struktur sosial yang dapat berproduksi dengan aktif dan merupakan mata pencaharian utama ataupun sampingan. Keberadaan industri kecil ini juga dianggap memiliki keuntungan tertentu dari segi keadilan dan dalam distribusi pendapatan mampu meningkatkan kreativitas masyarakat serta dapat mempertahankan dan mengembangkan tradisi dan kebudayaan daerah setempat.

Industri kecil merupakan salah satu usaha yang diprioritaskan pengembangannya. Hal ini dikarenakan industri kecil memiliki prospek yang bagus di masa datang dan merupakan perwujudan dari ekonomi kerakyatan. Keberadaan industri kecil sebagai penunjang perekonomian nasional mempunyai nilai yang sangat strategis, karena bila pembangunan dan pembinaan industri kecil berhasil maka banyak keuntungan yang akan didapat.

Malang sebagai salah satu wilayah terbesar di Jawa Timur, tentunya memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan peningkatan yaitu tahun 2006 dari 4,78% meningkat menjadi 6,7% pada tahun 2007. Dengan Tri Bina Cita Kota Malang yaitu Malang sebagai Kota Pendidikan, Kota Industri, dan Kota Pariwisata, mendukung pengembangan sektor industri khususnya industri kecil unggulan sebagai komoditi andalan dari potensi ekonomi di masa mendatang.

Salah satu diantaranya yang merupakan unggulan Kota Malang adalah Industri Kecil Keramik Dinoyo. Keberadaan sentra industri yang terletak di Kelurahan Dinoyo ini mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkan dan diberdayakan. Karena disamping mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, juga memberi manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.

Di kawasan Dinoyo ini dulunya terdapat puluhan industri yang memproduksi keramik dengan berbagai model dan corak. Konon, kemampuan membuat keramik di Dinoyo diperkirakan telah ada sejak zaman Kerajaan Kanjuruhan pada abad ke-8 Masehi. Hal itu dibuktikan dari banyak ditemukannya pecahan gerabah kuno di Dinoyo (<http://www2.kompas.com/>).

Namun semakin lama keberadaan Industri Kecil Keramik Dinoyo ini semakin menyusut jumlahnya. Pada tahun 2006 saja jumlah pengrajin keramik yang tersisa di Dinoyo, hanya sekitar 20 dari 200 perusahaan yang sebelumnya ada. Dan pada tahun 2007 menyusut kembali hingga tinggal belasan pengrajin saja. Menurut salah seorang anggota Paguyuban dan Pengrajin Keramik Dinoyo, Malang, Sucipto menyatakan bahwa "Pengrajin yang tersisa sebenarnya hanya asal bertahan saja. Pengrajin sudah kehilangan order karena ketatnya persaingan pasar dari barang-barang impor China, dan tidak mampu bertahan karena kenaikan biaya produksi setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak" (<http://www2.kompas.com/>).

Dengan berhentinya produksi karena kehilangan pasar dan tak tahan dengan kenaikan biaya produksi. Hal itu tentunya juga berdampak pada penurunan omzet penjualan itu sendiri. Penurunan penjualan itu terjadi sejak krisis pada tahun 1997. Penurunan pesanan terus berlanjut hingga saat ini karena serbuan produk dari China yang jauh lebih murah. Kini pengrajin yang tersisa hanya pasrah dan hidup dari pesanan yang terus merosot (<http://www2.kompas.com/>).

Untuk menyiasati agar para penrajin keramik tidak gulung tikar, banyak diantaranya yang beralih memproduksi souvenir-souvenir untuk pernikahan, dan sangat jarang yang memproduksi keramik khas Dinoyo seperti dulu lagi. Hal itu semata-mata dilakukan agar mereka tidak berhenti produksi saja. Selain itu, ada juga yang beralih memproduksi gypsum. Hal ini di sebabkan karena kerajinan berbahan gips ini bahanya murah serta mudah didapat, dan pembuatannya mudah. Menurut Ketua Paguyuban Perajin dan Pedagang Keramik Dinoyo, Syamsul Arifin, "para pengrajin yang beralih dari membuat keramik menjadi membuat kerajinan berbahan gips ini sebanyak 30 persen dari total 60 perajin dan pedagang keramik Dinoyo, Malang" (<http://www.kompas.com/>).

Namun upaya tersebut selain memiliki kelebihan tentunya juga memiliki kekurangan. Misalnya dengan beralih membuat souvenir pernikahan, hasil yang diperoleh pengrajin hanya sedikit, berbeda saat mereka masih memproduksi keramik. Kerajinan dari keramik biasanya dipasarkan dengan rentang harga Rp 2.000 sampai puluhan ribu rupiah dan cakupan pemasarannya bisa sampai keluar negeri. Untuk souvenir pernikahan, pengrajin mematok harga antara Rp 500 hingga Rp 7.000 per buah saja. Sehingga seperti yang dikatakan diatas bahwa benar keberadaan pengrajin tersebut hanya asal bertahan dan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Sementara dengan beralih ke kerajinan gypsum kelemahan yang didapat ialah gypsum mudah rusak sehingga tidak bisa dikirim jauh-jauh. Kalau memaksa mengirim ke tempat jauh, resiko rusaknya lebih tinggi. Sehingga ruang lingkup penjualan gypsum ini hanya di Malang saja, paling jauh antar kota. Dan kemungkinan untuk ekspor sangat kecil. Seperti halnya souvenir pernikahan, rentang harga kerajinan dari gips ini juga antara Rp 600 sampai Rp 15.000 per buah.

Kemudian menurut Sucipto, “perajin di Malang membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia, studi banding ke daerah lain untuk meningkatkan kemampuan desain, dan bantuan peralatan dari pemerintah. Saat ini perajin betul-betul hidup dengan peralatan sederhana dan kemampuan yang terbatas” (<http://www2.kompas.com/>).

Dari permasalahan tersebut, perlu penanganan lebih lanjut terhadap Industri Kecil Keramik Dinoyo. Hal ini perlu dilakukan agar Industri Kecil Keramik Dinoyo ini tidak gulung tikar dan dapat meningkatkan perekonomian rakyat serta mempertahankan warisan budaya leluhur.

Salah satu strategi yang harus diambil oleh pemerintah daerah dalam membantu menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan jalan memberdayakan industri tersebut. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, mendorong, memberi motivasi, dan membangkitkan kesadaran yang dimiliki serta mengembangkannya (R.R. Suprpto, 2002, h.187).

Pemberdayaan industri kecil ini memang sangat penting untuk dilakukan. Menurut R.R. Suprpto (2002, h.188), alasan-alasan yang mendukung pentingnya pemberdayaan Industri kecil dan UKM yaitu:

1. Masalah fleksibilitas dan adaptabilitas di dalam memperoleh bahan mentah dan peralatan;
2. Relevansinya dalam proses desentralisasi kegiatan ekonomi guna menunjang terciptanya integrasi kegiatan pada sector ekonomi lain;
3. Peranan dalam jangka panjang sebagai basis untuk mencapai kemandirian pembangunan ekonomi, karena industri kecil ini umumnya diusahakan oleh pengusaha dalam negeri dengan menggunakan kandungan impor yang rendah;
4. Potensi terhadap penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pengangguran.

Untuk menerapkan pemberdayaan industri kecil tersebut, perlu adanya peran pemerintah khususnya pemerintah daerah, yang dalam hal ini melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang untuk melakukan pengembangan secara maksimal. Salah satu langkah konkrit yang kemudian ditempuh oleh Disperindag Kota Malang adalah melalui proses pemberdayaan terhadap pengusaha dan para pelaku industri kecil.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan Disperindag Kota Malang terhadap industri kecil khususnya Industri Kecil Keramik Dinoyo ini sangatlah penting mengingat besarnya pengaruh perbaikan tersebut sejalan dengan manfaatnya. Berangkat dari berbagai permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam sehingga penulis melakukan penelitian tentang: **“Upaya Pemberdayaan Industri Kecil Keramik Dinoyo Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam rangka memberdayakan Industri Kecil Keramik Dinoyo?
2. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang?

### C. Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah memberikan informasi atau gambaran yang jelas terhadap upaya pemberdayaan industri kecil di Kota Malang melalui analisa dan telaah berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam rangka memberdayakan Industri Kecil Keramik Dinoyo
2. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

### D. Kontribusi Penelitian

Sedangkan kontribusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai input atau sumber informasi bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemberdayaan khususnya pada sektor industri kecil.
2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, sebagai bahan pertimbangan dalam pemecahan masalah yang dihadapi.

### E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan di dalam penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami terhadap alur berpikir penulis. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang tentang adanya fenomena bahwa Kota Malang dengan Tri Bina Cita nya, yaitu Malang sebagai Kota Pendidikan, Kota Industri, dan Kota Pariwisata, ternyata sektor industri khususnya industri kecil masih banyak yang mengalami ketidakberdayaan. Untuk itu diperlukan pemberdayaan industri kecil yang dalam penelitian ini diangkat

mengenai pemberdayaan industri kecil keramik Dinoyo. Dalam penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah yaitu tentang upaya Disperindag Kota Malang dalam memberdayakan industri kecil keramik Dinoyo dan faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang upaya pemberdayaan industri kecil keramik Dinoyo yang dilakukan Disperindag Kota Malang serta mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Kontribusi penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang mengemukakan teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan sehingga mendukung dalam menganalisis dan menginterpretasikan data yang meliputi teori: Pembangunan, Pemberdayaan serta teori tentang industri kecil. Penggunaan teori ini sebagai pisau analisis dalam menganalisis dan mengkaji upaya pemberdayaan industri kecil keramik Dinoyo yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang.

Bab III berisi metode penelitian yang menerangkan mengenai jenis penelitian yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan agar peneliti bisa menggambarkan fenomena dan fakta yang terjadi dalam upaya pemberdayaan industri kecil keramik Dinoyo. Fokus dari penelitian ini yaitu 1. upaya Disperindag Kota Malang dalam rangka memberdayakan industri kecil keramik Dinoyo, meliputi: a. pengembangan SDM, meliputi: 1) pendidikan dan pelatihan, 2) studi banding, 3) pembinaan managerial. b. pengembangan teknologi produksi, c. promosi pemasaran, d. pembinaan permodalan, e. pengadaan bahan baku, 2. faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang. Lokasi penelitian ini di Disperindag Kota Malang dan pengrajin industri kecil keramik Dinoyo. Sumber data nya yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data nya yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Instrumen penelitiannya yaitu peneliti sendiri menggunakan pedoman wawancara dan perangkat penunjang lainnya. Analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi. Kemudian yang terakhir adalah keabsahan data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum Kota Malang, gambaran umum Disperindag Kota Malang, gambaran umum Kelurahan Dinoyo dan profil industri kecil keramik Dinoyo. Upaya pemberdayaan industri kecil keramik Dinoyo ini meliputi: a. Pengembangan SDM, meliputi: 1) pendidikan dan pelatihan, 2) studi banding, 3) pembinaan managerial. b. pengembangan teknologi produksi, c. promosi pemasaran, d. pembinaan permodalan, e. pengadaan bahan baku. Dalam bab ini disajikan pula pembahasan serta analisa dan intepretasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya pemberdayaan tersebut.

Bab V berisi kesimpulan dan saran yang menyajikan tentang beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang diberikan peneliti terhadap hasil penelitian yang dilakukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Pembangunan

##### 1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan secara harfiah dapat diartikan sebagai administrasi di sektor pembangunan, atau administrasi yang berkaitan dengan sektor pembangunan. Oleh karena itu pembahasan tentang administrasi pembangunan tidak akan lepas dari pembahasan administrasi dan pembahasan tentang pembangunan.

Kata *administration* dalam bahasa Inggris berasal dari kata *ad+ministrare*. Sedangkan dalam bahasa Latin mempunyai arti “*to serve*”, yang artinya memberikan jasa, pelayanan, bantuan, melayani atau mengabdikan. Karakteristik utama administrasi itu sendiri adalah memberikan pelayanan dan pengabdian yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dari kata Latin *administrare* kemudian dialihkan dalam bahasa Inggris *to administer* yang mempunyai arti sama dengan *to manage*. Sehingga *administration* mempunyai arti yang sama dengan *management*, yaitu: mengelola, memimpin, atau mengarahkan semua kegiatan manusia dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Kemudian Simon mengatakan “*Administration as the activities of groups cooperating to accomplish common goals*” (Administrasi adalah merupakan aktivitas kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama) (Hardjanto, 2008, h.1). Senada dengan Simon, Siagian mengartikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tidak jauh beda dari keduanya, Gie mengartikan administrasi sebagai segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan unsur administrasi meliputi organisasi, manajemen, komunikasi, tata hubungan atau informasi, tata usaha, kepegawaian, keuangan, perbekalan, dan humas/perwakilan (Zauhar, 2001, h.11). Dari definisi diatas, maka administrasi dapat dicirikan sebagai berikut:

- a) Merupakan kegiatan kerja sama antara dua orang atau lebih;
- b) Kerja sama tersebut dilakukan secara terencana;
- c) Mempunyai tujuan tertentu; dan
- d) Pencapaian tujuan tersebut harus efisien dan efektif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Sedangkan pengertian pembangunan secara etimologik berasal dari kata "bangun" dan diberi awalan pem- dan akhiran-an untuk menunjukkan perihal pembangunan. Menurut Suryono (2004, h.26), kata bangun setidaknya mengandung empat arti : 1) bangun dalam arti sadar atau siuman (aspek fisiologi); 2) bangun dalam arti bangkit atau berdiri (aspek perilaku); 3) bangun dalam arti bentuk (aspek anatomi); dan 4) bangun dalam arti kata kerja membuat, mendirikan, atau membina (gabungan aspek fisiologi, aspek perilaku dan aspek anatomi).

Pembangunan sering diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Siagian (2003, h.4) mendefinisikan pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Dengan demikian ide pokok pembangunan menurut Siagian, bahwa pembangunan merupakan suatu proses; pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; pembangunan mengarah kepada modernitas; modernitas dicapai melalui pembangunan multi dimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Sedangkan Todaro dalam Hardjanto (2008, h.2), mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang meliputi perubahan dalam struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam tingkat kelembagaan nasional. Selain itu, pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan nasional dan pemberantasan kemiskinan.

Menurut Todaro seperti disebutkan diatas, guna mencapai sasaran yang diinginkan dalam pembangunan, maka pembangunan suatu negara itu dapat

diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial dalam kehidupannya.

Dari definisi pembangunan diatas, Tjokrowinoto dalam Suryono (2004, h.21), menyimpulkan bahwa makna pembangunan sebagai citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu), sebagai berikut :

- 1) Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ke tataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.
- 2) Pembangunan sebagai upaya manusia sadar, terencana dan melembaga.
- 3) Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*).
- 4) Pembangunan memperoleh sikap dan konsep transedental, sebagai meta disciplinary phenomom, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, *the ideologi of developmentalism*.
- 5) Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*). Menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa semakin meningkat.
- 6) Pembangunan menjadi *cultur specific, situation specific* dan *time specific*.

Pendapat diatas memberikan pemahaman bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang bersifat dinamis dan multidimensional yang menyangkut sistem sosial secara keseluruhan. Pembangunan yang tidak dijalankan sesuai rencana dapat menciptakan masalah-masalah sosial dan ketidakpuasan terhadap hasil pembangunan. Karena pada dasarnya pembangunan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan semata.

Dari pembahasan definisi administrasi dan pembangunan diatas, kita sampai pada batasan pengertian atau definisi dari Administrasi Pembangunan. Menurut Tjokroamidjojo dalam Kartasmita (1997, h.xvi-xvii), Administrasi Pembangunan adalah suatu administrasi bagi usaha pembangunan sosial ekonomi yang bersifat dinamis dan inovatif dan mengupayakan perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui berbagai pengerahan dan alokasi sumber daya untuk pembangunan.

Tidak jauh berbeda dengan Tjokroamidjojo, menurut Siagian (2003, h.5), Administrasi Pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Siagian menyebutkan bahwa definisi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional. Artinya, menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajarannya meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan. Para politisi dengan kekuatan sosial-politik harus turut berperan. Dunia usaha memainkan peranan yang besar terutama di bidang ekonomi. Para teoretisi dan cendekiawan ditantang untuk memberikan sumbangsinya, khususnya dalam penguasaan dan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para pembentuk opini (*opinion leaders*) turut berperan dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui peningkatan kemampuan melaksanakan pengawasan sosial. Bahkan “rakyat jelata” pun harus ikut dilibatkan. Singkatnya, pembangunan merupakan “urusan” semua pihak dalam suatu masyarakat bangsa. Dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, tidak ada masyarakat bangsa yang hanya berperan sebagai “penonton”, semua harus berperan sebagai “pemain”.

Administrasi Pembangunan merupakan salah satu disiplin ilmiah dalam “rumpun” Administrasi Negara. Telah diketahui dan diakui pula bahwa fokus analisis Administrasi Pembangunan adalah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu nasion dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan menyingkirkan ancaman.

Sebagai sebuah bidang studi interdisipliner, administrasi pembangunan mempunyai dua fokus utama yaitu:

- 1) Pembangunan atau pengembangan administrasi (*the development of administration*), yaitu mengembangkan kapasitas institusi organisasi dan penyempurnaan manajemen dari proses perubahan, dan
- 2) Pengadministrasian pembangunan (*the administration of development*), yaitu peningkatan kemampuan untuk membentuk dan



mengimplementasikan kebijakan/program pembangunan dalam semua sektor (Hardjanto, 2008, h.6).

Ada dua ciri pokok administrasi pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1995, h.11), yaitu:

- 1) Orientasinya kepada usaha-usaha ke arah perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Bahkan administrasi pembangunan dimaksudkan untuk membantu dan mendorong ke arah perubahan-perubahan besar (*basic changes*) di berbagai kegiatan/bidang kehidupan yang saling kait-berkait dan akan memberikan hasil akhir terdapatnya proses pembangunan.
- 2) Bahwa perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial politik, dan lain-lain.

Tjokroamidjojo (1995, h.14), menyebutkan pula ruang lingkup administrasi pembangunan, yaitu:

- 1) Ruang lingkup administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi yaitu penyusunan kebijakan penyempurnaan administrasi negara. Dalam hal ini usaha penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian, tata kerja dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Ini disebut sebagai *the development of administration*. Fungsi lainnya adalah merumuskan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan (diberbagai bidang) serta pelaksanaannya secara efektif. Ini disebut juga sebagai *the administration of development*.
- 2) Administrasi untuk pembangunan ini dapat pula dibagi dalam dua sub fungsi. Pertama adalah perumusan kebijakan pembangunan. Kedua adalah pelaksanaannya secara efektif.

Jadi Administrasi Pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan pemerintah/negara secara sadar, terencana dan terus menerus untuk mencapai perubahan yang lebih baik dan tercapainya tujuan pembangunan. Secara lebih spesifik, administrasi pembangunan berfungsi merumuskan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan (ke arah modernisasi, pembangunan bangsa atau pembangunan sosial ekonomi), dan melaksanakan secara efektif dengan pendekatan yang multidisiplin.

## 2. Paradigma Pembangunan

Menurut Suryono (2004, h.79), paradigma dimaksudkan sebagai cara pandang terhadap suatu persoalan yang didalamnya terdapat sejumlah asumsi tertentu, teori tertentu, metodologi tertentu, model tertentu, dan solusi tertentu. Dalam pembangunan, setidaknya ada tiga paradigma menurut Suryono dan Nugroho (2008, h.11-13), yaitu:

### a) Paradigma Pertumbuhan

Konsep paradigma pertumbuhan (*growth paradigma*) merupakan asas pemikiran yang memperjuangkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan negara untuk mengejar ketertinggalan. Sasaran utama dari paradigma pertumbuhan adalah menciptakan kondisi masyarakat dan negara yang lebih baik dengan mengusahakan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dan negara.

Teori pembangunan yang paling menekankan peningkatan pendapatan per kapita ini mempunyai asumsi bahwa kalau sudah terjadi peningkatan pada suatu sektor, selanjutnya akan terjadi *trickle down effect* atau efek menetes ke bawah. Menurut Nasution dalam Suryono dan Nugroho (2004, h.12), pendekatan pertumbuhan (*economic growth development*) dengan tetesan ke bawah (*trickle down effect*) yang begitu dominan kandas di tengah jalan.

Pembangunan yang lebih menonjolkan infrastruktur fisik justru memunculkan ketimpangan sosial ekonomi secara meluas. Pembangunan yang dilakukan membawa implikasi munculnya disparatis dan ketergantungan. Intinya, pertumbuhan pendapatan tersebut tidak disertai pendapatan masyarakat. Ide tetesan ke bawah tidak dapat diwujudkan dengan proporsional karena pertumbuhan yang terjadi hanya dinikmati oleh kaum elit, sedangkan masyarakat kecil hanya menerima sebagian kecil dari efek pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang seharusnya menempatkan kaum miskin dan tidak berdaya menjadi prioritas, tetapi pembangunan berbasis pertumbuhan justru memperlakukan pemilik modal sebagai “primadona” yang dibanjiri oleh fasilitas dan kemudahan.

### b) Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

Adanya kenyataan bahwa hasil-hasil pembangunan tidak dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat telah mengondisikan ketimpangan dan ketergantungan. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan paradigma baru yaitu paradigma pembangunan berkelanjutan.

Paradigma pembangunan berkelanjutan menawarkan konsep pembangunan yang bersifat ramah lingkungan, yang pada dasarnya pembangunan hendaknya memerhatikan masalah sumber daya yang bersifat *renewable/non-renewable*. Dengan demikian, pemakaian segenap potensi dan studi pembangunan akan disertai kebijakan pemeliharaan dan pemulihannya.

### c) Paradigma Human Development

Belajar dari kegagalan maka pendekatan pembangunan menggunakan paradigma baru yang lebih humanis, yaitu pendekatan pembangunan yang memerhatikan lingkungan dan pembangunan berwajah manusiawi. Pendekatan ini memprioritaskan pembangunan sosial dan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan strategi *Sustainable development*. Pembangunan berpihak kepada rakyat, bukan elite penguasa. Dengan demikian konsentrasi pembangunan lebih pada ekonomi kerakyatan dengan mengedepankan fasilitas pembangunan usaha kaum lemah.

Pembangunan yang berbasis manusia mencakup pembangunan masyarakat (*community based development*) dan pembangunan manusia (*people centered development*). Paradigma kemanusiaan ini berusaha mengangkat martabat manusia sebagaimana mestinya sebagai makhluk yang memiliki harga diri, kemampuan inteligensi, dan perasaan. Manusia tidak dapat disamakan dengan alat produksi untuk melipatgandakan hasil semata, hendaknya manusia dihargai dan dihormati dengan cara meningkatkan kualitas SDM sehingga menempatkan manusia pada martabat yang lebih baik.

## 3. Peran dan Fungsi Pemerintah Dalam Pembangunan

Peranan dan fungsi pemerintah seringkali tergantung dengan tingkat kemajuan suatu negara terutama dibidang ekonomi materiil. Seringkali pula

terbawa oleh pengaruh dari banyak sedikitnya sumber-sumber kekayaan nasional yang memberikan alternatif-alternatif bagi cara pengolahannya.

Pada umumnya, semakin terasa bahwa bagi negara-negara baru berkembang atau yang belum maju dibutuhkan peranan serta fungsi pemerintah yang lebih besar. Biarpun cara pelaksanaan dari peranan serta fungsi tersebut dapat berbeda-beda. Peranan pemerintah sebagai unsur pembaharu dan pendorong pembangunan (*development agent*) diakui, tetapi caranya bisa dilakukan melalui pimpinan dan pengaturan yang dilakukan oleh negara, atau pemberian kebebasan pada sektor swasta yang cukup besar, ataupun suatu usaha pembangunan berencana dimana pemerintah memberikan peranan dalam pengarahan serta melakukan cara-cara tak langsung (dengan menggunakan banyak upaya mekanisme pasar/harga) untuk merangsang perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat luas.

Menurut Tjokroamidjojo (1995, h.18), peranan pemerintah dapat juga dilihat dari tiga macam bentuk sebagai berikut:

- a) Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban. Dalam perkembangannya, pemerintah seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini merupakan peranan pemerintah yang paling sederhana.
- b) Kemudian timbul pengertian tentang *Service State*, dimana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak pemikiran-pemikiran mengenai *Welfare State* atau negara kesejahteraan.
- c) Tetapi kemudian terdapat suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai *entrepreneur* atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi "*development agent*" atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan.

Mengenai cara pelaksanaan peranan pemerintah, terdapat klasifikasi sebagai berikut:

Klasifikasi pertama disebut sebagai klasifikasi Awaloedin, yaitu pembagian cara pelaksanaan pemerintah atas:

- a) Fungsi pengaturan, dalam hal ini dapat di sub-klasifikasikan sebagai: a. Penentuan kebijakan pembangunan, b. Pemberian pengarahan dan bimbingan, c. Pengaturan melalui perijinan, dan d. Pengawasan. Produk dari fungsi ini adalah berbagai peraturan-peraturan.

- b) Fungsi pemilikan, pemerintah memiliki sendiri usaha-usaha pembangunan ekonomi atau sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau oleh swasta.
- c) Fungsi penyelenggaraan, pemerintah menyelenggarakan sendiri semua kegiatan ekonomi atau sosial (Tjokroamidjojo, 1995, h.18).

Klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan pemerintahan ini dapat dikemukakan pula dari pemikiran Irving Swerdlow yang menyebutkan bahwa *involvement* atau campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih positif merupakan proses pembangunan), dapat dilakukan dengan lima macam cara, yaitu:

- a) Operasi langsung (*direct operation*), pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan pembangunan tertentu.
- b) Pengendalian langsung (*direct control*), pemerintah melakukan pengendalian langsung terhadap usaha-usaha pembangunan lewat penggunaan perijinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan penetapan harga, dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang "*action laden*" (yang berwenang dalam berbagai perijinan, alokasi, tarif, dan lain-lain) atau kalau tidak, berusaha untuk menjadi *action laden*.
- c) Pengendalian tak langsung (*indirect control*), pemerintah memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk "daftar barang tertentu".
- d) Pemengaruhan langsung (*direct influence*), pemerintah melakukan pemengaruhan langsung dengan cara memberikan persuasi dan nasehat dalam usaha-usaha pembangunan seperti misalnya gerakan koperasi, menabung, keluarga berencana, dan lain-lain.
- e) Pemengaruhan tak langsung (*indirect influence*), ini merupakan bentuk campur tangan pemerintah yang paling ringan. Misalnya hanya memberikan informasi, menjelaskan kebijakan pemerintah, contoh-contoh teladan tentang efisiensi dan ketidakborosan. Ada lagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal baru (*promoting a receptive attitude toward innovation*) (Tjokroamidjojo, 1995, h.18-19).

Lepas dari pada tingkat campur tangan pemerintah dalam berbagai kegiatan usaha maka kenyataannya adalah bahwa fungsi pemerintah makin lama makin banyak. Peranan serta fungsi pemerintah juga berhubungan erat dengan usaha pembangunan suatu negara. Apabila tujuan-tujuan pokok pemerintah tetap mencerminkan tujuan-tujuan masyarakat, maka tujuan pokok itu pada umumnya adalah pembangunan bangsa dan kesejahteraan sosial ekonomi.

Pada umumnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tugas-tugas yang diperluas tersebut diterima sebagai tugas pemerintah dalam rangka

mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan dan terlaksananya pembangunan. Tidak selalu pemerintah atau elite-elite pemerintah suatu negara tertentu cukup mampu untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Mengenai peranan serta fungsi pemerintah dalam pembangunan nasional di Indonesia, landasannya sudah terdapat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945, yang petikannya sebagai berikut:

...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...

## **B. Pemberdayaan**

### **1. Pengertian Pemberdayaan**

Konsep pemberdayaan atau *empowerment* yang dibidani oleh Friedmann (1992), muncul karena adanya dua hal yakni kegagalan dari harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menaggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan muncul akibat adanya alternatif-alternatif pembangunan yang dimasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kegagalan dari harapan menurut Friedmann dalam Hardjanto (2008, h.24), bukanlah merupakan alat ukur dari hasil kerja ilmu-ilmu sosial, melainkan lebih merupakan cermin dari nilai-nilai normatif dan moral. Kegagalan dari harapan akan terasa sangat nyata pada tingkat individu dan masyarakat. Pada tingkat yang lebih luas, yang dirasakan adalah hanya gejala dari kegagalan dan harapan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya merupakan nilai kolektif dari pemberdayaan individual.

Konsep *empowerment* sebagai suatu konsep alternatif pembangunan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung, melalui partisipasi, demokrasi dari pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokusnya adalah persoalan lokalitas, sebab *civil society* akan lebih siap diberdayakan melalui issue-issue lokal. Namun Friedmann juga mengingatkan bahwa adalah sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan

ekonomi dan struktur-struktur diluar *civil society* diabaikan. Oleh karena itu menurut Friedmann, pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas faktor ekonomi saja namun juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar (*bargaining position*) baik secara nasional maupun internasional (Friedmann dalam Hardjanto, 2008, h.24).

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1996, h.214), istilah pemberdayaan berasal dari kata berdaya yang berarti berkekuatan, berkemampuan, bertenaga untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan asal katanya pemberdayaan atau memberdayakan berasal dari kata *empowerment* dan *empower*, yang menurut Webster dalam Sedamaryanti (2003, h.59), mengandung arti:

“Pertama, *to give power or authority to*, serta arti kedua berarti *to give ability to or enable*. Dimana pengertian pertama mengandung makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otorisasi kepada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua mengandung makna sebagai upaya memberi kemampuan atau keberdayaan”.

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat, dkk (2000, h.4), mengandung tiga pengertian, yaitu:

“pertama, pemihakan atau memberi prioritas kepada yang paling memerlukan. Kedua, mempersiapkan pada masyarakat yang memperoleh prioritas dalam upaya menyamakan level (*level playing field*) dan yang ketiga melindungi segenap pelaku pembangunan khususnya masyarakat yang mempunyai prioritas diberdayakan”.

Sedangkan menurut Kartasmita (1996, h.144), bahwa memberdayakan masyarakat mengandung arti:

“upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu, hanya dengan mengandalkan pada kekuatan sendiri untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga memberdayakan mempunyai pengertian memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan

mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya”.

Lebih lanjut Kartasasmita (1996, h.152), menambahkan bahwa:

“pemberdayaan pada hakekatnya berada pada diri manusia, sedangkan faktor luar manusia hanyalah berfungsi sebagai stimulus, perangsang munculnya semangat, rasa atau dorongan pada diri manusia untuk memberdayakan dirinya sendiri, untuk mengendalikan dirinya sendiri, untuk mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya”.

Selanjutnya menurut Pranarka dan Moeljarto dalam Sedarmayanti (2003, h.60), menyebutkan setidaknya ada dua kecenderungan yang terjadi dalam proses pemberdayaan, yaitu:

“pertama proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya, disebut juga sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Kedua menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberadaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog, disebut juga kecenderungan sekunder”.

Pengertian pemberdayaan diatas berdasarkan asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, pada dasarnya semua masyarakat mempunyai potensi, hanya kadarnya saja yang berbeda-beda. Oleh karena itu dalam konsep pemberdayaan ini adalah pengembangan daya yang dimiliki masyarakat tersebut. Dari uraian tersebut Sulistiyani (2004, h.79), menyimpulkan bahwa “pemberdayaan adalah upaya membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya”.

Sedangkan definisi pemberdayaan menurut Suharto (2005, h.57-59), dilihat dari tujuan, proses, dan cara pemberdayaan yaitu:

- a) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah;
- b) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya;

- c) Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial;
- d) Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Dari pengertian diatas, Parson dalam Suharto (2005, h.63), mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

- a) Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar;
- b) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna, dan mampu mengendalikan diri dan orang lain;
- c) Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa makna dari pemberdayaan masyarakat yaitu: (a) meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan, (b) meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan, yakni yang bersifat *“people centered, participatory, empowering and sustainable”*.

## 2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi untuk mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Dengan

demikian, untuk menjadi mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material.

Untuk mencapai kemandirian masyarakat itu diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan atau daya yang meningkat setiap waktu. Dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka. Apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan suatu visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan suatu komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal. Sebagaimana dikemukakan oleh Montagu dan Matson dalam Sulistiyani (2004, h.81), yang mengusulkan konsep *The Good Community and Competency* yang meliputi sembilan konsep komunitas yang baik dan empat komponen kompetensi masyarakat. *The Good Community and Competency* tersebut yaitu:

- a) Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain berdasarkan hubungan pribadi, adanya kelompok juga kelompok primer;
- b) Komunitas memiliki otonomi yaitu kewenangan dan kemampuan untuk mengurus kepentingannya sendiri secara bertanggung jawab;
- c) Memiliki viabilitas yaitu kemampuan memecahkan masalah sendiri;
- d) Distribusi kekuasaan merata sehingga setiap orang berkesempatan riil, bebas memiliki dan menyatakan kehendaknya;
- e) Kesempatan setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk kepentingan bersama;
- f) Komunitas memberi makna kepada anggota;
- g) Adanya heterogenitas dan beda pendapat;
- h) Pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat kepada yang berkepentingan;
- i) Adanya konflik dan *managing conflict*.

Pada awalnya upaya pemberdayaan masyarakat pasti dihadapkan pada kondisi masyarakat yang lemah. Mungkin terjadi pada masyarakat secara keseluruhan yang berada pada wilayah tertentu sama sekali belum berdaya. Dengan demikian orientasi pemberdayaan memang secara tegas menunjuk pada suatu *target group* masyarakat itu sendiri. Di sisi lain, sangat mungkin terjadi bahwa sasaran yang perlu diberdayakan itu hanyalah sebagian dari masyarakat saja, yaitu khususnya pihak yang belum memiliki daya.

Dapat dicontohkan misalnya masyarakat miskin kota yang berada pada suatu kawasan, yang sebenarnya warga masyarakat bersifat heterogen dilihat dari aspek pendapatan. Ada anggota masyarakat yang kaya raya, berkecukupan, pendapatan rendah, berada di garis kemiskinan dan di bawah garis kemiskinan. Dilihat dari heterogenitas tersebut, maka ada sebagian masyarakat yang sudah tidak perlu diberdayakan namun di sisi lain masih ada kelompok miskin kota yang perlu diberdayakan. Hal inilah yang selanjutnya disebut dengan komunitas miskin. Apa yang ingin dicapai untuk meningkatkan kondisi komunitas tersebut melalui sembilan langkah sebagaimana telah dikemukakan diatas. Sedangkan untuk melengkapi sebuah komunitas yang baik, perlu ditambahkan kompetensi sebagai berikut:

- a) Mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas;
- b) Mampu mencapai kesempatan tentang sasaran yang hendak dicapai dan skala prioritas;
- c) Mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang telah disetujui;
- d) Mampu bekerjasama rasional dalam bertindak mencapai tujuan (Montagu dan Matson dalam Sulistiyani, 2004, h.82).

Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan kompetensi pendukung untuk mengantarkan masyarakat agar mampu memikirkan, mencari dan menentukan solusi yang terbaik dalam pembangunan sosial. Di samping itu, kompetensi keempat merupakan kompetensi masyarakat untuk menentukan strategi dalam merealisasikan solusi yang telah ditetapkan. Itu semua akan terwujud apabila proses belajar yang dilakukan efektif. Proses belajar tersebut merupakan suatu keharusan untuk ditempuh, karena sebagai suatu metodologi/cara yang tidak dapat dihindari.

### **3. Tahap-tahap Pemberdayaan**

Menurut Sumodiningrat dalam Sulistiyani (2004, h. 82), “pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi”. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut yaitu meliputi:

- a) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri;
- b) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan;
- c) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Sulistiyani, 2004, h.83).

Pada tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini, pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran diharapkan dapat membuka keinginan dan kesadaran masyarakat akan kondisinya saat ini, dan dengan demikian dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi yang lebih baik. Sentuhan akan rasa ini akan membawa masyarakat bertumbuh, kemudian merangsang semangat kebangkitan mereka untuk meningkatkan kemampuan diri dan lingkungan. Dengan adanya semangat tersebut diharapkan dapat mengantarkan masyarakat untuk sampai pada kesadaran dan kemauan untuk belajar. Dengan demikian masyarakat akan semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengaruh dan ketrampilan untuk memperbaiki kondisi.

Pada tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan-ketrampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terpenuhi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-ketrampilan yang memiliki hubungan dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhannya tersebut. Kesadaran ini akan merangsang terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan-ketrampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.

Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-ketrampilan yang diperlukan supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat didalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi didalam lingkungannya.

Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat pada kondisi seperti ini sering kali didudukkan sebagai subjek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja.

Namun masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja. Perlu tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Selain itu juga diperlukan perlindungan supaya dengan kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan.

Sementara menurut Pranarka dan Prijono dalam Hardjanto (2008, h.26), menyebutkan bahwa pemberdayaan meliputi tiga fase, yaitu:

- a) Fase Inisial, pada tahap inisial semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, oleh pemerintah, dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada fase ini rakyat bersifat pasif, melaksanakan apa yang direncanakan pemerintah dan tetap tergantung pada pemerintah. Peran pemerintah pada fase inisial ini sangat terasa.
- b) Fase Parsipatoris, pada fase ini proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam pembangunan untuk menuju kemandirian. Peran pemerintah semakin dikurangi dengan melibatkan masyarakat secara aktif.
- c) Fase Emansipatoris, pada fase ini proses pemberdayaan masyarakat berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan didorong oleh pemerintah bersama masyarakat. Pada fase emansipatoris ini masyarakat sudah dapat menemukan kekuatan dirinya sehingga dapat melakukan perubahan dalam mengaktualisasikan diri. Puncak dari pemberdayaan adalah ketika berada pada fase ketiga ini.

#### **4. Sasaran Pemberdayaan**

Sasaran pemberdayaan merupakan masyarakat miskin, hal ini sesuai dengan pernyataan Schumacher dalam Sulistiyani (2004, h.90), yang memiliki pandangan bahwa pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menyetimpangkan struktural lebih dahulu. Masyarakat miskin

sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan demikian memberikan “kail jauh lebih tepat daripada memberikan ikan”. Disamping itu NGO merupakan agen yang mendapat posisi penting, karena dipandang lebih bersifat *entrepreneur*, berpengalaman dan inovatif dibanding pemerintah.

Dengan demikian untuk mencapai sasaran pemberdayaan, diperlukan kemitraan yang selaras antara masyarakat, pemerintah, dan swasta sebagai wujud *good governance*.

## 5. Model-model Pemberdayaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, model memiliki arti contoh, pola, acuan, ragam, macam, dan sebagainya. Sementara itu, pengertian pemberdayaan adalah peningkatan kemampuan dan kemandirian sehingga orang atau lembaga tersebut mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model pemberdayaan adalah contoh, pola, acuan, ragam, macam upaya peningkatan kemampuan dan kemandirian sehingga orang atau lembaga yang bersangkutan mampu mengembangkan kemampuannya secara optimal. Berikut beberapa model pemberdayaan seperti yang diungkapkan Suryono dan Nugroho (2008, h.29-37), dalam bukunya yang berjudul “Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah”:

### a) Model *People Centre Development*

Menurut model ini, pembangunan kualitas manusia adalah upaya meningkatkan kapasitas manusia untuk mempengaruhi dan mengatur masa depannya. Korten dalam Suryono dan Nugroho (2008, h.29), menyebutkan model ini sebagai *People Centre Development*. Model ini mencoba mengangkat martabat manusia sebagaimana mestinya sebagai makhluk yang memiliki harga diri, kemampuan inteligensi, dan perasaan. Manusia tidak dapat disamakan dengan alat produksi untuk melipatgandakan hasil semata, melainkan manusia hendaknya dihargai dan dihormati. Dengan meningkatkan kualitas SDM maka akan menempatkan manusia pada martabat yang lebih baik.

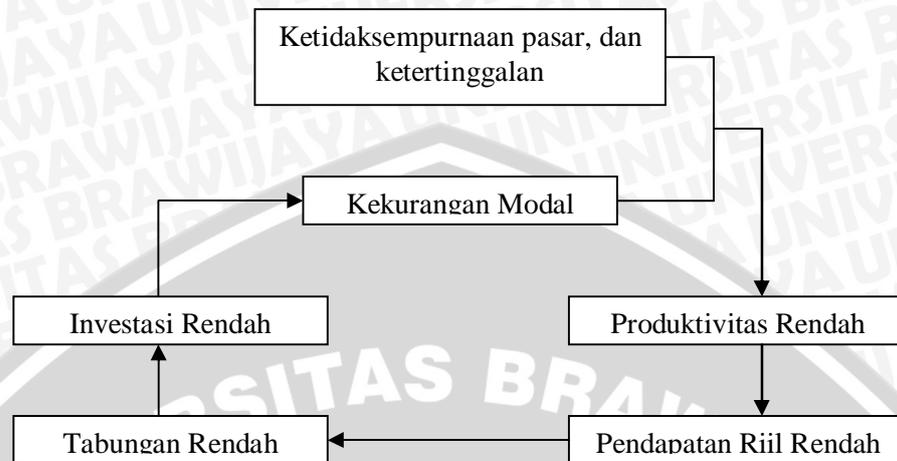
Contoh program yang menerapkan model ini antara lain program impres desa tertinggal (IDT), proyek kawasan terpadu (PKT), proyek peningkatan pendapatan petani dan nelayan kecil (P4K), jaring pengaman sosial (JPS), bantuan beras untuk orang miskin (Raskin), bantuan langsung tunai (BLT). Program-program tersebut dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan dan membantu masyarakat agar bisa keluar dari perangkap kemiskinan. Meskipun demikian, program-program tersebut sedikit banyak telah mengalami kegagalan. Sebagaimana diidentifikasi oleh Sutrisno dalam Suryono dan Nugroho (2008, h.30), sebab-sebab kegagalan itu di antaranya (1) program itu direncanakan pemerintah atas dasar persepsi dan asumsi yang keliru terhadap sebab munculnya kemiskinan; (2) perencanaan program antikeskimpinan dilakukan secara *uniform*; (3) lemahnya monitoring pemerintah terhadap pelaksanaan program antikeskimpinan; (4) kurangnya dukungan penelitian perihal masalah-masalah kemiskinan; (5) tertutupnya sikap pemerintah terhadap masalah-masalah kemiskinan; (6) justru melahirkan sikap ketergantungan dari masyarakat terhadap pemerintah.

b) Model Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse

Nurkse mensinyalir bahwa “*a poor country is poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena dia miskin) (Kuncoro dalam Suryono dan Nugroho, 2008, h.30). Selanjutnya dijelaskan bahwa kemiskinan itu merupakan suatu lingkaran yang disebutnya dengan lingkaran kemiskinan yang mengemukakan bahwa kemiskinan diawali dari adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai model lingkaran setan versi Nurkse diatas, dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut ini:

**Gambar 1**  
**Lingkaran Setan Kemiskinan**



Sumber: Nurkse (1953) dalam Suryono dan Nugroho (2008)

Sampai saat ini, negara berkembang masih memiliki beberapa ciri, terutama sulitnya mengelola pasar dalam negerinya menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Ketika mereka tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi maka kecenderungan kapital dapat terjadi, diikuti rendahnya produktivitas, turunnya pendapatan riil, rendahnya tabungan dan investasi mengalami penurunan sehingga melingkar ulang menuju keadaan kurangnya modal. Demikian seterusnya berputar. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini.

#### c) Model Kemitraan

Kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Bertolak dari pengertian tersebut, kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi beberapa persyaratan, yakni (1) ada dua pihak atau lebih; (2) memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan; (3) ada kesepakatan; dan (4) saling membutuhkan (Suryono dan Nugroho, 2008, h.31-33).

Contoh model kemitraan dalam upaya pemberdayaan masyarakat antara lain adalah model kemitraan dalam program IDT. Program tersebut memiliki model kemitraan dua arah antara pemerintah dan agen pembaru tanpa melibatkan swasta. Dalam hal ini pemerintah berada pada level perencana dan donatur, sedangkan agen pembaru berada pada level implementor, sedangkan keterlibatan masyarakat berada pada tataran penerima program (Sulistiyani, 2004, h. 148).

d) Model Grameen Bank

Model kerja dari Grameen Bank adalah sebagai berikut: sebuah unit bank dipimpin oleh manager lapangan dan sejumlah pekerja yang mencakup area pelayanan sekitar 15-20 desa. Manajer dan karyawan datang ke desa untuk memperkenalkan mereka dan mengenalkan program bank pada masyarakat. Grameen Bank memberikan kredit kepada masyarakat tanpa agunan dan menciptakan sistem perbankan yang berbasis pada kesalingpercayaan, akuntabilitas, partisipasi, dan kreativitas. Pada langkah pertama, dua orang dari kelompok yang menerima pinjaman, kelompok akan dipantau selama satu bulan apakah anggota kelompok mengikuti aturan bank. Jika kedua orang mengembalikan pinjaman dengan bunganya selama periode 50 minggu maka anggota lain baru dapat meminjam dana tersebut. Batasan ini menyebabkan anggota lain agar segera mengembalikan dalam jangka waktu tertentu. Ini membuat rasa tanggung jawab bersama dalam kelompok seperti sebuah jaminan dari pinjaman. Grameen Bank bertujuan memberikan pelayanan keuangan kepada kelompok miskin khususnya perempuan guna menolong mereka memerangi kemiskinan. Meskipun demikian, Grameen Bank tetap berusaha mendapatkan keuntungan agar operasional bank tidak berhenti.

e) Model Sri Mahila SEWA Sahakari Bank

Model lain diterapkan oleh Sri Mahila SEWA Sahakari Bank, yakni lembaga keuangan yang memberikan akses keuangan terhadap wanita-wanita yang lemah/miskin. Peminjaman hanya untuk kegiatan ekonomi bukan untuk keperluan pribadi. Bank memperkerjakan dan mendorong wanita-wanita tersebut untuk menyelamatkan kehidupan

mereka dengan menabung melalui bank tersebut. Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan mengunjungi wanita-wanita di tempat kerja atau di rumah sehingga mereka dapat menyimpan uang tabungan dengan mudah. Ketika wanita-wanita tersebut memerlukan pinjaman, pegawai-pegawai bank tersebut datang dengan seorang nasabah yang telah meminjam atau mengenal SEWA Bank.

Wanita-wanita diharapkan mendaftarkan rekening tabungan di bank mereka dan aset mereka, seperti rumah dan perkakas di dalamnya. Bank menyediakan pinjaman dengan periode pembayaran kembali tiga tahun untuk tujuan produktif. Modal pinjaman terbagi dalam tiga peruntukan, yaitu modal kerja untuk membeli perkakas perdagangan, pembuatan rumah, atau pembukaan toko atau pekerjaan.

f) Model Sistem Kelompok Tanggung Renteng

Model ini banyak diadopsi oleh para pengelola koperasi di Indonesia, khususnya pengelola koperasi simpan pinjam yang pada dasarnya merupakan upaya penguatan kelompok dalam berinteraksi antara manusia. Sistem kelompok tanggung renteng dapat diperjelas dalam uraian berikut:

- 1) Hakikat sistem tanggung renteng merupakan upaya memperbaiki kualitas manusia melalui interaksi antar manusia.
- 2) Kelompok tanggung renteng merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana pendewasaan manusia melalui interaksi antarmanusia dalam kelompok menuju manusia berkualitas.
- 3) Nilai-nilai kelompok tanggung renteng mengembangkan nilai-nilai umum dan nilai-nilai khusus sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki koperasi.

## 6. Indikator Pemberdayaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator pemberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Hal ini diperuntukkan ketika semua program pemberdayaan telah diberikan, semua upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-

aspek apa saja dari perubahan yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi, dan Riley dalam Suharto (2005, h.63), mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yaitu:

- a) Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri.
- b) Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, dan lain-lain). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- c) Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, poin tinggi diberikan kepada individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, terlebih jika ia membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- d) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara mandiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditanam, memperoleh kredit usaha.
- e) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja diluar rumah.
- f) Kesadaran hukum dan politik: mengenai nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- g) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap “berdaya” jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
- h) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Sedangkan Suharto sendiri menjelaskan indikator keberdayaan masyarakat yang dapat dilihat melalui Tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1**  
**Indikator Keberdayaan Masyarakat**

Jenis Hubungan Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan Kultural dan Politis
Kekuasaan di dalam: meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah	(1) Evaluasi positif terhadap kontribusi dirinya; (2) keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara; (3) keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat	(1) Kepercayaan diri dan kebahagiaan; (2) keinginan memiliki kesejahteraan yang setara; (3) keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain; (4) keinginan untuk mengontrol jumlah anak	(1) <i>Assertiveness</i> dan otonomi; (2) keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk tradisi budaya diskriminasi hukum; (3) keinginan terlibat dalam proses budaya, hukum dan politik
Kekuasaan untuk ( <i>power to</i> ): meningkatkan kemampuan individu untuk berubah; meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses	(1) Akses terhadap pelayanan keuangan mikro; (2) akses terhadap pendapatan; (3) akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga; (4) akses terhadap pasar; (5) penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak	(1) Ketrampilan, termasuk kemelekan huruf; (2) status kesehatan dan gizi; (3) kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi; (4) ketersediaan pelayanan kesejahteraan publik	(1) Mobilitas dan akses terhadap dunia di luar rumah; (2) pengetahuan mengenai proses hukum, politik dan kebudayaan; (3) kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintangi akses terhadap proses hukum, politik dan kebudayaan
Kekuasaan atas ( <i>power over</i> ): perubahan pada hambatan-hambatan, sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro; kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan tersebut	(1) Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkan; (2) kontrol atas pendapatan aktifitas produktif keluarga lainnya; (3) kontrol atas aset produktif dan kepemilikan rumah tangga; (4) kontrol atas kepemilikan alokasi tenaga kerja keluarga	(1) Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga berencana; (2) aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat	(1) Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat; (2) keterlibatan individu dalam proses budaya, hukum dan politik
Kekuasaan dengan ( <i>power with</i> ): meningkatkan solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan, ditingkat rumah tangga, masyarakat dan makro	(1) Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern; (2) mampu memberi gaji terhadap orang lain; (3) tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi gender dalam konteks ekonomi makro	(1) Penghargaan tinggi terhadap dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga; (2) tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik	(1) Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis; (2) tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat; (3) partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat kultural, politis, hukum pada tingkat masyarakat dan makro

Sumber: Suharto (2005, h.65)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Suharto ingin menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu dalam merespon kejadian disekitarnya. Sehingga masyarakat dapat dikategorikan seperti pada tabel diatas sesuai tingkat keberdayaannya. Semakin tinggi tingkat keberdayaannya, maka masyarakat tersebut memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang positif. Sehingga campur tangan pemerintah dalam pemberdayaan semakin sedikit.

## 7. Upaya Pemberdayaan

Agar pemberdayaan dapat tumbuh dengan baik, maka diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak yang dapat menunjang dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya tertentu seperti yang dikemukakan oleh Sumodiningrat dalam Mashoed (2004, h.40), yang mengatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan adalah:

- a) Bantuan dana sebagai modal usaha;
- b) Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan sosial ekonomi rakyat;
- c) Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi dan jasa masyarakat;
- d) Pelatihan bagi aparat dan masyarakat;
- e) Penguatan kelembagaan sosial ekonomi rakyat.

Dapat dilihat bahwa dalam upaya tersebut bukan hanya dalam peningkatan pada bidang perekonomian saja, tetapi juga diarahkan kepada pengembangan kualitas sumber daya manusia, seperti adanya usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah serta masyarakat melalui pelatihan-pelatihan.

Menurut Kartasmita (1996, h.159), bahwa memberdayakan masyarakat harus dilaksanakan melalui tiga cara, yaitu:

- a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat berkembang. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk

- membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran atau potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam hal ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain itu untuk menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.
  - c) Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus di cegah yang lemah menjadi bertambah lemah oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka ini, adanya peraturan perundangan yang secara jelas dan tegas melindungi golongan lemah sangat diperlukan. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal ini justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemberian. Karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atau usaha sendiri.

Pada setiap upaya pemberdayaan baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun pihak yang peduli kepada masyarakat, upaya itu harus di pandang sebagai pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat. Berbagai upaya tersebut paling tidak harus memuat lima hal pokok, yaitu: (a) bantuan dana sebagai modal usaha; (b) pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat; (c) penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat; (d) pelatihan dan penyuluhan bagi aparat dan masyarakat; (e) penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat.

Hal yang tidak jauh beda dikemukakan oleh Sumodiningrat (1997, h.6), bahwa upaya pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

- a) Pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Setiap anggota masyarakat secara alamiah memiliki potensi yang dapat dikembangkan, itu berarti bahwa setiap anggota masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki menuju kehidupan yang lebih baik.
- b) Pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya

yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses-akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan pekerjaan dan pasar.

- c) Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat berarti upaya melindungi untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan untuk kemitraan yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

Lebih lanjut Sumodiningrat (1997, h.9), menyatakan bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat diperlukan dua persyaratan pokok, yaitu:

- a) Perencanaan pembangunan dengan strategi pemberdayaan masyarakat adalah mengarah pada strategi dasar pemberdayaan masyarakat yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan, dan strategi ini mempunyai tiga arah, yaitu: (1) pemihakan dan pemberdayaan masyarakat; (2) pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat; (3) modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal.
- b) Pelaksanaan program pembangunan yang berwajah pemberdayaan masyarakat ini memiliki ciri-ciri antara lain: (1) kegiatan yang dilakukan harus terarah dan menguntungkan masyarakat lemah; (2) pelaksanaannya harus dilakukan oleh masyarakat sendiri, dimulai dari pengenalan apa yang dilakukan; (3) karena masyarakat yang lemah sulit untuk bekerja sendiri-sendiri akibat kekurangberdayaannya, maka upaya pemberdayaan masyarakat menyangkut pula pengembangan kegiatan usaha bersama dalam kelompok yang dapat di bentuk atas dasar wilayah tempat tinggal; (4) menggerakkan partisipasi yang luas dari masyarakat untuk turut serta membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial, disini termasuk keikutsertaan orang-orang setempat yang telah maju dan anggota masyarakat mampu lainnya, organisasi kemasyarakatan termasuk LSM, perguruan tinggi dan sebagainya.

## 8. Pendekatan dan Strategi Pemberdayaan

Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan pemberdayaan, maka diperlukan adanya suatu pendekatan dan strategi dalam pemberdayaan tersebut. Menurut Elliot dalam Pranarka & Prijono (1996, h. 13), di dalam pemberdayaan perlu adanya “strategi pemberdayaan” yang dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

- a) *The Welfare Approach*. Pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pendekatan *sentrum of power*, yang dilatarbelakangi dengan kekuatan potensi lokal masyarakat itu sendiri.

- b) *The Development Approach*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan keswadayaan masyarakat.
- c) *The Empowerment Approach*. Pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat.

Pada dasarnya pemberdayaan merupakan suatu proses dimana masyarakat khususnya yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Hal ini ditambahkan oleh Prasojo (2004, h. 68):

Terdapat empat strategi yang dapat ditawarkan dalam memberdayakan masyarakat di tingkat kelurahan/desa, yaitu: (a) memberdayakan masyarakat dengan “mensosialisasikan” peran masyarakat sebagai subyek, (b) mendayagunakan “mekanisme” penyelenggaraan pembangunan/pemberdayaan masyarakat secara lebih aspiratif/demokratis, efektif, dan efisien, (c) mobilisasi “sumber daya” manusia seperti tenaga, pikiran, dan kemampuan sesuai dengan profesionalismenya, dan (d) memaksimalkan peran pemerintah khususnya pemerintahan kelurahan dalam memfasilitasi dan mengatur guna kelancaran penyelenggaraan pembangunan/pemberdayaan masyarakat.

Menurut Suharto (2005, h.66), pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga asas atau matra pemberdayaan, yaitu:

- a) Asas Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervetion*.
- b) Asas Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi.
- c) Asas Makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

Sementara pendekatan pemberdayaan menurut Suharto (2005, h.67), dapat disingkat menjadi 5 P yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan:

- a) Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

- b) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c) Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak terlindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.
- d) Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e) Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

## C. Industri Kecil

### 1. Pengertian Industri Kecil

Menurut Undang-undang No 5 tahun 1984, industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku atau bahan setengah jadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan merancang bangun dan perekayasaan industri.

Menurut Dumairy (1996, h.227), istilah industri mempunyai dua arti, yaitu:

Pertama, industri dapat berarti himpunan perusahaan-perusahaan sejenis. Dalam konteks ini sebutan industri kosmetika, misalnya, berarti himpunan perusahaan penghasil produk-produk kosmetik; industri tekstil maksudnya himpunan pabrik atau perusahaan tekstil. Kedua, industri dapat pula merujuk ke suatu sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi.

Sementara pengertian industri dalam kamus Bahasa Indonesia berarti perusahaan atau pabrik yang menghasilkan barang-barang. Dari beberapa pengertian tentang industri diatas, dapat disimpulkan bahwa industri merupakan perusahaan atau pabrik yang di dalamnya terdapat kegiatan yang produktif yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Dan dalam pengembangan perusahaan tersebut dipengaruhi lingkungan bisnis itu sendiri.

Sementara pengertian industri kecil menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dalam Tulus Tambunan (2002, h.49), adalah unit usaha dengan jumlah pekerja paling sedikit 5 orang dan paling banyak 19 orang termasuk pengusaha. Industri kecil dapat dikatakan membuat produk untuk kelas masyarakat berpendapatan menengah keatas. Dengan tujuan yang jelas yaitu maksimalisasi profit atau keuntungan dan pendidikan pengusaha rata-rata diatas sekolah dasar.

Dalam Undang-undang No 5 tahun 1995, batasan industri kecil didefinisikan sebagai berikut:

“Industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar Rp. 1 milyar atau kurang”.

Batasan dan definisi dari industri kecil selama ini masih mengalami kekaburan, begitu juga dengan batas antara sektor produksi dan jasa. Sementara acuan dan penggolongan yang biasanya dipakai adalah menekankan pada aspek jumlah tenaga kerja dan modal. Dan dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa batasan tentang industri kecil yaitu industri yang memiliki tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang, mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta dan nilai penjualan pertahun Rp. 1 milyar atau kurang.

## **2. Klasifikasi Industri**

Klasifikasi industri disini berarti penggolongan/pengelompokan industri. Menurut Departemen Perindustrian, industri nasional Indonesia dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

- a) Industri Dasar yang meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar, dan kelompok kimia dasar. Industri mesin dan logam dasar meliputi industri mesin pertanian, elektronik, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, tembaga, alumunium dan sebagainya. Industri kimia dasar meliputi industri pengolahan kayu dan karet alam, pertisida, pupuk, semen, batu bara, silikat dan sebagainya. Ditinjau dari misinya, industri dasar mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu penjualan struktur industri, dan bersifat padat modal. Teknologi tepat guna yang digunakan adalah teknologi maju, teruji dan tidak padat karya, namun dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru secara besar seajar dengan tumbuhnya industri hilir dan kegiatan ekonomi lainnya.

- b) Industri Kecil yang meliputi antara lain industri pangan (makanan, minuman, tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi, barang dari kulit), industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, penerbitan, barang-barang karet plastik dan lain-lain), industri kerajinan umum (rotan, kayu, bambu, bahan-bahan galian bukan logam), industri logam (mesin-mesin listrik, alat-alat ilmu pengetahuan dan barang-barang dari logam dan sebagainya).
- c) Industri Hilir yaitu kelompok aneka industri yang meliputi industri yang mengolah sumber daya hutan, industri yang mengolah hasil pertambangan, industri hasil pertanian dan sebagainya (Arsyad, 2004, h.307).

Sementara menurut Philip Kristanto dalam bukunya Ekologi Industri (2002, h.156-157), secara garis besar industri di klasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

- a) Industri dasar atau hulu  
Industri dasar/hulu adalah industri yang memiliki sifat padat modal berskala besar, teknologi maju dan teruji. Lokasinya selalu dipilih dekat dengan bahan baku yang mempunyai sumber energi sendiri dan pada umumnya lokasi ini belum tersentuh pembangunan. Oleh karena itu, industri hulu memerlukan perencanaan yang matang tentang pengaturan tata ruang yang matang, perencanaan pemukiman, pengembangan kehidupan perekonomian dan juga pencegahan kerusakan lingkungan. Pembangunan industri ini dapat mengakibatkan perubahan lingkungan, baik dari aspek sosial-ekonomi dan budaya maupun pencemaran, terjadi perubahan tatanan sosial, pola konsumsi, tingkah laku, kemudian kemunduran kualitas udara, penyusutan sumber daya alam dan sebagainya.
- b) Industri hilir  
Yang dimaksud dengan industri hilir adalah industri yang merupakan perpanjangan dari industri hulu. Pada umumnya industri ini mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi, lokasinya selalu diusahakan dekat dengan pasar, menggunakan teknologi yang teruji dan padat karya.
- c) Industri kecil  
Industri kecil merupakan industri yang banyak berkembang di pedesaan dan perkotaan. Pada industri kecil masih menggunakan peralatan yang sederhana. Walaupun hakikat produksinya sama dengan industri hilir, tetapi sistem pengolahannya lebih sederhana, sistem tata letak pabrik maupun pengolahan limbah juga belum mendapat perhatian.

Tiap-tiap industri tersebut memiliki ciri-ciri khusus yaitu kelompok industri dasar mempunyai misi pertumbuhan ekonomi dan pengatur penguatan struktur dan teknologi tepat guna pada tingkat maju, teruji, dan madya, serta tenaga kerja bersifat padat karya dan tidak padat karya. Kelompok industri kecil mempunyai misi pemerataan dan masih bersifat sederhana serta tenaga kerjanya bersifat padat karya. Pengembangan industri kecil ini diharapkan dapat menambah

kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan pasar dalam dan luar negeri.

Industri juga dapat dibedakan berdasar jumlah tenaga kerja yang dikerjakan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Arsyad (2004, h.176), pengelompokan industri berdasar jumlah tenaga kerja yang dikerjakan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

- a) Industri/Perusahaan Besar jika memperkerjakan 100 orang atau lebih
- b) Industri/Perusahaan Sedang jika memperkerjakan 20-99 orang
- c) Industri/Perusahaan Kecil jika memperkerjakan 5-19 orang
- d) Kerajinan Rumah Tangga jika memperkerjakan kurang dari 3 orang (termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar)

Selain pengelompokan diatas, industri bisa juga dibedakan menjadi menjadi industri yang padat modal dan industri padat karya (Arsyad, 2004, h.306-308). Macam-macam industri berdasarkan padat modal dan padat karya yaitu:

- a) Industri padat modal, yaitu industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya.
- b) Industri padat karya, yaitu industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya.

Menurut Saleh (1986, h.51-53), di Indonesia terdapat tiga jenis Industri kecil, yaitu:

- a) Industri lokal, adalah kelompok jenis industri yang menggantungkan kelangsungan hidupnya pada pasar setempat yang terbatas, secara relatif tersebar dari segi lokasinya. Skala usahanya sangat kecil dan mencerminkan pola perusahaan yang bersifat subsistem. Target pemasaran sangat terbatas sehingga pada umumnya mempergunakan sarana transportasi yang sederhana (misalnya: sepeda, gerobak dan pikulan). Adapun karena pemasaran hasil produknya ditangani sendiri, maka jasa pedagang perantara boleh dikatakan kurang menonjol.
- b) Industri yang terkelompok atau sentra industri kecil adalah kelompok jenis industri yang dari segi satuan usaha mempunyai skala kecil, tetapi membentuk suatu pengelompokan/kawasan produksi yang terdiri dari segi kumpulan unit usaha yang menghasilkan barang sejenis. Ditinjau dari segi tempat pemasarannya kategori yang kedua ini umumnya menjangkau pasar yang lebih luas daripada ketegori yang pertama. Sehingga peranan pedagang/pengumpul menjadi cukup menonjol.
- c) Industri mandiri yaitu kelompok jenis industri yang mempunyai sifat-sifat industri kecil, namun telah berkemampuan mengadaptasi teknologi produksi yang cukup canggih. Pemasaran hasil produksi kelompok ini relatif tidak tergantung pada peranan pedagang perantara. Dimaksudkan

dengan sifat-sifat industri kecil yang masih dipunyai oleh kelompok industri ini adalah skala unit usaha yang relatif kecil atau sistem manajemen yang digunakan masih sederhana. Pada dasarnya kelompok industri mandiri ini tidak sepenuhnya dapat dinisbahkan sebagai bagian dari industri kecil, mengingat kemampuannya yang terlampaui tinggi dalam mengakomodasi berbagai aspek modernisasi. Dan sesungguhnya hanya dasar skala penyerapan tenaga kerja semata, maka kelompok ini menjadi termasuk ke dalam bagian dari sub sektor industri kecil.

Dengan adanya pengelompokan Industri kecil tersebut maka dapat mendeskripsikan dan memantau perkembangannya secara lebih spesifik. Dalam penelitian ini industri kecil yang akan dibahas adalah industri yang terkelompok atau terbagi menjadi sentra industri kecil.

### **3. Pengembangan Industri Kecil**

#### **a) Pentingnya Pengembangan Industri Kecil**

Definisi pengembangan secara mendasar dikemukakan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2006, h.556), adalah perbuatan atau cara atau usaha pengembangan atau meluaskan usaha. Kemudian Ndraha (1984, h.184), mengungkapkan bahwa istilah pengembangan dari kata "kembang" berarti meningkatkan atau menambah sesuatu yang sudah ada baik kualitatif maupun kuantitatif, jadi ada sesuatu yang bertambah.

Dari definisi pengembangan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pengembangan merupakan segala usaha atau perbuatan untuk memajukan, memperbaiki secara teratur dan bertahap serta meningkatkan sesuatu yang sudah ada dengan apa yang diharapkan.

Menurut Arsyad (2004, h.375), pengembangan industri kecil diharapkan dapat menambah kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Dengan pengembangan industri kecil ini pula maka partisipasi masyarakat dapat meluas sehingga masyarakat akan siap secara politis, sosial dan mental untuk menghadapi perubahan besar yang terjadi dalam proses industrialisasi. Langkah pokok yang perlu dilakukan untuk mengembangkan industri kecil adalah pemecahan masalah pemasaran dengan melalui pembinaan industri

kecil. Pembinaan industri kecil pada dasarnya dilakukan melalui pembinaan sentra-sentra industri kecil.

Masih banyaknya masalah yang terjadi pada industri kecil, menurut data Badan Pusat Statistik, Industri Kecil tahun 2003 mengalami masalah antara lain: modal, bahan baku, keahlian teknis, pemasaran, keahlian manajerial, dan persaingan (Arsyad, 2004, h.376). Oleh karena itu peran aktif pemerintah dan masyarakat sangat diharapkan demi perkembangan industri kecil di suatu daerah, sehingga pada gilirannya dapat menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tindak lanjut dalam kebijakan melalui bantuan modal kerja dan pembinaan yang berkesinambungan adalah yang sangat diperlukan mereka dewasa ini sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi pada masyarakat baik dari segi pengetahuan maupun materiil demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Di dalam Undang-undang No 5 tahun 1984 tentang perindustrian sesuai dengan Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pengembangan industri adalah:

- a) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam dan atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
- b) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik, sehat dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai pada khususnya;
- c) Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional;
- d) Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dlm pembangunan industri;
- e) Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri;
- f) Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamakan pemakaian hasil produksi dalam negeri guna mengurangi ketergantungan kepada pihak luar negeri;
- g) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka perwujudan wawasan nusantara;
- h) Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

Selain hal diatas tujuan dikembangkannya industri khususnya industri kecil karena hal ini berkaitan dengan mengatasi masalah ekonomi dan sosial di indonesia seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, jumlah pengangguran yang besar terutama golongan masyarakat berpendidikan rendah, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, serta masalah urbanisasi dengan segala efek negatifnya. Sehingga dengan adanya industri kecil dapat membantu pemecahan masalah-masalah global yang dialami negeri ini.

Sedangkan peran industri kecil menurut Irianto (1996, h.10), adalah sebagai berikut:

- 1) Perluasan tenaga kerja yang tiap tahun bertambah jumlahnya;
- 2) Peningkatan penghasilan masyarakat secara merata;
- 3) Industri kecil dalam meningkatkan nilai ekspor.

Dari pendapat diatas jelas sekali bahwa peran industri kecil bagi upaya peningkatan pendapatan, maka otomatis usaha untuk mencapai tingkat kemakmuran dapat dilihat dari semakin meningkatnya tingkat pendapatan dari suatu individu.

Banyaknya pemutusan hubungan kerja pada industri besar telah memperburuk permasalahan yang telah ada sebelumnya, seperti kemiskinan dan pengangguran. Seperti yang telah disampaikan oleh Irsyan Asyhari Saleh (1986, h.1), yaitu:

“harapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dari sektor industri modern akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran secara tuntas ternyata masalah ada pada rentang perjalanan yang panjang. Bertitik tolak dari kenyataan inilah maka eksistensi industri kecil telah mengambil tempat penting dalam masalah kesempatan kerja dan ketenagakerjaan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia”.

Kondisi tersebut menyadarkan bahwa pengembangan industri kecil merupakan suatu keharusan dan bukanlah hanya sebagai suatu usaha dalam rangka pemerataan pembangunan, tapi industri kecil telah menunjukkan dirinya sebagai struktur sosial yang dapat menyerap tenaga kerja dengan investasi kecil dapat berproduksi secara efektif.

Hal ini tentunya menguatkan bahwa industri kecil saat ini dinilai sebagai sektor terpenting untuk mengurangi permasalahan yang dihadapi suatu daerah, yakni pengangguran. Karena industri kecil tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, pengembangan industri kecil adalah cara yang paling besar perannya sebab tidak hanya untuk memperbesar lapangan kerja dan kesempatan kerja, tetapi juga untuk mendorong pembangunan daerah dan pedesaan di suatu wilayah. Oleh karena itu, pengembangan industri kecil sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat di daerah setempat.

### **b) Bentuk Pengembangan Industri Kecil**

Bentuk pengembangan industri kecil dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras. Menurut Syahrial Syarif (1991, h.3), bahwa bentuk-bentuk pengembangan industri kecil meliputi:

- 1) Perangkat Lunak, meliputi:
  - a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan;
  - b. Pembinaan usaha;
  - c. Bantuan promosi dagang;
  - d. Keringanan dan kemudahan yang diberikan pada pengusaha kecil dalam rangka mendorong berkembangnya usaha.
- 2) Perangkat Keras, meliputi:
  - a. Penyediaan fasilitas bersama, misalnya koperasi sentra usaha pada sentra-sentra industri kecil;
  - b. Bantuan langung pada pengusaha industri kecil seperti penyediaan tempat usaha dan bantuan permodalan.

Bentuk-bentuk pengembangan industri kecil tersebut akan lebih terasa pada masyarakat jika adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pembinaan atas iklim usaha sebagai faktor eksternal dalam berusaha juga perlu mendapatkan perhatian karena hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan industri kecil.

### **c) Strategi Pengembangan Industri Kecil**

Industri kecil memiliki strategi-strategi dalam dirinya yang dapat menciptakan keunggulan-keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan usaha lain. Menurut Hatten dalam Suseno T.W, dkk (2005, h.240), keunggulan

kompetitif (*competitive advantage*) adalah aspek dari sesuatu usaha yang dilakukan secara lebih baik dibandingkan usaha lainnya. Industri kecil memiliki faktor-faktor dalam dirinya yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan usaha lain. Faktor-faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif industri kecil adalah:

- 1) Fleksibilitas, artinya industri kecil memiliki kapasitas dan jumlah produksi yang kecil, kecilnya kapasitas menyebabkan usaha kecil mudah melakukan perubahan dengan lebih cepat untuk mengantisipasi perubahan pasar.
- 2) Inovasi, industri kecil lebih memiliki kesempatan yang besar untuk melakukan inovasi dibandingkan usaha besar yang lebih cenderung untuk mengembangkan produk yang sudah ada. Industri kecil dapat melakukan inovasi teknologi, pasar, produk dan ide baru.
- 3) Kedekatan dengan pelanggan, strategi yang dapat dilakukan oleh pemilik industri untuk pengembangan perusahaannya adalah mengetahui pelanggan usahanya pada tingkat pribadi. Kedekatan itu diperlukan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan tiap individu pelanggan.
- 4) Kualitas produk, cara lain untuk pengembangan industri kecil adalah dari kualitas yaitu karakter sebuah produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuannya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Kualitas produk yang lebih baik akan dipilih oleh konsumen dan pada akhirnya akan meningkatkan pangsa pasar atas produk tersebut. (Suseno T.W, dkk, 2005, h. 240-241)

Sedangkan menurut Hetifah Sjaifudin (1995, h.66-75), strategi lain yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan industri kecil adalah:

- 1) Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial  
Berkembangnya beberapa model penguatan finansial bagi usahawan kecil akhir-akhir ini menunjukkan telah semakin menguatnya komitmen pemerintah, upaya pemerintah tersebut terwujud dengan membantu pengembangan usaha kecil melalui “penyertaan modal sementara”.
- 2) Pengembangan Pemasaran  
Pada era pasar bebas dimana dunia menjadi tanpa batas terdapat penyatuan pasar domestik dengan pasar internasional. Hal ini merupakan peluang, tantangan dan sekaligus ancaman bagi usaha kecil. Terdapat tiga cara strategi pengembangan pemasaran, yaitu:
  - a. Meningkatkan Akses Usaha Kecil Kepada Pasar  
Caranya adalah menciptakan pola hubungan produksi subkontrak dan promosi. Pola keterkaitan subkontrak lebih diprioritaskan bagi usaha-usaha industri. Pola subkontrak ini memberi manfaat positif bagi usaha kecil karena secara ekonomis usaha-usaha kecil menjadi subkontraktor memperoleh jaminan pasar dan kontinuitas produksi. Pola ini juga memecahkan masalah kelangkaan bahan baku, kadang-kadang juga modal.

- b. Proteksi Pasar  
Bentuk proteksi dalam hal ini melalui konsumsi. Sekitar 10% dari total anggaran pemerintah digunakan untuk mengkonsumsi produk-produk buatan usaha kecil.
  - c. Menggeser Struktur Pasar Monopoli Menjadi Bersaing  
Langkah ini sangat strategis mengingat kendala utama usaha kecil untuk berkembang selama ini ialah pasar, modal bukanlah kendala utama mereka. Alternatif yang ditawarkan disini antara lain penghapusan proteksi *infant industries* (industri kecil) mendorong terciptanya iklim persaingan dalam konteks ini fungsi kontrol sangat diperlukan.
- 3) Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Diharapkan dapat terjadi melalui perbaikan sistem pendidikan formal, peningkatan keterkaitan dunia pendidikan dengan pasar kerja melalui sistem pemagangan (*link and match*) serta pemberian insentif bagi pertumbuhan pusat-pusat penelitian dan pengembangan untuk pengembangan sumber daya manusia dan teknologi.
- 4) Strategi Pengaturan dan Perijinan
- a. Pengaturan dan Perijinan  
Secara formal dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur dan memantau perkembangan usaha kecil. Ada empat jenis yang harus dipenuhi untuk mendirikan usaha kecil yaitu ijin tempat usaha (kelayakan usaha, lokasi serta dampak terhadap kesehatan dan lingkungan), ijin usaha industri, ijin perdagangan, dan tanda daftar perusahaan.
  - b. Perencanaan Tata Ruang  
Mewujudkan gagasan untuk lebih memperhatikan kepentingan usaha kecil melalui: (1) pelibatan kepentingan usaha kecil dalam perencanaan kota, (2) proses konsultasi sebagai mekanisme untuk mendapatkan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan, (3) pengakuan sungguh-sungguh terhadap peran dan fungsi usaha kecil bagi lingkungan masyarakat kota.
  - c. Fungsi Kelembagaan  
Dalam hal institusi, reorganisasi di Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Dalam Negeri serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah merupakan inisiatif untuk pengembangan usaha kecil serta terpadu dan berjangka panjang yang sejalan dengan upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Bidang pembinaan, pengawasan dan pengembangan industri kecil dilebur ke dalam struktur *vertical* (sub sektor) memberi peluang bagi swasta maupun lembaga non pemerintah lainnya untuk terlibat dalam pengembangan usaha kecil secara bersama-sama.

Dengan memperhatikan strategi-strategi yang dipaparkan diatas, maka diharapkan upaya pemerintah daerah dalam pengembangan industri kecil akan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

#### 4. Pembinaan Industri Kecil

##### a) Pengertian Pembinaan

Perkembangan industri kecil ternyata cukup menjanjikan untuk masa depan. Hal ini dapat dilihat dari peranannya yang mampu menampung tenaga kerja dan merupakan lapangan kerja non-pertanian yang bersifat padat karya. Oleh karena itu industri kecil ini perlu mendapatkan perlindungan dan perlu untuk dikembangkan melalui proses pembinaan.

Menurut A. Mangunhardjono (1986, h.12), pembinaan adalah:

“Suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang mengalaminya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalani secara efektif”.

Sedangkan pengertian pembinaan menurut Miftah Thoha (1993, h.7) adalah:

“Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini, yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pertanyaan dari suatu tujuan, dan kedua, pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu”.

Dari kedua pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu usaha untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi melalui penyempurnaan atau pembaharuan, pengaturan, dan pengawasan terhadap pertumbuhan dan kondisi yang ada sehingga tercipta sebuah kondisi yang lebih baik. Sama halnya dengan pembinaan industri kecil dan UKM, berarti dalam hal ini terdapat suatu upaya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi terhadap industri kecil dan UKM yang ada melalui pembaharuan pengaturan dan pengawasan untuk mencapai kondisi yang lebih baik lagi.

##### b) Pola Pembinaan Industri Kecil

Ruang lingkup pembinaan industri kecil dan UKM ini meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi.

Adapun pola pembinaan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1998, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi;
- 2) Penyiapan program pembinaan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
- 3) Pelaksanaan program pembinaan;
- 4) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan.

Jadi dengan adanya langkah-langkah tersebut, program pembinaan industri kecil dapat berjalan secara berkesinambungan. Hal ini dikarenakan ada upaya identifikasi mengenai potensi dan permasalahan hingga yang terakhir yaitu pemantauan dan pengendalian dari upaya pembinaan tersebut. Sehingga bila ada kemungkinan kegagalan dalam upaya pembinaan tersebut dapat segera diatasi dengan upaya yang lebih tepat.

### c) Tujuan Pembinaan Industri Kecil

Tujuan pembinaan menurut Miftah Thoha (1993, h.25-26), antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan;
- 2) Untuk meningkatkan kesadaran berkonfrontasi dengan masalah-masalah, baik internal maupun eksternal;
- 3) Meningkatkan suatu lingkungan kewenangan atau dasar pengetahuan dan ketrampilan;
- 4) Untuk meningkatkan derajat keterbukaan dalam berkomunikasi;
- 5) Meningkatkan semangat dan kepuasan;
- 6) Untuk mendapatkan pemecahan yang sinergitik terhadap masalah yang mempunyai frekuensi besar;
- 7) Untuk meningkatkan tingkat pertanggungjawaban pribadi dan kelompok baik dalam pemecahan masalah maupun dalam pelaksanaannya.

Pada dasarnya hakekat pembinaan adalah terwujudnya suatu hal yang positif dari serangkaian sistem dan prosedur yang memuat program-program pembaharuan secara menyeluruh dan terencana, baik oleh individu, instansi yang bersangkutan dimana individu tersebut bekerja. Hal ini dapat berpengaruh terhadap perilaku individu yang dibina dan selanjutnya akan dapat bekerja lebih baik serta mencapai tujuan-tujuan dalam bekerja. Maka dari itu tujuan pembinaan industri kecil dan UKM diarahkan pada upaya untuk

mewujudkan pengusaha industri yang memiliki ketangguhan usaha dari segi efisiensi, tingkat kesehatan usaha dan kemandirian, serta mampu menjadi pilar kekuatan ekonomi rakyat guna mencapai pembangunan nasional.

## 5. Keunggulan dan Kelemahan Industri Kecil

Menurut Broom dan Longenecker dalam Irianto (1996, h.25), ada tiga kekuatan yang dimiliki industri kecil khususnya dalam menghadapi kompetisi dengan perusahaan lain, yakni:

- a) *Knowledge of customers and markets* (Informasi dari pelanggan dan pasar).
- b) *Product and geographic specialization* (Spesialisasi hasil produksi dan posisi geografis).
- c) *Flexibility in management* (management yang fleksibel).

Senada dengan hal tersebut, Scarborough dalam Irianto (1996, h.26), menyatakan beberapa faktor utama sebagai pendukung kesuksesan dan keuntungan usaha kecil seperti berikut ini:

- a) *Greater flexibility* (Lebih fleksibel).
- b) *More personal attention to customers and employees* (Perhatian yang lebih bersifat pribadi kepada pelanggan dan pegawai).
- c) *Lower fixed cost* (Biaya yang rendah).
- d) *Greater entrepreneurial and innovative fervor* (Lebih mempunyai semangat berwirausaha dan berinovasi).
- e) *Greater motivation of the owners* (Motivasi yang lebih dari pemilik).

Struktur perusahaan besar telah terbirokratisasi sedemikian rupa sehingga cenderung menjauhkan dan mengisolasi manajemen mereka dengan para pelanggan dan pasar. Informasi penting sering dapat diperoleh dari pelanggan dan pasar, hal ini sebagai sumber utama untuk variasi produk dan pelayanan. Struktur perusahaan kecil yang nyaris tidak terbirokratisasi memungkinkan secara cepat menangkap informasi ini karena posisinya tidak jauh dengan pelanggan pasar.

Hasil produksi serta posisi geografis industri kecil merupakan kekuatan manajemennya. Produk dihasilkan sesuai dengan permintaan dan dengan mudah dapat dijangkau oleh pelanggannya. Situasi ini menyebabkan mekanisme produksi pemasaran menjadi efisien dan tidak memerlukan biaya yang tinggi.

Sedangkan dibalik kekuatan atau keuntungan industri kecil juga mempunyai sejumlah kelemahan yang melekat pada ciri pengusaha kecil yang menurut Scarborough dalam Irianto (1996, h.27), seperti berikut:

- a) *Poor management* (Manajemen yang buruk).
- b) *Inadequate financing* (Kekurangan dalam pembiayaan).

Sedangkan menurut Broom dan Longenecker dalam Irianto (1996,h.27), mengemukakan adanya masalah khas yang selalu dapat ditemui dalam manajemen industri kecil yang sekaligus merupakan faktor penyebab kegagalan yakni:

- a) *Lack of management skills and depth* (Kurangnya keahlian dan kedalaman pengetahuan tentang manajemen),
- b) *Personal lack and misuse of time* (Penyalahgunaan waktu untuk kepentingan pribadi),
- c) *Financing* (Pembiayaan).

Sayangnya banyak manajemen organisasi yang fleksibel tidak didukung kedalaman pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan manajerial yang memadai. Kelemahan ini merupakan batu sandungan yang sangat besar saat pengusaha industri kecil ini harus mengembangkan dirinya. Ketidakhandalan dalam manajemen sama saja artinya pengusaha tidak dapat mengelola perusahaan dengan optimal sehingga kelangsungan di masa depan sangat dikhawatirkan.

Selain itu pengusaha sering kali tampak dalam tindakannya cenderung boros atau tidak efisien menggunakan waktu. Sementara tindakan-tindakan yang berorientasi pada kreativitas, inovasi, riset, dan sejenisnya nyaris tidak pernah mendapat alokasi waktu. Faktor ini merupakan hambatan besar bagi pengembangan industri kecil.

## 6. Permasalahan Yang Dihadapi Industri Kecil

Keberadaan industri kecil banyak menghadapi kendala yang membutuhkan perhatian untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Permasalahan industri kecil menurut Juwaini (1996, h.15), antara lain yaitu:

1. Kelemahan dalam mempunyai peluang (akses) pasar dan memperbesar pangsa pasar;
2. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur (akses) terhadap sumber-sumber permodalan;

3. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen;
4. Keterbatasan dalam pemanfaatan dan penguasaan teknologi;
5. Keterbatasan dalam jaringan usaha dan kerjasama usahanya;
6. Kelemahan dalam mentalitas usaha;

Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Hardjanto (2006, h.42), kendala/tantangan yang sering dihadapi oleh kebanyakan industri kecil adalah sebagai berikut:

1. Kelemahan Struktural, yaitu kelemahan dalam struktur perusahaan semisal kelemahan manajemen, pengendalian mutu, penguasaan teknologi, permodalan dan terbatasnya akses pasar;
2. Kelemahan Kultural, yaitu merupakan kelemahan yang menyebabkan kelemahan-kelemahan kultural seperti: informasi peluang, informasi mendapatkan bahan baku, informasi pengembangan produk, dll.

Dengan adanya upaya pemberdayaan melalui pengembangan dan pembinaan seperti yang diungkapkan tersebut diatas, diharapkan permasalahan yang dialami kebanyakan industri khususnya industri kecil dapat diatasi dengan baik sehingga industri kecil dapat tumbuh dan bisa berperan aktif dalam perekonomian nasional.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah bertujuan untuk menggambarkan/mendeskripsikan, memaparkan berbagai fenomena sosial yang terjadi pada obyek penelitian secara sistematis, faktual untuk dianalisis dengan cermat dan mendalam. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah menggunakan data-data non statistik dan terbatas pada usaha-usaha yang mengungkapkan permasalahan sebenarnya.

Sebagai landasan teori dalam memahami pendekatan kualitatif, berdasarkan pendapat Kirk dan Miller sebagaimana dikutip oleh Moleong (2008, h.4), bahwa “pendekatan kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini hanya akan menggambarkan dan menganalisa fenomena-fenomena dan fakta-fakta”.

Penelitian ini akan menggambarkan tentang bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam rangka memberdayakan Industri Kecil Keramik Dinoyo. Hal itu menyangkut pula faktor-faktor lain yang mendukung maupun menghambat proses pemberdayaan itu sendiri.

#### B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal-hal yang akan dijadikan sebagai pusat penelitian dalam penelitian ini dan untuk memudahkan dalam menentukan data yang akan diperlukan untuk suatu penelitian.

Adapun fokus dari penelitian ini yaitu:

1. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam rangka memberdayakan Industri Kecil Keramik Dinoyo. Upaya tersebut meliputi:
  - a) Pengembangan Sumber Daya Manusia, meliputi:

- 1) Diklat (Pendidikan dan Pelatihan)
  - 2) Studi Banding
  - 3) Pembinaan Manajerial
  - b) Pengembangan Teknologi Produksi
  - c) Promosi Pemasaran
  - d) Pembinaan Permodalan
  - e) Pengadaan Bahan Baku
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Yang meliputi:
- a) Faktor pendukung, meliputi:
    - 1) Lokasi Industri yang Strategis
    - 2) Kualitas Produk yang Sudah Dikenal Masyarakat
  - b) Faktor Penghambat, meliputi:
    - 1) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
    - 2) Kurangnya Faktor Modal
    - 3) Kurangnya Sarana dan Prasarana Pemasaran

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Yang dimaksud dengan lokasi penelitian ini adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian terhadap obyek yang akan di teliti, maka lokasi penelitian ini berada di Kota Malang. Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena menurut pandangan peneliti, sebagai kota besar kedua di Jawa Timur, Kota Malang tentunya memiliki potensi yang cukup besar bagi perkembangan industri khususnya industri kecil, dalam hal ini industri kecil keramik Dinoyo yang dipandang sebagai salah satu produk unggulan Kota Malang. Industri kecil di Kota Malang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia bahkan oleh turis mancanegara yang berkunjung ke Malang. Daerah pemasarannya pun sudah cukup luas, dan sudah merambah pasar nasional bahkan internasional, seperti Cina dan Amerika Serikat. Dengan demikian kelestarian dan perkembangannya akan sangat menjanjikan dalam memberikan sumbangan yang besar bagi total nilai tambah IKM sekaligus penyumbang lapangan pekerjaan.

Sehingga sangat disayangkan bila keberadaan industri kecil keramik Dinoyo ini harus menyusut, bahkan sampai gulung tikar.

Sedangkan Pengertian dari situs itu sendiri adalah menunjukkan di mana sebenarnya peneliti dapat menangkap keadaan dari obyek yang akan diteliti, sehingga keakuratan data yang diperlukan dapat diperoleh. Maka situs penelitian ini adalah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang terletak di Jl. Mayjend Sungkono, Malang dan pengusaha industri kecil keramik Kelurahan Dinoyo.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data merupakan asal dari manakah data tersebut diperoleh atau didapatkan. Keberadaan data adalah untuk dapat disajikan sebagai sumber informasi yang disajikan sebagai pokok kajian atau sebagai bahan pokok untuk dapat mengetahui yang diteliti. Sumber data utama menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Moleong (2008, h.157) dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dengan demikian sumber data tersebut dapat berupa informan dan didukung dengan dokumen yang berupa data tertulis. Data kualitatif tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian maupun permasalahan yang ada yang berupa kata-kata lisan atau wawancara, dalam hal ini meliputi pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang bersangkutan dengan permasalahan, serta para pengrajin keramik pada Industri Kecil Keramik Dinoyo.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek yang diteliti. Yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data tersebut bisa berupa data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen dan arsip-arsip di lapangan yang relevan dengan masalah dan fokus sehingga dapat dipakai

sebagai pendukung dalam penelitian ini, seperti yang berhubungan dengan pemberdayaan industri kecil. Dalam hal ini data yang diperoleh antara lain:

- a) Renstra dan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tahun 2009 - 2013.
- b) Data Mengenai Pemberdayaan Industri Kecil Keramik Dinoyo.
- c) Data Kota Malang Dalam Angka tahun 2007.
- d) Data Monografi Kelurahan Dinoyo tahun 2009.
- e) Daftar Sentra Industri Kecil Menengah Kota Malang.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### **1. Observasi (pengamatan langsung di lapangan)**

Metode pengamatan (observasi) yang digunakan dalam penelitian ini adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatan secara langsung di lapangan ini berlangsung di industri kecil keramik Dinoyo, dimana disitu merupakan tempat dilaksanakan program pemberdayaan yang dilakukan Disperindag Kota Malang. Disitu peneliti mengamati apa yang terjadi dan kemudian mengkaji data yang diperoleh melalui informan serta realitas yang terjadi di lapangan.

##### **2. Wawancara secara mendalam (*depth interview*)**

Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang terbuka dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan secara semi terstruktur guna menggali pandangan subyek yang diteliti. Wawancara mendalam ini dapat dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap tepat guna mendapatkan data yang rinci, sejujurnya dan mendalam, dan dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang dijelajahi.

##### **3. Dokumentasi**

Penggunaan dokumen ditujukan untuk menunjang data hasil wawancara dan observasi, untuk kemudian dibandingkan dengan kenyataan di lapangan.

Dokumentasi ini berupa foto-foto hasil kegiatan, dokumen berupa buku pedoman pelaksanaan kegiatan, dimaksudkan untuk melengkapi teknik wawancara dan observasi, yang ketiganya nanti saling melengkapi satu sama lain dalam artian data yang diperoleh melalui wawancara dilengkapi dengan data observasi serta hasil dokumentasi. Dalam hal ini yang dapat diwawancarai oleh peneliti, sebagai berikut:

- a) Bapak Drs. Syahsin Ruba'i selaku Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
- b) Bapak Laurensius Poerba, BE selaku Staf Subdin Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
- c) Bapak Budi Sulisty, SH selaku Staf Subdin Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.
- d) Bapak Syamsul Arifin selaku ketua paguyuban keramik Dinoyo sekaligus pengrajin keramik Dinoyo.
- e) Bapak Soeharto selaku pengrajin keramik Dinoyo.
- f) Bapak Siono selaku pengrajin keramik Dinoyo.
- g) Ibu Sri Handayani selaku pengrajin keramik Dinoyo.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Moleong (2008, h.163) menjelaskan bahwa peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Jadi dalam hal ini peneliti sendiri adalah merupakan instrumen penelitian, yaitu dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan topik penelitian. Selain itu, digunakan juga :

- a) Pedoman wawancara (*interview guide*), merupakan suatu daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada informan.
- b) Perangkat penunjang lain yang merupakan buku catatan dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat data yang diperoleh dilokasi penelitian.
- c) Koneksi Internet yaitu peneliti mendapat berbagai macam informasi mengenai pemberdayaan baik berupa jurnal, hasil penelitian dan yang paling penting adalah informasi mengenai upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam rangka pemberdayaan Industri Kecil Keramik Dinoyo melalui situs resmi Pemerintah Kota Malang.

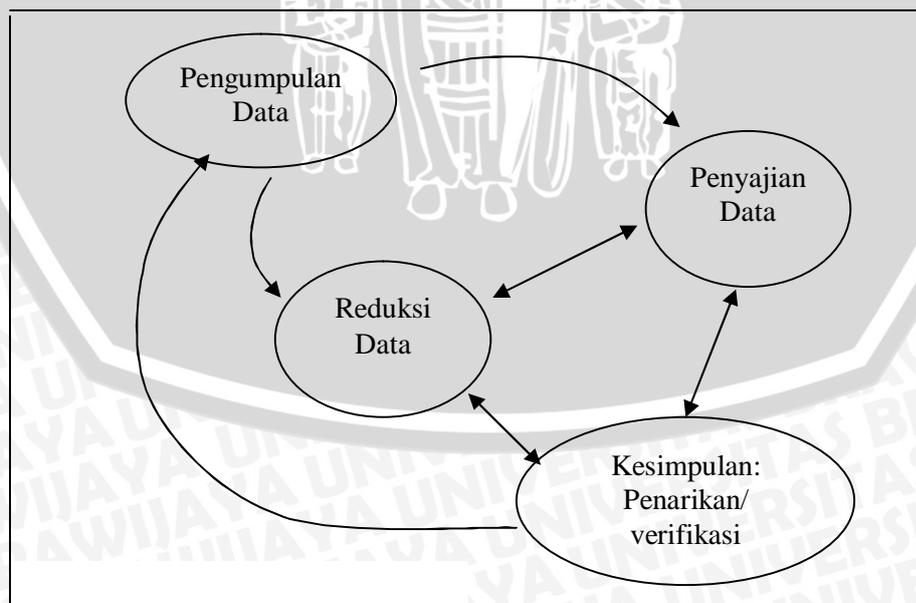
### G. Analisa Data

Setelah data dilapangan terkumpul, maka peneliti mengolah data dengan menggunakan teknik yang sesuai untuk mendapatkan pemecahan masalah yang diteliti sehingga tujuan penelitian dapat tercapai, yaitu tentang bagaimana upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam memberdayakan Industri Kecil Keramik Dinoyo. Hal itu menyangkut pula faktor-faktor lain yang mendukung maupun menghambat proses pemberdayaan itu sendiri.

Miles dan Huberman mempergunakan paparan data untuk menganalisis penelitian kualitatif. Mereka menyebut penyajian data (*data display*) sebagai seperangkat data dan informasi terorganisasi yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan menentukan tindakan. Hal ini dianalogikan sebagai “anda adalah apa yang anda makan” sehingga dengan kata lain “anda mengetahui apa yang anda sajikan” (Miles dan Huberman, 1992, h.77).

Analisa data dalam penelitian ini nantinya menggunakan analisis model interaktif. Model ini bergerak pada tiga komponen yaitu: reduksi data, sajian data dan kesimpulan, kemudian dianalisa dalam bentuk interaktif pada ketiga komponen tersebut. Sistem kerja teknik analisa model interaktif ini sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini:

**Gambar 2**  
**Analisis Model Interaktif**



Sumber : Miles dan Huberman, (1992)

### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal – hal yang pokok, difokuskan pada hal – hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus – menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung diadakan tahap reduksi data selanjutnya dengan jalan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus – gugus dan menulis catatan.

### 2. Penyajian Data

Penyajian/display data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan/bagian-bagian tertentu dari penelitian. Selain itu display data juga berfungsi sebagai daftar yang bisa secara cepat menunjukkan cakupan data yang telah dikumpulkan.

### 3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi dilakukan secara terus–menerus sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal – hal yang timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih tentative, tetapi dengan bertambahnya data akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “grounded”.

## H. Keabsahan Data

Agar hasil penelitian ini benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan pengecekan keabsahan temuan atau keabsahan data. Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penelitian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan, yang disebut keabsahan data. Moleong (2008, h.326-338), mengemukakan bahwa kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, sedangkan penelitian ini memakan waktu kurang lebih satu bulan.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci, dalam hal ini peneliti melakukan pemeriksaan data lebih intensif lagi.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2008, h.330). Dengan triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,
- b. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data,
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

4. Pengecekan Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Dengan teknik ini berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti bisa *me-review* persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan.

5. Kecukupan Referensial

Teknik ini diguna untuk mendukung dan menganalisis dari temuan-temuan atau permasalahan yang dihadapi, sehingga kecukupan referensi akan mempermudah dalam melakukan pengecekan hasil penelitian.

#### 6. Uraian Rinci

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian digambarkan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### a) Gambaran Umum Kota Malang

Gambar 3

Peta Lokasi Kota Malang



Sumber: [www.pemkot-malang.go.id](http://www.pemkot-malang.go.id)

##### 1) Kondisi Fisik Dasar Kota Malang

###### a. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Malang berada pada posisi  $112.06^{\circ}$  -  $112.07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7.06$  -  $8.02^{\circ}$  Lintang Selatan serta mempunyai ketinggian 440-667 meter di atas permukaan laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi di Kota Malang adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah timur Kota Malang. Dari atas Pegunungan Buring, hamparan Kota Malang yang indah dengan pemandangannya yang dikelilingi oleh gunung-gunung terlihat dengan jelas.

###### b. Kondisi Fisiografis

Berdasarkan kondisi fisiografis Jawa Timur, Kota Malang termasuk dalam Zona Pegunungan Selatan yang terdiri dari dataran tinggi yang dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan. Beberapa puncak pegunungan tersebut adalah Gunung Anjasmoro (2,277 m) dan Gunung Arjuno (3,399 m) di bagian utara, Pegunungan Kapur (650 m) di bagian selatan, Gunung Kawi

(2,625 m) dan Gunung Kelud (1,731 m) di bagian barat, serta Gunung Bromo (2,392 m) dan Gunung Semeru (3,676 m) di bagian timur.

Lereng-lereng pegunungan tersebut umumnya membentuk perbukitan yang makin melandai mendekati Kota Malang. Sedangkan lembah-lembah yang terbentuk diantara pegunungan tersebut umumnya sempit, cukup dalam dengan tebing curam hingga terjal dan berbentuk "V". Pada dasar lembah-lembahnya terdapat alur-alur sungai yang merupakan anak-anak Sungai Brantas yang melintasi Kota Malang dan membujur dari Arah Barat-Utara menuju ke Arah Selatan kota. Sungai-sungai yang mengalir Kota Malang adalah Sungai Brantas, Sungai Bango, Sungai Metro, dan Sungai Amprong.

### **c. Kondisi Klimatologis**

Kota Malang beriklim Tropis dengan suhu rata-rata bulanan pada tahun 2007 tercatat antara 22,9 °C sampai 24,1°C, dimana suhu maksimumnya mencapai 31,8 °C dan suhu minimumnya mencapai 19,0 °C. Rata-rata kelembaban udara Kota Malang berkisar pada 79% - 85% dengan kelembaban maksimumnya adalah 99% dan kelembaban minimumnya mencapai 37%. Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Dari hasil pengamatan Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso, musim kemarau dimulai pada Bulan Juni-Nopember dan musim hujan dimulai pada Bulan Nopember-Mei, dimana curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada Bulan Februari, Maret, dan April. Sedangkan curah hujan relatif rendah terjadi pada Bulan Juni dan September dengan rata-rata curah hujan sebanyak 1493 mm/tahun. Kecepatan angin maksimum di Kota Malang terjadi pada Bulan Agustus, September, dan Juni.

### **d. Kondisi Administratif**

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Terletak 90 km di sebelah selatan Kota Surabaya dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Luas wilayah Kota Malang adalah 110,06

km<sup>2</sup> atau 11.005,66 hektar. Dalam Sistem Keruangan Wilayah Jawa Timur, Kota Malang terletak di bagian sentral atau di tengah-tengah Wilayah Administrasi Kabupaten Malang, dengan wilayah batas administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.
2. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
3. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
4. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Dalam ketetapannya tentang pembagian wilayah, Kota Malang secara administratif terbagi menjadi 5 kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Klojen;
2. Kecamatan Blimbing;
3. Kecamatan Sukun;
4. Kecamatan Lowokwaru; dan
5. Kecamatan Kedungkandang.

Dari kelima kecamatan tersebut, saat ini wilayah Kota Malang masih terbagi lagi kedalam 57 kelurahan. Mengenai luas wilayah Kota Malang pada masing-masing kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Luas Kecamatan (km<sup>2</sup>) dan Persentase Terhadap Luas Kota**  
**Tahun 2007**

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (km <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap Luas Kota
1.	Kedungkandang	39.89	36.24
2.	Sukun	20.97	19.05
3.	Klojen	8.83	8.02
4.	Blimbing	17.77	16.15
5	Lowokwaru	22.60	20.53
	Jumlah	110.06	100.00

Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2007

Sedangkan rincian ke 57 kelurahannya pada masing-masing kecamatan yang ada di Kota Malang dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3**  
**Nama-nama Kelurahan Menurut Kecamatan Tahun 2007**

No.	Kecamatan	Kelurahan	
1.	Kedungkandang	1. Arjowinangun 2. Tlogowaru 3. Wonokoyo 4. Bumiayu 5. Buring 6. Mergosono	7. Kotalama 8. Kedungkandang 9. Sawojajar 10. Madyopuro 11. Lesanpuro 12. Cemorokandang
2.	Sukun	1. Kebonsari 2. Gadang 3. Ciptomulyo 4. Sukun 5. Bandungrejosari 6. Bakalan Krajan	7. Mulyorejo 8. Bandulan 9. Tanjungrejo 10. Pisangcandi 11. Karangbesuki
3.	Klojen	1. Kasin 2. Sukoharjo 3. Kidul Dalem 4. Kauman 5. Bareng 6. Gading Kasri	7. Oro Oro Dowo 8. Klojen 9. Rampal Celaket 10. Samaan 11. Penanggungan
4.	Blimbing	1. Jodipan 2. Polehan 3. Kesatrian 4. Bunulrejo 5. Purwantoro 6. Pandanwangi	7. Blimbing 8. Purwodadi 9. Polowijen 10. Arjosari 11. Balarjosari
5.	Lowokwaru	1. Merjosari 2. Dinoyo 3. Sumbersari 4. Ketawanggede 5. Jatimulyo 6. Lowokwaru	7. Tulusrejo 8. Mojolangu 9. Tunjungsekar 10. Tasikmadu 11. Tunggulwulung 12. Tlogomas

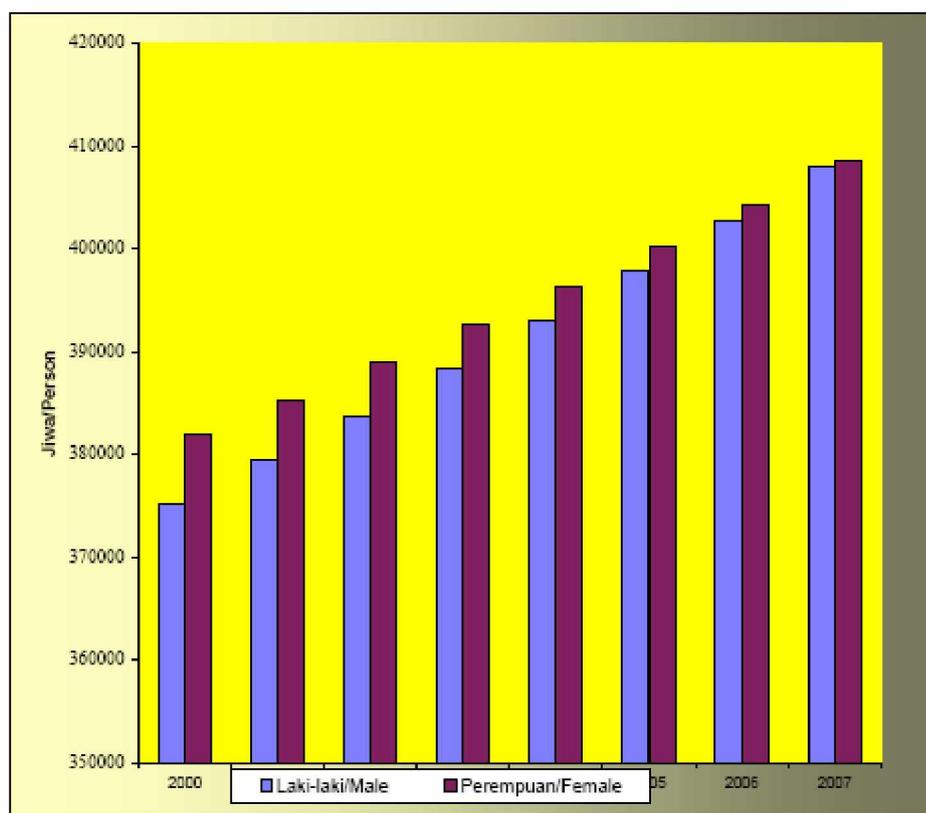
Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2007

#### e. Kondisi Kependudukan

Data tentang kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan subyek sekaligus sebagai obyek dari pembangunan itu sendiri. Data penduduk Kota

Malang dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu melalui Sensus Penduduk, Registrasi Penduduk, dan Survei-survei Kependudukan. Menurut hasil Proyeksi Penduduk pada tahun 2007, penduduk Kota Malang sebanyak 816.444 jiwa yang terdiri dari 407.959 jiwa penduduk laki-laki dan 408.485 jiwa penduduk perempuan. Perkembangan proyeksi Penduduk Kota Malang mulai tahun 2000 hingga tahun 2007 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 4**  
**Penduduk Kota Malang Tahun 2000-2007**



*Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2007*

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000, terlihat bahwa pada periode 1990-2000 rata-rata laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya adalah 0,86%. Bila dilihat dari penyebarannya, maka diantara lima kecamatan yang ada di Kota Malang tersebut, Kecamatan Lowokwaru memiliki penduduk terbanyak yaitu sebesar 194.331 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Kedungkandang yaitu sebesar 182.534 jiwa, Kecamatan Sukun yaitu sebesar 170.201 jiwa, Kecamatan Blimbing yaitu sebesar 167.555 jiwa, dan Kecamatan Klojen yaitu 101.823 jiwa. Wilayah dengan kepadatan penduduk

tertinggi di Kota Malang adalah wilayah Kecamatan Klojen yang mencapai 11.531 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah adalah wilayah Kecamatan Kedungkandang yaitu sebesar 4.576 jiwa/km<sup>2</sup>. Berikut ini adalah tabel mengenai laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk Kota Malang hasil Sensus Penduduk 2000:

**Tabel 4**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk**  
**Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (per tahun)	Kepadatan Penduduk (per km <sup>2</sup> ) tahun 2000
			Sensus Penduduk 1990	Sensus Penduduk 2000		
1	Kedungkandang	39.89	114,879	150,262	2.72	3,767
2	S u k u n	20.97	151,573	162,094	0.67	7,730
3	Klojen	8.83	143,195	117,500	-1.96	13,307
4	Blimbing	17.77	146,920	158,556	0.76	8,923
5	Lowokwaru	22.60	138,522	168,570	1.98	7,459
	Jumlah	110.06	695,089	756,982	0.86	6,878

Catatan: Berdasarkan Sensus Penduduk 1990 dan 2000

Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2007

#### f. Kondisi Struktur Ruang Kota

Struktur fungsional Kota Malang sangat erat hubungannya dengan fungsi dan kota sesuai dengan potensi dan perkembangan wilayah kota. Kegiatan fungsional kota yang diarahkan di Kota Malang adalah industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, perkantoran, pendidikan, kesehatan, peribadatan, militer, dan olahraga. Struktur pelayanan Kota Malang direncanakan sesuai dengan penempatan kegiatan fungsionalnya dengan menetapkan pusat kota dan bagian wilayah kota sebagai berikut:

1. Pusat Kota berada disekitar alun-alun,
2. Bagian Wilayah Kota (BWK) Malang Tengah, meliputi wilayah Kecamatan Klojen yang terbagi atas 3 (tiga) Sub-BWK. BWK Malang Tengah diarahkan sebagai pusat pelayanan BWK Malang Tengah sekaligus pusat pelayanan Kota Malang, terutama berada di Kelurahan Sukoharjo, Kiduldalem, Kauman dan sekitarnya,

3. Bagian Wilayah Kota (BWK) Malang Tenggara, meliputi wilayah Kecamatan Kedungkandang, dibagi menjadi 4 (empat) Sub-BWK, dimana pusat BWK diarahkan di Kelurahan Buring,
4. Bagian Wilayah Kota (BWK) Malang Timur Laut, meliputi wilayah Kecamatan Blimbing, dibagi menjadi 7 (tujuh) Sub-BWK, dimana pusat BWK diarahkan di Kelurahan Blimbing,
5. Bagian Wilayah Kota (BWK) Malang Barat Daya, meliputi wilayah Kecamatan Sukun, dibagi menjadi 3 (tiga) Sub-BWK, dimana pusat BWK diarahkan di Desa Mulyorejo,
6. Bagian Wilayah Kota (BWK) Malang Barat Laut, meliputi wilayah Kecamatan Lowokwaru, dibagi menjadi 2 (dua) Sub-BWK, dimana pusat BWK diarahkan di Kelurahan Dinoyo.

## 2) Sejarah Kota Malang

Nama "Malang" berasal dari Candi Malang Kucecwara, sebuah candi yang terletak di kaki Gunung Buring, di timur kota Malang. Candi tersebut dibangun pada abad ke-15.

Seperti halnya kebanyakan kota-kota lain di Indonesia pada umumnya, Kota Malang tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Hindia Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif masih berbekas hingga sekarang, Misalnya *Ijen Boulevard* dan kawasan sekitarnya. Pada mulanya hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim di sana untuk bernostalgia.

Pada tahun 1879, di kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakat pun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah

yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawanya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan.

Dalam perkembangannya, Kota Malang telah dipimpin oleh walikota-walikota sebagai berikut:

a. Masa Penjajahan Hindia Belanda:

1. 1919-1929: H.I. Bussemaker
2. 1929-1933: Ir. E.A. Voorneman
3. 1933-1936: Ir. P.K.W. Lakeman
4. 1936-1942: J.H. Boerstra

b. Masa Penjajahan Jepang:

1. 1942-1942: Raden Adipati Ario Sam
2. 1942-1945: Mr. Soewarso Tirtowidjojo

c. Masa Kemerdekaan:

1. 1945-1958: M. Sardjono Wiryohardjono
2. 1958-1966: Koesno Soeroatmodjo
3. 1966-1968: Kol. M. Ng Soedarto
4. 1968-1973: Kol. R. Indra Soedarmadji
5. 1973-1983: Brigjen TNI-AD Soegiyono
6. 1983-1983: Drs. Soeprapto
7. 1983-1988: dr. H. Tom Uripan Nitihardjo
8. 1988-1998: H. M Soesanto

9. 1998-2003: Kol. H. Suyitno
10. 2003-2008: Drs. Peni Suparto
11. 2008-sekarang: Drs. Peni Suparto

Sumber: [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

### 3) Visi dan Misi Kota Malang

Gambar 5

Lambang Kota Malang



Sumber: [www.pemkot-malang.go.id](http://www.pemkot-malang.go.id)

Lambang Kota Malang diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Lambang berbentuk persegi bersudut lima membawakan bentuk “GUNUNG” dalam pewayangan berbingkai merah putih,
- b. Bintang bersudut lima sama dengan bintang pada perisai, dalam lambang Negara Republik Indonesia bermakna Ketuhanan Yang Maha Esa,
- c. Tugu adalah tugu yang terletak di Alun-alun di depan Balai Kota, yang berisikan:
  1. Lima lingga menjulang ke atas membawakan lima sila dari Pancasila;
  2. Bambu runcing di tengah-tengah lingga tersebut melambangkan kekuatan dan kesatuan, keperintisan, dan kepahlawanan 1945;
  3. Tiga lingga yang nampak di depan membawakan arah tujuan perkembangan Kota Malang menjadi kota pendidikan, industri, dan pariwisata.

d. Arti warna:

1. Merah putih, lambang kemerdekaan Republik Indonesia, dimana merah adalah lambang keberanian dan putih lambang kesucian dan kebersihan;
2. Kuning, lambang keluhuran dan kebesaran;
3. Hijau, lambang kesuburan, kemakmuran, harapan, kelangsungan dan kelanggengan;
4. Biru muda, lambang kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanah air dan bangsa.

e. Semboyan “MALANG KUCECWARA”, walaupun pendek dan padat namun mengandung makna yang ekspresif, yang berarti “Tuhan Yang Maha Esa menghancurkan yang bathil, menegakkan yang benar”.

a) Visi Kota Malang

Dalam rangka melaksanakan pembangunan jangka panjang, Kota Malang menyikapi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Kota Malang, serta faktor-faktor strategis yang ada. Maka Visi Pembangunan Kota Malang 20 tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang tahun 2005-2025 adalah:

“Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berbudaya, Berwawasan Lingkungan menuju Masyarakat Sejahtera”

1. Kota Pendidikan yang Berkualitas, mengandung makna bahwa pembangunan Kota Malang ditekankan pada pengembangan bidang pendidikan dalam arti yang sangat luas, selain bidang lainnya.
2. Berbudaya, artinya bahwa pelaksanaan fungsi pemerintahan Kota Malang dalam mencapai visi harus tetap mengedepankan nilai-nilai Ke-Tuhanan, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat Kota Malang (kearifan lokal) melalui pengembangan pendidikan untuk mengantisipasi perkembangan Kota Malang menuju kota metropolitan.

3. Berwawasan Lingkungan, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan tetap berupaya untuk menjaga kelestarian alam dan kualitas lingkungan serta pemukiman Kota Malang.
4. Sejahtera, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Malang kesemuanya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kota, baik secara materiil maupun spirituil.

b) Misi Kota Malang

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Malang, sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang tahun 2005-2025, maka penyelenggaraan Pemerintahan Kota Malang juga mengemban misi-misi pembangunan untuk 20 tahun ke depan. Misi-misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang berorientasi global dengan kearifan lokal.
2. Mewujudkan SDM yang berkualitas dengan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbudaya.
3. Mewujudkan lingkungan kota yang kondusif sebagai kota pendidikan yang berkualitas.
4. Mengembangkan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan tata pemerintahan dan aparatur yang profesional.
6. Mewujudkan Kota Malang yang agamis, bermoral, beretika, beradab, berbudaya, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang efisien, produktif, dan berkelanjutan.
8. Mewujudkan Kota Malang yang sejahtera.

**b) Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang****1) Sejarah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang terletak di Gedung Perkantoran Terpadu (gedung A lantai 3), Jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Dinas ini dulunya terletak di Jalan A. Yani No. 98, Kota Malang. Kemudian pada pertengahan tahun 2009, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang kemudian pindah ke Jalan Mayjend Sungkono, Kota Malang tersebut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang ini saat ini dipimpin oleh Drs. H. Sugiantoro, M.Si.

**2) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), penentuan struktur organisasi patut mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara pimpinan dan bawahan. Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan antara pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari fungsi yang dapat menghubungkan dan menetapkan antar pegawai dalam suatu sistem kerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Struktur organisasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang diatur dalam Peraturan Walikota Malang No. 56 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dapat dijelaskan sebagai berikut dibawah ini:

**Gambar 6**  
**Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan**  
**Kota Malang**



*Sumber: Bagian TU, Disperindag Kota Malang 2009*

Pada gambar struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tersebut tampak seperti tipe organisasi matrik, yaitu struktur organisasi yang memiliki dua jalur kewenangan vertikal dan horisontal dimana memiliki kewenangan tanggung jawab yang masing-masing sesuai dengan bidang kerjanya, hubungan antar seksi juga memiliki keterkaitan dan kerjasama serta tanggung jawab untuk melaksanakan perintah pimpinan.

Berikut ini akan diuraikan tentang susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, yaitu sebagai berikut:

a. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas, terdiri dari:
  - a) Subbagian Keuangan;
  - b) Subbagian Umum;
  - c) Subbagian Penyusunan Program
3. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
  - a) Seksi Industri dan Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
  - b) Seksi Industri Kimia dan Agro Hasil Hutan;
  - c) Seksi Pengembangan Industri;
4. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
  - a) Seksi Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri;
  - b) Seksi Distribusi dan Ekspor Impor;
  - c) Seksi Pendaftaran Perusahaan;
5. Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari:
  - a) Seksi Promosi;
  - b) Seksi Perlindungan Konsumen;
  - c) Seksi Kemetrologian;
6. Bidang Pengendalian, terdiri dari:
  - a) Seksi Monitoring;
  - b) Seksi Pengolahan Data;
  - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
7. Unit Pelaksanaan Teknis;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Sekretaris Dinas dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bila diuraikan lebih lanjut tentang pembagian kerja yang terdapat dalam struktur organisasi Disperindag Kota Malang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas, mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi terhadap Kewenangan Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah; mengkoordinasi dan pengawasan melekat terhadap unit-unit kerja dibawahnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- b. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas yaitu melaksanakan administrasi umum yang meliputi penyusunan perencanaan dan program kegiatan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh dua seksi, yaitu:
  1. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program, mempunyai tugas yaitu melakukan administrasi umum meliputi penyusunan program; pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan; penyampaian laporan penggunaan anggaran setiap bulannya; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data potensi perindustrian dan perdagangan; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  2. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas yaitu melakukan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan; ketatausahaan; kepegawaian; urusan rumah tangga; perlengkapan; kehumasan; dan perpustakaan serta kearsipan dinas; serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- c. Unsur Pelaksana, yaitu:
  1. Bidang Perindustrian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perindustrian meliputi penyusunan rencana program bidang pembinaan dan pengembangan usaha perindustrian

dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh dua seksi, yaitu:

- i. Seksi Industri Dasar, mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan sarana usaha, produksi, penerapan standar; pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi di bidang industri logam, mesin elektronika, alat angkut dan kerajinan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  - ii. Seksi Aneka Industri, mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan sarana usaha, produksi, penerapan standar; pengawasan mutu; pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan asosiasi dunia usaha di bidang aneka industri dan kerajinan
2. Bidang Perdagangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perdagangan meliputi penyusunan program pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan; serta pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh dua seksi, yaitu:
- i. Seksi Bina Usaha Perdagangan, mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan meliputi pelaksanaan inventarisasi usaha perdagangan; pemantauan dan pengendalian usaha kegiatan perdagangan; serta pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
  - ii. Seksi Distribusi dan Ekspor Impor, mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan kegiatan ekspor impor serta distribusi bahan kebutuhan pokok; pelaksana monitoring dan fasilitas distribusi bahan kebutuhan pokok; penyedia informasi

pasar; dan pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang promosi potensi perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah serta melaksanakan perlindungan konsumen dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Kepala Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh dua seksi, yaitu:
  - i. Seksi Promosi, mempunyai tugas melakukan promosi potensi perindustrian dan perdagangan melalui sarana berbagai media meliputi pelaksanaan inventarisasi potensi perindustrian dan perdagangan serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - ii. Seksi Perlindungan Konsumen, mempunyai tugas melakukan kegiatan perlindungan konsumen baik preventif maupun represif secara mediasi, konsiliasi dan arbitasi meliputi pengawasan terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTO) serta barang beredar dalam keadaan terbungkus (BDKT) serta jasa; pelaksanaan fasilitas kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen sesuai bidang tugas dan fungsinya.
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), mempunyai tugas melakukan tugas dan fungsi teknis tertentu serta atas dasar kebutuhan dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
5. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi dinas yang membutuhkan ketrampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.

Dibawah ini akan diuraikan tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan,
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah,
- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah perindustrian dan perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, secara keseluruhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (renstra) dan Rencana Kerja (renja) di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan asosiasi dunia usaha;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawawasan kelembagaan di industri dan perdagangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi permodalan dan pelatihan teknis manajemen di bidang industri dan perdagangan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok dan ekspor impor;
- g. Pelaksanaan promosi produk industri dan usaha perdagangan;
- h. Pelaksanaan kemetrolagian dan pengawasan penerapan standar di bidang perindustrian dan perdagangan serta perlindungan konsumen;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan industri dan perdagangan;
- j. Pelaksanaan pengumpulan, analisis dan diseminasi data serta pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan pasar dalam rangka pemberian informasi pasar dan stabilisasi harga;

- k. Pelaksanaan fasilitasi operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- l. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang industri dan perdagangan;
- m. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang industri dan perdagangan;
- n. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
- o. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- p. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- q. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- r. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- s. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perindustrian dan perdagangan;
- t. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- u. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- v. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya manusia terutama terkait kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital di dalam penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan. Terkait hal tersebut diatas, berikut ini susunan kepegawaian di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang:

**Tabel 5**  
**Data Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan**  
**Menurut Golongan Tahun 2009**

No.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH		JUMLAH
			L	P	
2 3	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
	Pembina TK I	IV/b	2	1	3
	Pembina	IV/a	-	2	2
II. 1 2 3 4	Penata TK I	III/d	3	7	10
	Penata	III/c	3	2	5
	Penata Muda TK I	III/b	3	5	8
	Penata Muda	III/a	1	2	3
III. 1 2 3 4	Pengatur Muda TK I	II/d	-	1	1
	Pengatur	II/c	-	-	-
	Pengatur Muda TK I	II/b	2	-	2
	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
IV. 1 2 3 4	Pengatur TK I	I/d	-	-	-
	Pengatur	I/c	-	-	-
	Pengatur Muda TK I	I/b	-	-	-
	Pengatur Muda	I/a	1	-	1
V	PTT	-	1	-	1
	<b>TOTAL</b>		<b>17</b>	<b>20</b>	<b>37</b>

Sumber: Bagian TU, Disperindag Kota Malang 2009

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang secara keseluruhan sebanyak 37 orang. Sebanyak 36 diantaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 1 diantaranya merupakan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Sedangkan dalam hal golongan, paling banyak adalah pegawai dengan golongan III/d dan III/b yaitu sebanyak 10 orang dan 8 orang.

**Tabel 6**  
**Data Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan**  
**Menurut Pendidikan Tahun 2009**

No.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	SD	1	-	1
2.	SLTP	1	-	1
3.	SLTA	5	3	8
4.	SARJANA MUDA/D III	1	1	2
5.	S-1	4	9	13
6.	S-2	5	7	12
	JUMLAH	17	20	37

*Sumber: Bagian TU, Disperindag Kota Malang 2009*

Dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tingkat pendidikan terendahnya adalah SD, dan tingkat pendidikan tertinggi adalah S-2. Sementara jumlah pegawai dilihat dari tingkat pendidikannya paling banyak adalah S-1 dan S-2, yaitu sebanyak 13 orang dan 12 orang pegawai.

#### 4) **Visi, Misi, dan Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang**

Visi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah “Terwujudnya Industri yang Mandiri, Tangguh, Unggul, dan Berdaya Saing Untuk Pembangunan Ekonomi yang Produktif dan Berkelanjutan.”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman pada tugas pokok dan fungsi dinas yang berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan perindustrian dan perdagangan yang transparan dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, maka Misi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2009-2013 adalah:

- a. Mewujudkan pelayanan publik melalui pengembangan, fasilitasi, penataan, pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha.
- b. Mewujudkan teknologi industri bagi pengembangan industri kecil, menengah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal yang berwawasan lingkungan.

- c. Mewujudkan promosi perdagangan dalam dan luar negeri dalam rangka perluasan pasar, perlindungan konsumen dan pengamanan peredaran barang dan jasa.
- d. Mewujudkan penguatan dan pengembangan kinerja kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Tujuan merupakan penjabaran misi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Maka tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Misi I: Mewujudkan pelayanan publik melalui pengembangan, fasilitasi, penataan, pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha.

Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik baik di tingkat perijinan, fasilitasi, penataan, pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha baik sektor perindustrian maupun perdagangan.
  2. Mendorong kestabilan harga melalui kelancaran distribusi barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok, penting dan strategis bagi masyarakat.
  3. Mengembangkan iklim usaha yang kondusif serta kemitraan.
- b. Misi II: Mewujudkan teknologi industri bagi pengembangan industri kecil, menengah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal dan berwawasan lingkungan.

Tujuan:

1. Terwujudnya struktur industri yang tangguh ditandai dengan tingginya penguasaan teknologi dan meningkatkan penggunaan hasil produksi daerah.
  2. Mempersiapkan dan memperkuat perekonomian daerah dalam menghadapi globalisasi ekonomi dunia khususnya AFTA melalui industri yang kuat dan berorientasi ekspor serta ramah lingkungan.
- c. Misi III: Mewujudkan promosi perdagangan dalam dan luar negeri dalam rangka perluasan pasar, perlindungan konsumen dan pengamanan peredaran barang dan jasa.

Tujuan:

1. Mengoptimalkan potensi pasar lokal dan internasional melalui peningkatan daya saing serta perluasan dan pematapan pasar produk ekspor.
  2. Meningkatkan kesadaran produsen dan konsumen akan kualitas produk termasuk di dalamnya tertib ukur takar dan timbang sebagai upaya menciptakan ketertiban umum dan perlindungan konsumen.
- d. Misi IV: Mewujudkan penguatan kelembagaan dan pengembangan kinerja kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Tujuan:

Menerapkan tata pemerintahan yang baik dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, transparan, dan akuntabel, serta menerapkan prinsip partisipasi, efisiensi dan efektivitas di bidang perindustrian dan perdagangan.

**c) Gambaran Umum Kelurahan Dinoyo**

**1) Kondisi Geografis**

Secara geografis, Kelurahan Dinoyo berada pada ketinggian 440 m di atas permukaan laut, dan mempunyai luas wilayah 142,8 Ha. Seperti kebanyakan daerah lain di Malang, suhu di Dinoyo ini berkisar antara 26°C - 35°C, dan memiliki topografi bentuk wilayah yang 100% datar sampai berombak.

Sedangkan secara administratif, Dinoyo dibatasi oleh kelurahan-kelurahan lainnya yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Dinoyo. Batas tersebut yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Jatimulyo, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Ketawanggede, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sumpersari, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tlogomas.

Dari luas wilayah yang dimiliki Kelurahan Dinoyo, dapat diketahui peruntukannya sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Luas dan Jenis Penggunaan Tanah**  
**Kelurahan Dinoyo Tahun 2009**

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1.	Tanah Sawah	8,7	6,2
2.	Tanah Kering (Pekarangan/Bangunan)	126	88
3.	Tanah Keperluan Fasilitas Sosial	8,1	5,8
	Jumlah	142,8	100

Sumber: Monografi Kelurahan Dinoyo 2009

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan tanah terbesar diperuntukkan untuk tanah kering (pekarangan/bangunan) yaitu sebesar 88%. Sedangkan untuk tanah sawah yaitu 6,2% dan tanah keperluan fasilitas sosial yaitu 5,8%, yang mana keduanya memiliki perbandingan luas yang hampir sama.

## 2) Kondisi Kependudukan

Berdasarkan data monografi Kelurahan Dinoyo tahun 2009, penduduk Kelurahan Dinoyo pada semester I tahun 2009 adalah 15.436 jiwa. Data distribusi penduduk Kelurahan Dinoyo tahun 2009 untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 8**  
**Distribusi Penduduk Kelurahan Dinoyo**  
**Berdasarkan Kependudukan Tahun 2009**

No.	Penduduk	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1.	Menurut Jenis Kelamin:		
	a. Jumlah Laki-laki	8279	54
	b. Jumlah Perempuan	7157	46
2.	Menurut Kewarganegaraan:		
	a. WNI Laki-laki dan Perempuan	15436	100
	b. WNA Laki-laki dan Perempuan	0	0
3.	Menurut Agama:		
	a. Islam	14318	92,75
	b. Katolik	311	2,02
	c. Protestan	681	4,41
	d. Hindu	51	0,3
	e. Budha	75	0,5
	f. Aliran Kepercayaan	2	0,02
	Jumlah	15436	100

Sumber: Monografi Kelurahan Dinoyo 2009

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa keseluruhan penduduk di Kelurahan Dinoyo merupakan WNI dengan jumlah 15.436 jiwa. Mayoritas diantaranya merupakan pemeluk agama Islam sebanyak 14.318 jiwa. Sementara itu dalam hal jenis kelamin, terdapat perbedaan yang cukup banyak. Antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan terpaut sekitar 1.122 jiwa.

**Tabel 9**  
**Distribusi Penduduk Kelurahan Dinoyo**  
**Berdasarkan Kelompok Pendidikan Umum Tahun 2009**

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1.	Belum Sekolah	1631	10,5
2.	Tidak Tamat Sekolah Dasar	305	2,0
3.	Tamat SD/Sederajat	3637	23,5
4.	Tamat SLTP/Sederajat	2423	15,7
5.	Tamat SMU/Sederajat	4357	28,1
6.	Tamat Akademi/Sederajat	525	3,4
7.	Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat	2593	16,8
	Jumlah	15436	100

*Sumber: Monografi Kelurahan Dinoyo 2009*

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah tamatan SMU dan SD merupakan dua terbesar dari kelompok pendidikan umum penduduk Kelurahan Dinoyo, yang mana bila di jumlahkan prosentasenya mencapai 51,6%. Kemudian untuk terbesar berikutnya yaitu tamatan Perguruan Tinggi dan SLTP. Kemudian kelompok yang paling sedikit prosentasenya yaitu kelompok tidak tamat Sekolah Dasar sebesar 2,0% dan kelompok tamatan Akademi/ sederajat yaitu sebesar 3,4%.

### 3) Mata Pencaharian

Penduduk Kelurahan Dinoyo memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam, mulai dari petani, pedagang, buruh, pengusaha, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan sebagainya. Mengenai distribusi jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian pada tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini:

**Tabel 10**  
**Distribusi Penduduk Kelurahan Dinoyo**  
**Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2009**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1.	Petani	39	1,1
2.	Pengusaha Sedang/Besar	37	1,1
3.	Pengrajin/Industri Kecil	76	2,1
4.	Buruh Industri	875	24,1
5.	Buruh Bangunan	121	3,3
6.	Pedagang	1013	27,9
7.	Pengangkutan	103	2,8
8.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	732	20,1
9.	Anggota TNI	181	4,9
10.	Pensiunan PNS/TNI	457	12,6
	Jumlah	3634	100

*Sumber: Monografi Kelurahan Dinoyo 2009*

Meskipun bidang pengrajin/industri kecil bukanlah yang mayoritas di Kelurahan Dinoyo dari segi mata pencaharian, akan tetapi dalam hal jumlah, pengrajin/industri kecil (76 orang) masih lebih banyak jika dibandingkan dengan usaha lain pada sektor yang sama yaitu pengusaha sedang/besar yang berjumlah 37 orang. Sedangkan prosentase terbanyak berdasarkan mata pencaharian masyarakat Kelurahan Dinoyo yaitu pedagang sebesar 27,9%, kemudian buruh industri sebesar 24,1%, dan selanjutnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 20,1%.

#### **4) Jumlah Perusahaan/Usaha**

Jumlah perusahaan/usaha yang terdapat di Kelurahan Dinoyo ini bermacam-macam. Perusahaan yang ada mulai dari usaha industri kecil, industri menengah maupun industri besar, kemudian ada perhotelan, rumah makan, usaha angkutan dan perdagangan. Mengenai jumlah pengusaha dan tenaga kerja yang ada di Kelurahan Dinoyo Tahun 2009, dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini:

**Tabel 11**  
**Distribusi Jumlah Pengusaha/Usaha dan Tenaga Kerja**  
**Kelurahan Dinoyo Tahun 2009**

No.	Perusahaan/Usaha	Jumlah (buah)	Tenaga Kerja (orang)
1.	Industri:		
	a. Besar dan Sedang	6	400
	b. Kecil	12	60
	c. Rumah Tangga	16	50
2.	Perhotelan/Losmen/Penginapan	1	25
3.	Rumah Makan/Warung Makan	44	147
4.	Perdagangan	883	1919
5.	Angkutan	50	95
	Jumlah	1012	2696

*Sumber: Monografi Kelurahan Dinoyo 2009*

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa distribusi untuk usaha di sektor perdagangan sangatlah besar, dengan total 883 buah dan tenaga kerja sebanyak 1919 orang, sektor tersebut telah mendominasi roda perekonomian di Kelurahan Dinoyo.

**d) Profil Industri Kecil Keramik Dinoyo**

Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur tentunya juga memiliki berbagai jenis usaha, termasuk salah satunya yaitu usaha keramik yang berada di Kelurahan Dinoyo. Keramik Dinoyo ini sudah dikenal masyarakat. Industri keramik di Kota Malang khususnya Keramik Dinoyo ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia bahkan oleh turis mancanegara yang berkunjung ke Kota Malang. Keramik Dinoyo ini sudah tersebar sampai ke Balikpapan, Samarinda, Lombok, Denpasar, Bandar Lampung, Bangka, Aceh, dan Medan. Di Pulau Jawa, keramik Dinoyo bisa ditemukan di semua kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Yogyakarta (Koran Tempo, 18 November 2006).

Sementara itu persebaran industri keramik di Kota Malang itu sendiri tidak berjauhan lokasinya, antara lain di Dinoyo, Betek, Tlogomas, Landung Sari, Bioro, dan di beberapa daerah lainnya. Khusus untuk wilayah Dinoyo,

di daerah ini telah terbentuk kawasan sentra industri keramik yang sudah di kenal oleh masyarakat luas.

Kawasan Dinoyo, Malang, sudah sejak lama dikenal sebagai penghasil keramik yaitu sekitar tahun 1960-an. Disini terdapat puluhan industri yang memproduksi keramik dengan berbagai model dan corak. Konon, kemampuan membuat keramik di Dinoyo ini telah ada sejak jaman Kerajaan Kanjuruhan pada abad ke-8 Masehi (Kompas, 11 Mei 2003). Hal ini dapat di buktikan dengan banyak ditemukannya pecahan gerabah kuno di sekitar daerah Dinoyo.

Dulunya, keramik Dinoyo, Malang ini di kenal dengan produk keramiknya yang berupa barang-barang gerabah dan peralatan dapur. Produk tersebut dijadikan lahan usaha yang dikelola secara rumah tangga oleh para pengrajin asli Dinoyo dan masyarakat sekitarnya. Usaha keramik di kawasan Dinoyo ini dapat di kategorikan dalam usaha berskala kecil dan menengah karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Tenaga kerja yang relatif sedikit (3-15 orang)
- b. Tingkat Kepemilikan modal yang kecil (kurang dari Rp 25 juta)
- c. Dikerjakan melalui keterampilan tradisional atau sederhana
- d. Menggunakan teknologi padat karya
- e. Wilayah pemasaran yang terbatas dan mayoritas dilakukan oleh perantara.

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, pada tahun 1953, Departemen Perindustrian membentuk Lembaga Perusahaan-Perusahaan Industri (LEPPIN). Hasilnya pada tahun 1962 berdirilah Industri Keramik Unit Dinoyo II dengan produksi inti berupa barang-barang keramik yang dibakar dengan bahan bakar kayu pada suhu 800°C-900°C. Bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan keramik tersebut adalah kaolin, kuarsa, *felspard* dan *ball clay*. Hasil produksinya berupa kerajinan seperti moci, mangkok, dan baki yang hanya merupakan produk setengah jadi. Produk tersebut dijual ke Induk Perusahaan Keramik untuk diglasir dan dibakar dengan suhu pembakaran 1.265°C-1.300°C sehingga tercipta keramik porselin.

Dari situ kemudian muncullah perusahaan-perusahaan keramik rakyat seperti perusahaan keramik Pendowo Betek II serta perusahaan keramik Tanah Agung yang dulunya dikenal dengan nama Keramik Unit Dinoyo III. Kedua perusahaan keramik tersebut pada awalnya memproduksi barang-barang keramik/gerabah setengah jadi. Selanjutnya produksi setengah jadi tersebut dijual ke induk perusahaan keramik untuk diproses kembali sehingga menghasilkan keramik porselin.

Tujuh tahun kemudian yaitu pada tahun 1969, Industri Keramik Unit Dinoyo III yang lebih dikenal dengan keramik “Tanah Agung” mulai meningkatkan prestasinya. Meski dikerjakan dalam skala rumah tangga, namun pengelolaannya mengacu pada standar mutu tinggi. Proses pembuatan keramik ini membutuhkan pembakaran pada suhu 800°C-900°C, dengan cara membuat alat tungku pemanas dengan bahan bakar solar. Dari adanya alat tersebut, mampu memproduksi keramik seperti cangkir, moci, baki atau mangkok, asbak, alat listrik (isolator) dan batu atau semen tahan api, yang semuanya itu dipasarkan sendiri di wilayah Jawa dan Bali.

Pada tahun 1979, setelah mendapat bimbingan dan penyuluhan dari Departemen Perindustrian, terutama dibidang desain, Keramik Tanah Agung mampu mengembangkan usaha dengan meningkatkan produksinya berupa seni atau keramik hias seperti tempat duduk, tempat payung, guci, pot, vas, piring hias, keramik kontemporer, dan patung. Secara keseluruhan sentra keramik Dinoyo dapat menyerap tenaga kerja sekitar 330 orang dengan total produksi sebanyak 2.034 ton/tahun. Khusus untuk gerabah menyerap 80 tenaga kerja dengan kapasitas produksi 7.650.000 biji/tahun.

Dalam perkembangannya, para pengrajin keramik Dinoyo dan pedagang keramik membentuk Paguyuban untuk mengembangkan usaha dan menciptakan lingkungan pengrajin dan pedagang sebagai “Wisata Kerajinan Keramik Dinoyo”. Untuk kebutuhan pasar global, sentra keramik Dinoyo sedikitnya telah mendirikan 30 showroom yang terletak di sepanjang jalan MT. Haryono, Dinoyo, Malang.

Seiring berjalannya waktu, perusahaan-perusahaan keramik rakyat tersebut mulai meningkatkan usahanya, mereka tidak lagi membuat keramik

dalam bentuk setengah jadi tetapi juga telah membuat produk keramik porselin dalam berbagai bentuk seperti cangkir, moci dan asbak. Sedangkan pada akhir tahun 1970-an perusahaan keramik rakyat ini mulai mengembangkan usahanya dengan memproduksi barang-barang seni dan keramik hias berupa tempat payung, guci, pot, vas dan sebagainya. Dan di akhir tahun 1970-an itulah sudah mulai muncul industri keramik dalam bentuk usaha rumah tangga yang tersebar di Kelurahan Dinoyo.

Munculnya industri keramik dalam bentuk usaha rumah tangga ini disebabkan karena banyak dari tenaga kerja yang pernah bekerja pada perusahaan keramik rakyat tersebut telah mampu mendirikan usaha sendiri dengan berbekal pengalaman dan keterampilan yang diperoleh selama bekerja pada perusahaan keramik rakyat. Terlebih lagi mereka juga menganggap bahwa prospek industri keramik ke depannya cukup bagus.

Keberadaan sentra industri keramik Dinoyo ini semakin kuat karena faktor lokasi yang strategis dimana Dinoyo merupakan pusat pemasaran bagi produk-produk keramik yang ada dalam wilayah Dinoyo maupun luar wilayah Dinoyo, seperti Sengkaling, Dau, dan sekitarnya. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya showroom keramik yang ada di jalan MT. Haryono Gang 9 s/d 13.

Untuk melakukan pemasaran hasil industrinya, biasanya pengusaha keramik ini melakukan kerjasama penjualan produk kepada pedagang showroom sendiri. Keberadaan showroom ini juga dapat menjadi daya tarik wisata tersendiri, khususnya wisata domestik yang menginginkan cinderamata dari Kota Malang.

Kemudian dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Siono, pemilik SN Keramik, dijelaskan tentang bagaimana tahap-tahap proses produksi keramik mulai dari awal pembuatan sampai selesai yaitu sebagai berikut:

“Pertama, yang dilakukan dalam proses pembuatan keramik adalah mencampur bahan berupa masse, tepung kaolin, tanah pucung, air menjadi satu hingga adonan tersebut dapat dicetak pada pola cetakan yang telah ada. Apabila sudah dapat dicetak, maka keramik setengah jadi tersebut dilepaskan dari pola cetakan kemudian dijemur hingga setengah kering. Setelah agak kering proses selanjutnya adalah merapikan bagian

pinggiran keramik dengan pisau kecil/cutter, kemudian keramik dijemur hingga kering. Setelah kering maka dimulailah proses pemberian motif dan pewarnaan (kobal), setelah kering maka dimulailah proses pembakaran yang dilakukan ditungku dengan suhu yang sangat tinggi". (Wawancara pada hari Kamis, 8 Oktober 2009, pukul 09.30 WIB di SN Keramik)

Pada tahun 1998, sejumlah pengrajin mencoba membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB). Mereka merasa perlu membuat suatu wadah perkumpulan atau paguyuban guna mempererat hubungan antara para pengrajin itu sendiri. Dari situ kemudian berdirilah sebuah paguyuban yang diprakarsai oleh pengrajin dan pedagang yang ada di Kelurahan Dinoyo. Adapun susunan pengurus paguyuban keramik Dinoyo periode 2009 ini yaitu:

Ketua	: Syamsul Arifin
Sekretaris	: Suheri, Spd.
Bendahara	: Asih Ngadi Pramono
Koordinator Bidang	
1. Industri Keramik	: Sony Suharto
2. Industri Gips	: Ir. Ahmad Wiyono
3. Perdagangan	: Mulyati
4. Humas	: Sutikno
5. Pameran	: Dra. Sri Handayani

Dengan berdirinya paguyuban tersebut, tujuan yang ingin dicapai utamanya adalah untuk memajukan industri keramik Dinoyo itu sendiri. Selain itu tujuannya juga untuk menampung aspirasi para pengrajin maupun pedagang keramik dan juga untuk mencegah persaingan yang kurang sehat di antara para pengrajin dan pedagang itu sendiri. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Syamsul Arifin, pengrajin keramik sekaligus ketua paguyuban industri keramik Dinoyo, yaitu:

"Paguyuban ini merupakan wadah untuk membentuk kebersamaan, menampung aspirasi pengrajin dan pedagang serta mencegah terjadinya persaingan yang kurang sehat antar pengrajin maupun pedagang itu sendiri, serta sebagai sarana silaturahmi". (Wawancara pada hari Kamis, 8 Oktober 2009, pukul 09.00 WIB di Showroom Cendera Mata Keramik)

Dengan dibentuknya paguyuban tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi industri keramik Dinoyo serta menjadi kelompok usaha bersama yang kuat, sehingga memudahkan instansi pemerintah yang terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang untuk melakukan komunikasi ataupun pemberdayaan kepada pengrajin keramik Dinoyo itu sendiri.

Namun dalam kenyataannya, sampai tahun 2009 ini perkembangan industri kecil keramik Dinoyo mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari data yang penulis peroleh dari Disperindag Kota Malang, jumlah pengrajin keramik Dinoyo ini tinggal 17 unit usaha saja. Unit usaha tersebut hanya menyerap 60 tenaga kerja saja yang terdiri dari 40 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. Sedangkan total produksinya turun menjadi 98 ton/tahun saja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

## **2. Penyajian Data**

### **a) Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam Rangka Memberdayakan Industri Kecil Keramik Dinoyo**

Sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur, tentunya Kota Malang juga memiliki masalah yang sangat kompleks. Tantangan yang dihadapi dalam upaya memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya tentunya juga semakin beragam. Selain mempunyai kekurangan berupa permasalahan tersebut, tentunya Kota Malang juga memiliki kelebihan sebagai sebuah kota yang di kenal dengan Tri Bina Cita nya yaitu Kota Malang sebagai Kota Pendidikan, Kota Industri, dan Kota Pariwisata.

Salah satu masalah yang dihadapi Kota Malang dalam usaha mensejahterakan dan memakmurkan masyarakatnya adalah permasalahan ekonomi meliputi masih rendahnya tingkat investasi baik dari masyarakat maupun swasta, lesunya kegiatan ekonomi sektor industri dan perdagangan, meningkatnya jumlah pengangguran karena pertumbuhan jumlah angkatan kerja sebagai akibat belum terciptanya lapangan kerja, masih rendahnya rata-rata pendapatan perkapita masyarakat, lemahnya penataan sektor ekonomi informal perkotaan, serta kurang berkembangnya usaha kecil dan menengah.

Program Pembangunan Kota Malang disusun sebagai refleksi dari misi Kota Malang untuk mewujudkan visi Kota Malang. Berdasarkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kota Malang yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2009-2013 lebih diprioritaskan pada bidang ekonomi yaitu dengan program penanggulangan kemiskinan perkotaan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan kota, pengembangan usaha informal yang mengarah pada peningkatan sumber daya manusia yang profesional, serta penguatan basis ekonomi kerakyatan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah penjabaran dari Renstra Kota Malang yang merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang ke dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang. Renstra Kota Malang itu sendiri merupakan dokumen rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, program, dan kegiatan daerah.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kemudian menyusun Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 2009-2013 sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta dapat menjadi landasan pertanggung jawaban bagi kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu tahunan berdasarkan tolok ukur renstra.

Dalam rencana pembangunan Kota Malang, diutamakan juga program-program yang mewujudkan semangat dan cita-cita reformasi dalam upaya pemulihan ekonomi kota menuju terwujudnya Indonesia baru berlandaskan pada negara dengan fondasi sistem kehidupan ekonomi, sosial, budaya yang dijiwai prinsip-prinsip demokrasi kebangsaan dan keadilan sosial dalam ikut serta menertibkan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan Kota Malang. Diupayakan pada program pendayagunaan secara optimal potensi penduduk, posisi geografis yang strategis, dan sumber daya alam yang memadai untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat Kota Malang.

Untuk meningkatkan potensi industri kecil, Pemerintah Kota Malang mengadakan program pemberdayaan industri kecil yang terdiri atas kegiatan-kegiatan pembinaan, penyuluhan dan pelatihan, penyediaan bantuan peralatan

dan produksi, serta bantuan modal untuk pengembangan usaha. Semua tanggung jawab dari kegiatan tersebut dipercayakan pada bidang perindustrian yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang yang nantinya akan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota Malang.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang sebagai bagian dari perangkat daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berkewajiban menyusun sebuah Renstra Dinas dimana secara umum dapat dimaksudkan untuk memberikan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Malang. Secara khusus renstra perangkat daerah berfungsi sebagai payung program bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh perangkat daerah sehingga dapat menjadi media akuntabilitas kinerja dinas kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2008, yang menjadi tugas pokok dari Disperindag ini adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah. Sesuai dengan profilnya, Disperindag Kota Malang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (renstra) dan Rencana Kerja (renja) di bidang perindustrian dan perdagangan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan asosiasi dunia usaha;
- 4) Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawawasan kelembagaan di industri dan perdagangan;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi permodalan dan pelatihan teknis manajemen di bidang industri dan perdagangan;
- 6) Pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok dan ekspor impor;
- 7) Pelaksanaan promosi produk industri dan usaha perdagangan;
- 8) Pelaksanaan kemetrologian dan pengawasan penerapan standar di bidang perindustrian dan perdagangan serta perlindungan konsumen;

- 9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan industri dan perdagangan;
- 10) Pelaksanaan pengumpulan, analisis dan diseminasi data serta pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan pasar dalam rangka pemberian informasi pasar dan stabilisasi harga;
- 11) Pelaksanaan fasilitasi operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- 12) Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang industri dan perdagangan;
- 13) Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang industri dan perdagangan;
- 14) Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
- 15) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- 16) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 17) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- 18) Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- 19) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perindustrian dan perdagangan;
- 20) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- 21) Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- 22) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 23) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan rencana strategis (renstra) yang ada, maka Disperindag Kota Malang merumuskan program dan kegiatan seperti pada Tabel 12 berikut ini:

**Tabel 12**  
**Program dan Kegiatan Disperindag Kota Malang**

BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR
Perindustrian dan Perdagangan	Pengembangan industri kecil dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diversifikasi produk industri kecil dan menengah lokal yang berdaya saing tinggi</li> <li>Menyelenggarakan pembimbingan, penyuluhan dan pelatihan manajemen industri, desain produk dan standarisasi mutu produk industri kecil dan menengah</li> <li>Pembentukan sentra-sentra industri kecil dan menengah sesuai tata ruang kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkembangnya jenis-jenis produk unggulan usaha kecil dan menengah</li> <li>Meningkatnya ketrampilan para pengusaha kecil dan menengah</li> <li>Meningkatnya kualitas produk industri kecil dan menengah</li> <li>Tertatanya sentra-sentra produk sesuai spesifikasi industri</li> <li>Tersedianya lokasi pemasaran yang strategis dan prospektif</li> </ul>
	Peningkatan kemampuan teknologi industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan pembimbingan, penyuluhan dan pelatihan penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri sederhana bagi industri kecil dan menengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya ketrampilan usaha kecil dan menengah dalam penggunaan teknologi industri sederhana</li> </ul>
	Pengembangan perdagangan dan sistem distribusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengendalikan dan menata sistem distribusi barang</li> <li>Mengembangkan usaha perdagangan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya sistem distribusi barang dan pengendalian harga sembako dan barang penting</li> <li>Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengusaha dibidang perdagangan kecil dan menengah</li> </ul>
	Pemantapan dan pengembangan perlindungan konsumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya sarana dan prasarana Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perengkapannya (UTTP)</li> <li>Terpenuhinya kebutuhan akan keamanan dalam mengkonsumsi produk barang dan jasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya sarana dan prasarana UTTP</li> <li>Terciptanya kepastian UTTP</li> <li>Terwujudnya tertib usaha dibidang industri dan perdagangan</li> <li>Terlaksananya promosi usaha dan produk Kota Malang</li> </ul>

Sumber: Disperindag Kota Malang 2009

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang terhadap industri kecil keramik Dinoyo dirasa penting karena peran industri kecil itu sendiri yang sangat besar dan untuk mencegah agar industri kecil tidak gulung tikar. Hal yang mendasar bahwa jangkauan dari industri kecil yang sangat luas dan mampu mencapai daerah-daerah pada umumnya yang disesuaikan dengan potensi sumber daya alam yang mendukungnya. Dengan adanya industri kecil ini akan membawa dampak pemerataan kesempatan kerja, pemerataan berusaha, pemerataan pendapatan serta pemerataan-pemerataan di bidang lain.

Kedudukan industri kecil tidak hanya sebagai usaha bagi pemerataan pembangunan, tetapi juga sebagai struktur sosial yang dapat berproduksi dengan aktif dan merupakan mata pencaharian utama ataupun sampingan. Keberadaan industri kecil ini juga dianggap memiliki keuntungan tertentu dari segi keadilan dan dalam distribusi pendapatan mampu meningkatkan kreativitas masyarakat serta dapat mempertahankan dan mengembangkan tradisi dan kebudayaan daerah setempat.

Dari data yang ada, keberadaan pengrajin keramik Dinoyo ini semakin menyusut jumlahnya. Hal tersebut tentunya sangat disayangkan mengingat industri keramik Dinoyo ini sudah mulai dibina mulai tahun 1990, namun kenyataannya sampai saat ini justru mengalami penurunan baik jumlah maupun omsetnya. Pada tahun 2006 saja jumlah pengrajin keramik yang tersisa di Dinoyo, hanya sekitar 20 dari 200 perusahaan yang sebelumnya ada (Kompas, 11 Mei 2003). Hal ini semakin diperkuat dari data yang penulis peroleh dari Disperindag Kota Malang, bahwa pada awal tahun 2009 ini jumlah pengrajin keramik Dinoyo yang tersisa yaitu sekitar 17 pengrajin keramik saja.

Hal ini sangat jauh bila dibandingkan dengan kondisi pada saat sebelum era reformasi, saat Indonesia dilanda krisis moneter. Saat itu di Dinoyo terdapat sekitar 30 lebih pengrajin keramik yang berada di Kelurahan Dinoyo ini. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan nama dan alamat para pengrajin keramik Dinoyo sebelum era reformasi yaitu sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Nama dan Alamat Pengrajin Keramik Dinoyo**

No.	Nama Usaha	Alamat
1.	Keramik dan Souvenir Noori	Jl. MT. Haryono No. 123
2.	Keramik Syamsuri	Jl. MT. Haryono
3.	Keramik Sanuji	Jl. MT. Haryono
4.	Keramik Djoko Suheri	Jl. MT. Haryono IX G/449
5.	Keramik Soeharto	Jl. MT. Haryono XI/461
6.	Keramik Eky Wahyu	Jl. MT. Haryono XI/338
7.	Keramik Sudirman	Jl. MT. Haryono
8.	Keramik Dinoyo	Jl. MT. Haryono 336
9.	Keramik Yan's	Jl. MT. Haryono XI/355
10.	Keramik SC	Jl. MT. Haryono XI D/470
11.	Keramik SN	Jl. MT. Haryono XI D/473
12.	Keramik Syafi'i	Jl. MT. Haryono
13.	Keramik Dinikoe	Jl. MT. Haryono XI/379
14.	Keramik Ragiel	Jl. MT. Haryono XI D/466
15.	Keramik CJDW	Jl. MT. Haryono XII/445
16.	Keramik Tanah Agung	Jl. MT. Haryono 9-10
17.	Keramik Bagus	Jl. MT. Haryono
18.	Keramik Cenderamata	Jl. MT. Haryono XI D/474
19.	Keramik Wiwik	Jl. MT. Haryono XI/465
20.	Keramik Suka Maju	Jl. MT. Haryono XIII A 25
21.	Keramik Firman	Jl. MT. Haryono II 340
22.	Keramik Camel	Jl. MT. Haryono XIII 415
23.	Keramik Vira	Jl. MT. Haryono XIII 443
24.	Keramik Sabar	Jl. MT. Haryono XI A 436
25.	Keramik Bayu	Jl. MT. Haryono XI 337
26.	Keramik RC	Jl. MT. Haryono XI C 470
27.	Keramik Pak Ismo	Jl. MT. Haryono XII 474
28.	Keramik Dea	Jl. MT. Haryono XI B 48
29.	Keramik Barokah	Jl. MT. Haryono XIII 414
30.	Keramik Family	Jl. MT. Haryono XI 335
31.	Keramik Asih	Jl. MT. Haryono XI 368
32.	Keramik Aries	Jl. MT. Haryono XI 465
33.	Keramik Suryanik	Jl. MT. Haryono XI 38
34.	Keramik Lestari	Jl. MT. Haryono XI 342
35.	Keramik Dwi Putri	Jl. MT. Haryono XI A 367
36.	Keramik Irama Baru	Jl. MT. Haryono XI D 458
37.	Keramik Bu Riyanti	Jl. MT. Haryono XI 472
38.	Keramik Ramli	Jl. MT. Haryono 53

Sumber: Sub Dinas Perindustrian Disperindag Kota Malang 2008

Sedangkan ke 17 pengrajin keramik Dinoyo yang sampai saat masih bertahan dapat dilihat dari Tabel 14 berikut ini:

**Tabel 14**  
**Nama dan Alamat Pengrajin Keramik Dinoyo**

No.	Nama Usaha	Alamat
1.	Keramik Syamsuri	Jl. MT. Haryono
2.	Keramik Sanuji	Jl. MT. Haryono
3.	Keramik Djoko Suheri	Jl. MT. Haryono IX G/449
4.	Keramik Soeharto	Jl. MT. Haryono XI / 461
5.	Keramik Eky Wahyu	Jl. MT. Haryono XI / 338
6.	Keramik Sudirman	Jl. MT. Haryono
7.	Keramik Dinoyo	Jl. MT. Haryono XI / 336
8.	Keramik Cendera Mata	Jl. MT. Haryono XI D/474
9.	Keramik Yan's	Jl. MT. Haryono XI / 355
10.	Keramik SC	Jl. MT. Haryono XI D/470
11.	Keramik SN	Jl. MT. Haryono XI D/473
12.	Keramik Syafi'i	Jl. MT. Haryono
13.	Keramik Dinikoe	Jl. MT. Haryono XI / 379
14.	Keramik Ragiel	Jl. MT. Haryono XI D/466
15.	Keramik CJDW	Jl. MT. Haryono XIII / 445
16.	Keramik Tanah Agung	Jl. MT. Haryono 9-10
17.	Keramik Bagus	Jl. MT. Haryono

*Sumber: Sub Dinas Perindustrian Disperindag Kota Malang 2009*

Jumlah diatas dapat digolongkan sebagai jumlah yang sedikit, mengingat industri kecil keramik Dinoyo ini pernah berjaya sebelum kini akhirnya tinggal beberapa pengrajin saja yang bertahan. Karena alasan tersebut, maka perlu adanya pemberdayaan terhadap industri kecil keramik Dinoyo ini seperti yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang.

Pemberdayaan industri kecil dan menengah khususnya industri kecil keramik yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang merupakan salah satu penjabaran terhadap visi dan misi Kota Malang sebagaimana yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kota Malang tahun 2009-2013 dalam bidang ekonomi yang kemudian dijabarkan dalam visi dan misi Disperindag Kota Malang sesuai dengan yang tercantum pada Renstra tahun 2009-2013 Disperindag Kota Malang.

Sebelum melaksanakan tugas pemberdayaan, Disperindag Kota Malang melakukan identifikasi terhadap industri kecil yang ada di kota Malang berdasarkan tingkat berdaya atau tidaknya industri tersebut.

Industri kecil yang berdaya menurut Disperindag Kota Malang adalah industri kecil yang:

- 1) Mempunyai skala ekonomi yang besar, sehingga produktif untuk dikembangkan;
- 2) Mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang;
- 3) Memiliki dampak spasial yang besar baik bagi masyarakat;
- 4) Memiliki produk-produk unggulan yang mempunyai pasar yang jelas dan prospektif;
- 5) Memenuhi prinsip-prinsip efisiensi ekonomi untuk menghasilkan output yang maksimal;

Sedangkan industri kecil yang tidak/kurang berdaya dan perlu diberdayakan menurut Disperindag adalah:

- 1) Kompetensi manajemen yang rendah;
- 2) Kurang pengalaman;
- 3) Lemahnya kendali keuangan;
- 4) Kurang mampu mengembangkan perencanaan usaha (*business plan*);
- 5) Pertumbuhan yang tak terkendali;
- 6) Lokasi usaha yang buruk;
- 7) SDM yang kurang handal.

Strategi/upaya yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang untuk melakukan pemberdayaan terhadap industri kecil yang tidak/kurang berdaya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan SDM pelaku industri melalui peningkatan profesionalisme, manajemen dan penguasaan serta pemanfaatan ilmu dan teknologi.
- 2) Meningkatkan akses terhadap informasi, teknologi, modal dan pasar bagi pengembangan usaha industri kecil.
- 3) Merumuskan hubungan kemitraan industri kecil dan pengusaha besar.

Sedangkan strategi/upaya yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang untuk melakukan pemberdayaan terhadap industri kecil yang berdaya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan produksi, kualitas daya saing dari pelaku industri kecil.
- 2) Tersedianya akses informasi, teknologi, modal dan pasar bagi industri kecil.
- 3) Terwujudnya sinergi program pengembangan industri kecil antar instansi terkait.
- 4) Terwujudnya kemitraan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan.

Dijelaskan oleh Bapak Syahsin Ruba'i selaku Sekretaris Disperindag Kota Malang bahwa sasaran yang ingin dicapai oleh Disperindag dengan strategi/upaya pemberdayaan didasarkan pada persoalan sebagaimana tersebut dibawah ini:

“Selama ini permasalahan yang terjadi pada industri kecil pada umumnya memang rendahnya kualitas produk yang dihasilkan oleh para pelaku industri kecil, hal ini disebabkan rendahnya pengetahuan pelaku industri kecil karena keterbatasan sumber daya yang mereka miliki. Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap daya saing hasil produk mereka dipasaran”. (Wawancara hari Kamis, 10 September 2009, pukul 09.00 WIB di ruang kerjanya)

Hal ini dipertegas oleh Bapak Budi Sulistyو selaku Staf Subdin Perindustrian Kota Malang bahwa:

“Selain rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, faktor lainnya adalah minimnya akses informasi, baik itu pemasaran maupun juga modal yang terbatas, serta teknologi yang sederhana”. (Wawancara hari Jumat, 11 September 2009, pukul 09.30 WIB di ruang kerjanya)

Kemudian dari strategi tersebut dijabarkan suatu bentuk program pembinaan terhadap industri kecil. Program-program pemberdayaan terhadap industri kecil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Program pemberdayaan sumber daya manusia sebagai pelaku usaha industri kecil dan menengah.* Program tersebut merupakan program yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia para pelaku industri kecil terutama berkaitan dengan ketrampilan mengelola usaha mereka. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah:
  - a. Pelatihan manajemen produksi,
  - b. Pelatihan desain produk,
  - c. Pelatihan standarisasi produk,
  - d. Pelatihan peningkatan ketrampilan,
  - e. Klinik bisnis.
- 2) *Program pengembangan teknologi produksi.* Program ini diarahkan untuk meningkatkan mutu dari hasil produksi industri kecil serta memberikan bimbingan mengenai produksi yang ramah lingkungan. Adapun kegiatan yang dilakukan dengan adanya program ini yaitu:
  - a. Bantuan alat,
  - b. Sosialisasi penggunaan teknologi tepat guna,
  - c. Sosialisasi produksi ramah lingkungan.
- 3) *Program promosi pemasaran.* Program ini diarahkan agar produksi industri kecil yang ada di Kota Malang dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas, utamanya oleh masyarakat Malang. Adapun yang dilakukan oleh Disperindag dalam program ini adalah:
  - a. Keikutsertaan industri kecil dalam pemerataan tingkat daerah atau lokal,
  - b. Pengembangan kios produk unggulan,
  - c. pengembangan kampung wisata sentra industri.
- 4) *Program pengembangan sistem informasi.* Program iniditujukan sebagai sarana atau akses terhadap informasi, teknologi serta pasar bagi industri kecil. Adapun kegiatan yang diadakan adalah:
  - a. Penyediaan sarana internet guna akses informasi pengembangan pasar,
  - b. Penerbitan buletin,

- c. Pelayanan informasi pasar.
- 5) *Program pengembangan permodalan industri kecil.* Kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah:
  - a. Dana bergulir,
  - b. Pelayanan informasi bantuan modal kredit dari lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank, misalnya koperasi.
- 6) *Program-program pembinaan industri kecil terpadu.* Kegiatan yang dijalankan meliputi:
  - a. Pembinaan industri kecil terpadu,
  - b. Koordinasi dengan instansi terkait.
- 7) *Program pengembangan hubungan kelembagaan kemitraan.* Program ini diarahkan untuk mewujudkan hubungan kerjasama antara pengusaha industri kecil dengan pengusaha besar. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program tersebut yaitu:
  - a. Temu usaha antar pengusaha industri kecil dengan pengusaha besar/BUMD/BUMN,
  - b. Pelatihan penyusunan proposal kerjasama.

Selain program kerja yang tersebut diatas, terdapat satu program penunjang yang digunakan sebagai upaya menunjang program pembinaan terhadap industri kecil. Program tersebut yaitu peningkatan kualitas sumber daya aparat dalam penguasaan teknologi dan manajemen. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu:

- a. Keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan aparat,
- b. Studi banding,
- c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dinas.

Dari semua strategi pemberdayaan industri kecil yang Disperindag susun diatas, tidak semuanya dapat diterapkan dalam sebuah/sentra industri kecil tertentu. Penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing industri kecil tersebut.

Dari program/upaya diatas, maka upaya pemberdayaan industri kecil yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam memberdayakan industri kecil keramik Dionoyo meliputi bidang-bidang berikut ini:

### 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam kemajuan industri kecil itu sendiri. Selama ini sumber daya manusia yang ada pada kebanyakan industri kecil merupakan sumber daya manusia yang rendah bila dilihat dari tingkat pendidikan, kemampuan dalam pengelolaan industri itu sendiri, baik dalam hal manajemen produksi, manajemen keuangan, maupun dalam hal manajemen pemasarannya. Hal inilah yang menyebabkan industri kecil sulit untuk berkembang dengan baik dan selalu terjebak dalam permasalahan yang sama.

Disperindag Kota Malang sendiri melalui kebijakan pengembangan sumber daya manusia ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia terhadap ketrampilan teknis yaitu dalam hal melakukan proses produksi serta ketrampilan manajerial. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh tenaga kerja yang terampil dan terdidik

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang meliputi program:

#### a. Diklat (Pendidikan dan Pelatihan)

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para pelaku industri kecil agar memiliki ketrampilan yang lebih terutama yang bersifat *technical skill*, maka salah satu usaha yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah pendidikan dan pelatihan. Adapun pendidikan dan pelatihan yang dilakukan Disperindag Kota Malang dapat dilihat dari Tabel 15 berikut ini:

**Tabel 15**  
**Pelaksanaan Diklat dan Kursus Tahun 2008**

Materi	Instansi	Frekuensi
1) Pendidikan dan Pelatihan		
- Teknologi Proses Produksi	Disperindag dan BPTIK	1 kali
- Mutu Produksi	Disperindag dan BPTIK	1 kali
- Manajemen	Disperindag, Pemkot Malang	1 kali
2) Kursus Singkat		
- Pengembangan desain produk	Disperindag Kota Malang	1 kali

Sumber: Sub Dinas Perindustrian, Disperindag Kota Malang 2008

Sayangnya pendidikan dan pelatihan yang dilakukan Disperindag sendiri dilakukan secara temporer, artinya pelatihan tersebut tidak dilakukan secara berkelanjutan namun sesuai dengan kebutuhan waktu itu. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Budi Sulistyو selaku Staf Subdin Perindustrian Kota Malang yaitu sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan sumber daya pengrajin, salah satu jalan yang ditempuh oleh Disperindag adalah melakukan Diklat. Diklat itu sendiri dalam pelaksanaannya dilakukan apabila industri kecil yang ada memang membutuhkan adanya Diklat. Selain itu karena adanya permintaan dari para pengrajin industri kecil keramik. Pada tahun 2008-2009 ini kami telah melakukan Diklat sebanyak dua kali kepada industri kecil keramik Dinoyo”. (Wawancara hari Jumat, 11 September 2009, pukul 09.30 WIB di ruang kerjanya)

Lebih lanjut Bapak Budi Sulistyو menjelaskan bahwa:

“Diklat yang sering kami lakukan adalah Diklat manajemen karena selama ini menurut kami salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku industri kecil pada umumnya adalah kelemahan dalam mengelola industri kecil, baik pada waktu proses produksi maupun pada saat memasarkan hasil industri kecil. Sedangkan materi yang diberikan meliputi pelatihan teknologi industri, baik itu desain keramik maupun penawaran serta diversifikasi produk. Selain itu materi lain yang diberikan adalah pelatihan manajemen yang terdiri dari gugus kendali mutu (GKM), motivasi, serta teknik dalam memasarkan hasil produksi”. (Wawancara hari Jumat, 11 September 2009, pukul 09.30 WIB di ruang kerjanya)

Hal itu juga dapat diperkuat dari pernyataan salah seorang pengrajin keramik Dinoyo yang penulis wawancarai di rumahnya yaitu Bapak Syamsul Arifin:

“Saya pernah mengikuti Diklat yang diadakan oleh Disperindag Kota Malang, dimana materi yang diberikan diantaranya adalah tentang perbaikan proses produksi dan diversifikasi produk. Selain itu juga pelatihan manajemen dan desain produk”. (Wawancara hari Rabu, 07 Oktober 2009, pukul 16.00 WIB di kediamannya)

Dalam melaksanakan diklat tersebut, pihak Disperindag Kota Malang tidak melaksanakan sendiri tetapi juga bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan instansi yang terkait. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Budi Sulistyو selaku Staf Subdin Perindustrian yaitu sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaan Diklat ini pihak Disperindag sendiri bekerjasama dengan instansi pemerintah lain yang terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM, serta lembaga pendidikan lainnya”. (Wawancara hari Jumat, 11 September 2009, pukul 09.30 WIB di ruang kerjanya)

#### **b. Studi Banding**

Selain Diklat, untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga mutu dari hasil produksi industri kecil keramik, pihak Disperindag Kota Malang juga mengadakan studi banding yang diikuti oleh para pengrajin keramik. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Budi Sulistyو sebagai berikut:

“Studi banding yang pernah diadakan oleh Disperindag selama ini antara lain ke Balai Besar Keramik Bandung di Bandung, Yogyakarta, ke Probolinggo pada pertengahan tahun 2007 dan juga pernah ke Taiwan pada tahun 2000 atas undangan pemerintah Taiwan”. (Wawancara hari Jumat, 11 September 2009, pukul 09.30 WIB di ruang kerjanya)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Bapak Soeharto selaku pengrajin keramik Dinoyo yaitu:

“Saya pernah mengikuti studi banding yang diadakan oleh Disperindag Kota Malang. Hal ini sangat bermanfaat bagi saya selaku pengrajin keramik karena dapat menambah pengetahuan

saya terutama untuk proses pembuatan keramik”. (Wawancara hari Sabtu, 10 Oktober 2009, pukul 09.00 WIB di kediamannya)

Dengan adanya studi banding ini diharapkan akan terjadi suatu pemahaman ilmu kepada para pengrajin keramik Dinoyo sehingga nantinya dapat diterapkan dalam mengelola industri keramik yang pada akhirnya dapat terjadi peningkatan terhadap hasil dan mutu produksinya.

### c. Pembinaan Manajerial

Kemampuan dalam bidang manajemen (*managerial skill*) bisa dikatakan sebagai faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu usaha. Ketidakjelasan manajemen struktur organisasi perusahaan, dan manajemen keuangan yang buruk dapat menghambat perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

Dengan adanya pengembangan SDM diharapkan kemampuan organisasi manajemen pengusaha industri kecil akan meningkat. Selain itu juga diperlukan peningkatan kewirausahaan, profesionalisme dan keterampilan teknis, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, daya saing, produktivitas dan efisiensi sehingga mampu mengatasi berbagai perubahan lingkungan yang dinamis.

Para pengrajin keramik Dinoyo memberikan keterangan mengenai masalah manajemen ini. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Soeharto, pemilik Soeharto Keramik berikut ini:

“Selama ini saya masih menggunakan manajemen yang sederhana dalam mengelola usaha saya. Dalam usaha saya tidak ada susunan kepengurusan usaha yang terorganisir. Yang jelas kami mempunyai posisi yang berbeda. Yaitu siapa yang menjadi pemilik usaha, dan siapa yang menjadi pekerjanya”. (Wawancara hari Sabtu, 10 Oktober 2009, pukul 09.00 WIB di kediamannya)

Kondisi tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Budi Sulistyono selaku Staf Subdin Perindustrian Kota Malang sebagai berikut:

“Pada umumnya para pengrajin keramik masih menggunakan manajemen sederhana. Pemilik usaha biasanya mengurus seluruh kegiatan usaha, mulai dari pencarian bahan baku, produksi atau masalah model barang yang akan diproduksi sampai dengan pemasaran. Hal inilah yang terkadang menyebabkan usaha menjadi ruwet karena tidak terkoordinir dengan baik”. (Wawancara hari Jumat, 11 September 2009, pukul 09.30 WIB di ruang kerjanya)

Dalam kesempatan tersebut, Bapak Budi Sulistyو juga mengatakan bahwa:

“Dari pemerintah sendiri mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bagi para pengrajin keramik, meskipun kegiatan tersebut tidak dapat rutin dilaksanakan tiap tahun karena harus bergantian dengan sektor lain”.

Hal tersebut juga diungkapkan Bapak Syamsul Arifin, selaku pemilik Cendera Mata Keramik berikut ini:

“Saya pernah mendapatkan pelatihan seperti yang anda maksud. Waktu itu terdapat pelatihan tentang manajemen usaha kecil, pemanfaatan pembukuan, juga pelatihan kepemimpinan. Disamping itu sebagian lagi mengkhususkan pada teknologi terapan keramik, seperti ragam desain misalnya”. (Wawancara hari Rabu, 07 Oktober 2009, pukul 16.00 WIB di kediamannya)

Senada dengan penjelasan Bapak Syamsul, Ibu Sri Handayani pemilik Han’s Keramik menjelaskan sebagai berikut:

“Perhatian terhadap sumber daya manusia menurut saya termasuk yang paling sering pelatihannya. Biasanya topiknya itu seputar pemahaman teknik-teknik marketing, cara-cara pengelolaan usaha yang tepat, mengurus manajemen, segi desain, sampai pada pengelolaan bahan baku”. (Wawancara hari Kamis, 8 Oktober 2009, pukul 15.00 WIB di Yan’s Keramik)

Adapun materi yang diberikan oleh Disperindag Kota Malang terhadap industri kecil keramik Dinoyo dari program-program diatas dapat dilihat dalam Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16

**Materi dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Tahun 2008**

Materi	Instansi	Frekuensi
1) Manajemen		
- Organisasi	Disperindag dan Pemkot Malang	2 kali
- Pemasaran	Disperindag dan Pemkot Malang	2 kali
- Produksi	Disperindag dan BPTIK	2 kali
2) Teknologi Produksi	Disperindag dan BPTIK	1 kali
3) Kewirausahaan	Disperindag Kota Malang	1 kali
4) Studi Banding	Disperindag Kota Malang	1 kali

Sumber: Sub Dinas Perindustrian, Disperindag Kota Malang 2008

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, pembinaan manajemen ternyata paling diperlukan oleh para pengrajin keramik Dinoyo. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya frekuensi diadakannya pembinaan tersebut. Semakin banyak materi dari suatu program pembinaan dilaksanakan, itu menandakan bahwa program pembinaan tersebut sangat dibutuhkan oleh pengrajin keramik Dinoyo.

## 2) Pengembangan Teknologi Produksi

Salah satu hal yang cukup penting dalam pengembangan teknologi produksi industri kecil adalah alat produksi. Selama ini kecenderungan yang terjadi bahwa peralatan yang digunakan oleh industri kecil utamanya para pengrajin keramik adalah peralatan yang masih sederhana, sehingga proses produksi yang dihasilkan cukup lama, mutu yang dihasilkan kurang maksimal dan kurang efisien. Untuk memperlancar proses produksi salah satu yang diupayakan pihak Disperindag ialah dengan memberikan bantuan peralatan.

Tujuan diberikannya bantuan peralatan tersebut adalah untuk sarana sosialisasi penggunaan teknologi tepat guna. Khusus untuk industri kecil keramik Dinoyo, pemberian bantuan peralatan dimulai sejak tahun 2001. Alat yang pertama diberikan adalah kompresor pada tahun 2001, Disperindag Kota Malang telah memberikan kompresor tersebut kepada salah satu pengrajin keramik Dinoyo sebagai perwakilan. Karena pengrajin keramik ini dinilai mempunyai prospek yang bagus untuk kedepannya, maka pada tahun 2003 Disperindag Kota

Malang kembali memberikan bantuan peralatan berupa Boilmail (penggilingan bahan). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Budi Sulistyono selaku Staf Subdin Perindustrian yaitu sebagai berikut:

“Disperindag telah memberikan bantuan alat berupa kompresor dan boilmail, karena pengrajin mempunyai prospek bagus untuk lebih mengembangkan industri keramik mengingat untuk membeli peralatan akan sangat mahal khususnya bagi industri kecil”. (Wawancara hari Jumat, 11 September 2009, pukul 09.30 WIB di ruang kerjanya)

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Syamsul Arifin, salah seorang pengrajin keramik Dinoyo yang telah memperoleh bantuan alat kompresor pada tahun 2001 sebagai berikut:

“Saya telah memperoleh bantuan dari Disperindag berupa sebuah kompresor yang cukup membantu sekali dalam peningkatan usaha saya, karena kompresor tersebut membantu dalam peningkatan hasil produksi dan mutu dari keramik yang dihasilkan”. (Wawancara hari Rabu, 07 Oktober 2009, pukul 16.00 WIB di kediamannya)

Peralatan tersebut dipakai secara bersama-sama oleh pengusaha keramik karena Disperindag hanya dapat memfasilitasi peralatan dan juga memberikan pelatihan secara terbatas. Dalam pelaksanaan program pengembangan teknologi produksinya, Disperindag Kota Malang sangat mengharapkan pengrajin industri kecil keramik Dinoyo untuk dapat lebih meningkatkan mutu produksi, serta sebagai sosialisasi penggunaan teknologi tepat guna agar dimanfaatkan secara optimal oleh pengusaha kecil. Wawancara dengan Bapak Siono, pemilik SN Keramik menjelaskan bahwa:

“Disini pernah ada bantuan peralatan berupa kompresor dari Disperindag. Saat ini berada dan untuk di pakai di paguyuban, karena ini untuk kebutuhan bersama jadi setiap anggota yang membutuhkan tentu dapat menggunakannya. Seingat saya waktu itu bertepatan dengan pemilu presiden, sekitar tahun 2004-an”. (Wawancara hari Kamis, 8 Oktober 2009, pukul 10.00 WIB di SN Keramik)

Kemudian pada tahun 2007 Disperindag memberikan bantuan tungku dengan bahan bakar elpiji. Sebelumnya para pengrajin keramik

Dinoyo ini rata-rata menggunakan tungku dengan bahan bakar kayu, sehingga yang terjadi asapnya mencemari lingkungan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Soeharto, salah seorang pengrajin keramik Dinoyo yang telah memperoleh bantuan tungku dengan bahan bakar elpiji pada tahun 2007 sebagai berikut:

“Saya pernah mendapatkan bantuan alat berupa tungku dengan bahan bakar elpiji. Pemberian tungku tersebut dikarenakan pembakaran menggunakan tungku dengan bahan bakar solar ternyata bisa mencemari lingkungan”. (Wawancara hari Sabtu, 10 Oktober 2009, pukul 09.00 WIB di kediamannya)

Hal tersebut dibenarkan oleh pihak Disperindag Kota Malang melalui Bapak Budi Sulistyono berikut ini:

“Kami memang memberikan bantuan peralatan berupa tungku dengan bahan bakar elpiji. Bantuan tersebut bermula dari adanya pencemaran udara dikarenakan sisa pembakaran dengan bahan bakar solar. Dengan memakai bahan bakar elpiji, pencemaran dapat diminimalisir dan juga proses pembakaran keramik bisa lebih efisien waktu”. (Wawancara hari Jumat, 11 September 2009, pukul 09.30 WIB di ruang kerjanya)

Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan data mengenai pemberian bantuan peralatan oleh Disperindag Kota Malang kepada pengrajin keramik Dinoyo pada Tabel 17:

**Tabel 17**

**Distribusi Bantuan Peralatan oleh Disperindag Kota Malang  
Kepada Pengrajin Keramik Dinoyo**

Tahun	Nama Alat	Yang Menerima
2001	• Kompresor	• Paguyuban Keramik Dinoyo
2003	• Boilmail (penggilingan bahan)	• Paguyuban Keramik Dinoyo
2007	• Tungku Bahan Bakar Elpiji	• Pengrajin Keramik Dinoyo
2008	• Molen	• Paguyuban Keramik Dinoyo
2009	• Jensek	• Paguyuban Keramik Dinoyo

Sumber: Paguyuban Keramik Dinoyo 2009

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dalam pemberian bantuan peralatan, Disperindag tidak mampu memberikan bantuan kepada seluruh pengrajin keramik Dinoyo dan rutin tiap tahunnya, hal ini dikarenakan adanya kendala anggaran yang terbatas.

### 3) Promosi Pemasaran

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang dalam hal pemasaran adalah dengan mengikutsertakan industri keramik Dinoyo dalam berbagai pameran, baik tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional. Hal ini sebagaimana dikatakan Bapak Budi Sulistyono selaku Staf Subdin Perindustrian yaitu:

“Untuk membantu industri kecil khususnya pengrajin keramik di Malang, pihak Disperindag pernah mengikutsertakan mereka untuk mengikuti pameran baik tingkat lokal, regional maupun nasional. Dalam mengikutsertakan industri kecil ke pameran, kita dari Disperindag memilih secara bergantian industri kecil untuk ditampilkan agar terjadi pemerataan khususnya untuk produk industri yang menjadi unggulan Kota Malang”. (Wawancara hari Jumat, 11 September 2009, pukul 09.30 WIB di ruang kerjanya)

Berikut data mengenai pameran yang telah diikuti oleh pengrajin keramik Dinoyo dalam beberapa tahun terakhir:

**Tabel 18**  
**Pameran Yang Pernah Diikuti Pengrajin Keramik Dinoyo**

No	Nama Pameran	Tempat
1.	Malang Kembali	Malang
2.	Gebyar Produk Kerajinan Khas Malang	Malang
3.	Pekan Raya Malang	Malang
4.	Surabaya Ekspo	Surabaya
5.	Pameran Keramik dan Bahan Bangunan	Surabaya
6.	Ina Craft	Jakarta
7.	ICRA	Jakarta
8.	PPE	Jakarta
9.	Smesco	Jakarta
10.	Perth Royal Show	Australia

Sumber: Paguyuban Keramik Dinoyo 2009

Sedangkan jangkauan pemasaran dari industri kecil keramik Dinoyo dapat dilihat pada Tabel 19 berikut ini:

**Tabel 19**  
**Jangkauan Pemasaran Industri Kecil Keramik Dinoyo**

No.	Daerah Pemasaran	Kota/Negara Pemasaran
1.	Dalam Negeri	
	- Jawa	Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan kota di Jawa Timur seperti Ponorogo, Madiun, Kediri, dsb.
	- Bali	Denpasar dan sekitarnya
	- Kalimantan	Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan
	- Sumatera	Palembang, Lampung, Pekanbaru, Jambi
	- Sulawesi	Ujung pandang, Palu
	- Nusa Tenggara	Lombok dan sekitarnya
2.	Luar Negeri	
	- Asia	Malaysia, Singapura
	- Eropa	Jerman, Belanda
	- Australia	Australia

Sumber: Sub Dinas Perindustrian, Disperindag Kota Malang 2008

Usaha lain yang dilakukan Disperindag Kota Malang dalam mengembangkan kegiatan promosi terhadap produk-produk industri kecil adalah dengan membuat program pengembangan sistem informasi dimana salah satu kegiatannya berupa penyediaan sarana internet guna akses informasi pengembangan pasar. Untuk mewujudkan hal tersebut, Disperindag melakukan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi, salah satunya dengan LPM Unibraw untuk membuat *website* yang memuat data-data potensi industri dan perdagangan termasuk industri kecil di Malang yang memiliki potensi bagus.

Kerjasama dengan LPM Unibraw ini berdampak positif, dimana salah satu industri kecil Kota Malang diundang pemerintah Jepang untuk ikut pameran. Pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Syamsul Arifin yaitu:

“Saya pernah diundang mengikuti event pameran di Jepang bersama dengan pengusaha-pengusaha industri kecil keramik yang lain yang didampingi oleh LPM Unibraw dengan memamerkan produk keramik berupa: keramik berukuran besar dengan motif kaligrafi, keramik lampu hias, serta keramik cendera mata ukuran

kecil". (Wawancara hari Rabu, 07 Oktober 2009, pukul 16.00 WIB di kediamannya)

Upaya yang dilakukan Disperindag Kota Malang ini mampu memberikan dampak yang positif terhadap jangkauan pemasaran yang dilalui oleh industri kecil keramik Dinoyo. Pemasarannya tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat Malang saja, tetapi juga mencakup kota-kota besar di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali dan Sulawesi.

Bahkan selain menembus pasaran domestik, produk keramik Dinoyo juga menembus pasar internasional. Produk industri keramik Tanah Agung misalnya telah menembus pasar Asia seperti Malaysia, Singapura, dan juga pasar Eropa.

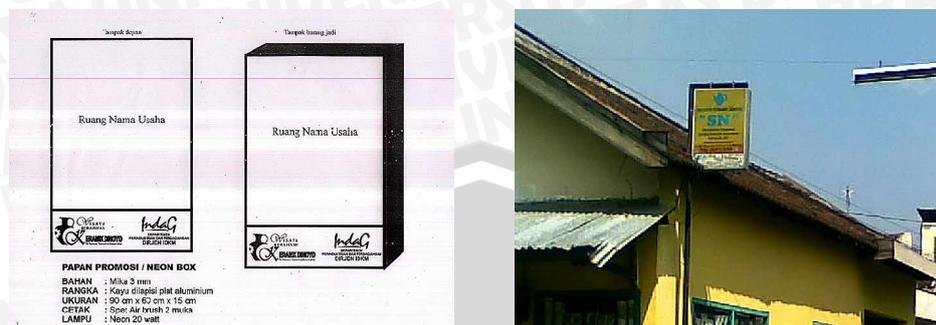
Selain mengikutkan para pengrajin keramik ke pameran, Disperindag Kota Malang juga memberikan bantuan berupa rak promosi produk, papan promosi/neon box, dan katalog wisata kerajinan keramik Dinoyo. Untuk lebih lengkapnya, gambar dari masing-masing bantuan sarana promosi tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

**Gambar 7**

**Rak Promosi Produk**



Gambar 8  
Papan Promosi/Neon Box



Gambar 9  
Katalog Wisata Kerajinan Keramik Dinoyo



#### 4) Pembinaan Permodalan

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang untuk meningkatkan industri kecil keramik Dinoyo adalah melalui pembinaan terhadap permodalan. Walaupun sejak era reformasi pihak Disperindag tidak lagi memberikan bantuan modal secara langsung, seperti adanya dana bergulir, tetapi bukan berarti tidak ada upaya dari Disperindag untuk melakukan pembinaan terhadap permodalan industri kecil keramik Dinoyo. Kegiatan yang dilakukan oleh Disperindag dalam pembinaan permodalan adalah dengan memberikan informasi bantuan modal atau kredit dari lembaga-lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, seperti koperasi. Informasi bantuan ini juga meliputi pemberian konsultasi tentang pengajuan proposal, yaitu bagaimana pengajuan proposal yang baik kepada lembaga keuangan yang ada. Hal

ini di dukung pernyataan dari Bapak Syahsin Ruba'i selaku Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yaitu sebagai berikut:

“Untuk membantu pengrajin keramik Dinoyo dalam hal permodalan, pihak Disperindag memberikan informasi kepada pengrajin industri keramik terhadap lembaga-lembaga keuangan yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan bantuan modal. Selain itu kami juga memberikan petunjuk atau pengarahan tentang bagaimana pengajuan proposal yang baik untuk mendapatkan modal dari lembaga keuangan tersebut”. (Wawancara hari Kamis, 10 September 2009, pukul 10.00 WIB di ruang kerjanya)

Namun dalam kenyataannya pembinaan permodalan yang dilakukan Disperindag Kota Malang tidak mendapat respon penuh dari para pengrajin keramik Dinoyo. Hanya sebagian pengrajin saja yang berani meminjam ke bank, hal ini disebabkan mereka pesimis untuk bisa mendapatkan bantuan modal dari lembaga keuangan tersebut karena mereka tidak memiliki jaminan atau agunan untuk mendapatkan modal tersebut dan kebanyakan usaha mereka tidak memiliki legalitas usaha. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Soeharto selaku pengrajin dan pemilik Soeharto Keramik sebagai berikut:

“Untuk menjalankan industri keramik ini, saya menggunakan modal pribadi saya sendiri. Disperindag telah menyarankan untuk melakukan pinjaman ke bank, tapi saya tidak berani meminjam ke bank karena tidak mempunyai jaminan untuk membayarnya”. (Wawancara hari Sabtu, 10 Oktober 2009, pukul 09.00 WIB di kediamannya)

Sementara Bapak Syamsul Arifin selaku pemilik Cenderamata Keramik mengatakan:

“Pertama saya mendirikan usaha ini menggunakan modal sendiri 70%, setelah usaha saya berkembang mulailah saya meminjam modal kepada bank menggunakan jaminan sertifikat tanah (akte), tetapi dalam meminjam modal tersebut tidak ada kekhususan bagi pengrajin industri kecil seperti saya”. (Wawancara hari Kamis, 8 Oktober 2009, pukul 09.00 WIB di Cenderamata Keramik)

Kemudian Bapak Syamsul Arifin menambahkan bahwa:

“saat ini dalam menjalankan usaha saya, saya menggunakan modal sendiri sebesar 40% dan 60% dari pinjaman bank. Saya belum

berani menggunakan 100% pinjaman dari bank karena resikonya besar”. (Wawancara hari Kamis, 8 Oktober 2009, pukul 09.00 WIB di Cenderamata Keramik)

Dengan kondisi tersebut, para pengrajin keramik Dinoyo melalui paguyuban keramik Dinoyo sepakat untuk tidak menerima bantuan modal dalam bentuk uang terutama dari pemerintah, melainkan bantuan dalam bentuk barang, misalnya bantuan peralatan, dan lain-lain. Hal tersebut menurut Bapak Soeharto selaku pengrajin sekaligus pemilik Soeharto Keramik mempunyai alasan sebagai berikut:

“Waktu Disperindag memberikan bantuan modal dalam bentuk uang, ketika sampai di tangan pengrajin uang tersebut jarang yang digunakan untuk menambah modal usahanya, melainkan untuk kepentingan pribadi”. (Wawancara hari Sabtu, 10 Oktober 2009, pukul 09.00 WIB di kediamannya)

Dari kondisi tersebut Bapak Soeharto menambahkan bahwa:

“Dari pengalaman tersebut, saat ini para pengrajin keramik melalui paguyuban keramik Dinoyo sepakat untuk tidak menerima bantuan dalam bentuk uang, namun lebih ke barang, seperti alat-alat produksi”.

Pihak Disperindag sendiri membenarkan hal tersebut, hal ini sebagaimana diungkapkan Bapak Budi Sulistyono selaku Staf Subdin Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sebagai berikut:

“Disperindag saat ini memang tidak memberikan bantuan modal dalam bentuk uang. Selain karena anggarannya terbatas, pemberian uang sering diselewengkan penggunaannya. Sehingga pihak Disperindag hanya memberikan informasi dan pengarahan kepada pengrajin keramik tentang lembaga-lembaga keuangan guna mendapatkan bantuan modal”. (Wawancara hari Jumat, 11 September 2009, pukul 09.30 WIB di ruang kerjanya)

##### **5) Pengadaan Bahan Baku**

Sarana yang sangat menunjang proses produksi adalah tersedianya bahan baku. Bahan baku merupakan suatu sarana untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh industri kecil keramik Dinoyo, maka kebijakan yang diberikan oleh Disperindag Kota Malang adalah dengan melakukan kemitraan bersama dengan BPTIK (Balai Pelayanan Teknis

Industri Keramik). BPTIK merupakan sebuah wadah khusus yang didirikan untuk melayani dan membantu pengusaha keramik di Malang dalam berbagai bentuk, seperti penyediaan bahan baku yang berkualitas, melakukan uji terhadap mutu produk keramik, memberikan penyuluhan, serta berperan sebagai konsultan bagi permasalahan seputar industri keramik. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan para pengrajin tidak kesulitan dalam memperoleh bahan baku berkualitas serta produk yang dihasilkan industri kecil keramik memiliki kualitas bagus sehingga mampu bersaing di pasaran.

Seperti yang diungkapkan Bapak Soeharto, pemilik Soeharto Keramik berikut ini: *“Untuk bahan bakunya kami mengambilnya di Balai. Jadi kita semua ikut disana dan mendapatkannya dalam keadaan standar”*. (Wawancara hari Sabtu, 10 Oktober 2009, pukul 09.00 WIB di kediamannya)

Senada dengan Bapak Soeharto, Bapak Siono, pengrajin sekaligus pemilik SN Keramik menyatakan bahwa: *“Saya biasa membeli bahan baku di BPTIK, disana sudah menyediakan yang setengah jadi, jadi untuk proses produksinya tinggal melanjutkan sisanya”*. (Wawancara hari Kamis, 8 Oktober 2009, pukul 10.00 WIB di SN Keramik)

**b) Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Proses Pemberdayaan yang Dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang**

Industri kecil merupakan industri kerakyatan, yang jika dikembangkan dengan baik maka disamping akan meningkatkan perekonomian para pengrajin industri kecil tersebut, juga secara tidak langsung akan berpengaruh dalam peningkatan perekonomian daerah. Dalam melakukan pemberdayaan industri kecil, khususnya industri kecil keramik Dinoyo, Disperindag Kota Malang mempunyai beberapa faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut yaitu:

## 1) **Faktor Pendukung**

Faktor pendukung dalam upaya pemberdayaan industri kecil keramik Dinoyo yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang adalah sebagai berikut:

### a. **Lokasi Industri yang Strategis**

Sebenarnya jika pemerintah jeli melihat peluang yang ada, faktor lokasi serta keberadaan industri kecil keramik ini sudah merupakan modal tersendiri dalam pengembangan industri kecil keramik agar bisa lebih meningkatkan produksinya. Bapak Syamsul Arifin yang merupakan pengrajin sekaligus ketua paguyuban keramik Dinoyo ini menyatakan bahwa:

“Keberadaan industri kecil keramik Dinoyo ini sangat strategis, untuk menuju sini pun tidak susah. Selain letaknya tidak jauh dari jalan raya dan pusat keramaian, keberadaan industri kecil keramik Dinoyo ini juga banyak yang tahu sehingga bagi para pengunjung yang ingin kesini tidak perlu bingung”.(Wawancara hari Kamis, 8 Oktober 2009, pukul 09.00 WIB di Cenderamata Keramik)

Kemudian untuk lebih mengenalkan produk dari industri kecil keramik Dinoyo ini, pemerintah juga mengadakan semacam kegiatan pameran dan iklan-iklan. Hal ini akan membuat masyarakat tertarik untuk melihat dan membeli hasil kerajinan tersebut.

### b. **Kualitas Produk yang Sudah Dikenal Masyarakat**

Selain lokasi yang strategis, kerajinan keramik Dinoyo merupakan salah satu sentra industri kecil yang kualitas produknya sudah terkenal hampir keseluruhan lapisan masyarakat. Produknya yang berupa keramik hias dan souvenir keramik banyak dipesan oleh beberapa konsumen misalnya untuk souvenir pernikahan atau untuk dipajang dirumah. Pemesan keramik ini banyak juga yang berasal dari Jakarta, Bandung, Surabaya, dan juga luar Jawa.

Dengan adanya hal ini maka sangat mudah bagi pihak Disperindag Kota Malang dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pengrajin industri keramik Dinoyo ini. Karena jika dilihat dari kualitas produknya dan harganya juga terjangkau bagi masyarakat kalangan atas dan kalangan bawah

sehingga produk yang dihasilkan pengrajin industri keramik Dinoyo ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas tidak hanya masyarakat Malang tetapi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Soeharto:

“Kerajinan keramik ini sudah dikenal masyarakat luas, jadi Disperindag Kota Malang dan pengusaha-pengusaha industri keramik ini akan bekerja sama agar lebih menggali potensi dari produk industri keramik ini”. (Wawancara hari Sabtu, 10 Oktober 2009, pukul 09.00 WIB di kediamannya)

## 2) Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat/kendala dalam upaya pemberdayaan industri kecil keramik Dinoyo yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang adalah sebagai berikut:

### a. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Kendala yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan industri kecil keramik Dinoyo adalah kendala yang berasal dari para pengrajin itu sendiri. Pada umumnya mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak terlalu tinggi, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan dan daya tangkap akan program-program pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah, utamanya Disperindag Kota Malang. Hal ini juga menyebabkan tujuan pemberdayaan yang ditargetkan oleh pemerintah tidak dapat tercapai secara optimal.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Budi Sulisty, Staf Subdin Perindustrian Kota Malang berikut ini:

“Biasanya para pengrajin mempunyai pendidikan yang rendah, bahkan banyak yang hanya lulus SD. Hal tersebut berpengaruh terhadap daya tangkap mereka terhadap materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang kami adakan”. (Wawancara hari Selasa, 06 Oktober 2009, pukul 09.00 WIB di ruang kerjanya)

Bapak Siono, pengrajin sekaligus pemilik SN Keramik juga mengatakan bahwa:

“Para pekerja saya rata-rata tidak memiliki latar belakang pendidikan formal yang tinggi, yang tertinggi hanya lulusan SMA, bahkan ada yang hanya lulusan SD. Biasanya mereka itu saya tempatkan di bagian yang lebih mengutamakan tenaga dari pada keterampilan. Seperti pada bagian

penggajian. Pada bagian ini keterampilan memang dibutuhkan, tapi biasanya mereka mendapat keahlian dalam menggengaji dari pengalaman dan belajar dari orang-orang yang telah berpengalaman, dan bukan karena pendidikan formal”. (Wawancara hari Kamis, 8 Oktober 2009, pukul 10.00 WIB di SN Keramik)

Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh sebagian besar pengrajin keramik ini juga berpengaruh terhadap pola pikir dan pola hubungan dengan pihak luar, sehingga akses terhadap informasi sangat kurang. Terkadang mereka juga kurang merespon kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan pemerintah. Mereka beranggapan bahwa kegiatan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap perkembangan usaha yang mereka jalankan maupun perbaikan nasib mereka sendiri. Tanpa adanya hubungan timbal balik yang baik antara pemerintah dengan para pengrajin keramik, tentunya keberhasilan dari kegiatan pemberdayaan akan sulit untuk dicapai. Keterbatasan terhadap akses informasi juga menyebabkan mereka kesulitan dalam mengamati perubahan dan peluang pasar serta kurang memahami perubahan sifat (selera) dan perilaku masyarakat yang menjadi konsumen dari produk yang mereka hasilkan.

#### **b. Kurangnya Faktor Modal**

Untuk memperoleh kelancaran usahanya, setiap pengrajin keramik selalu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Modal merupakan faktor yang cukup penting karena dengan adanya modal maka kebutuhan untuk menjalankan usaha tidak akan mengalami hambatan, terutama untuk pembelian bahan baku serta kebutuhan untuk membeli peralatan lainnya. Namun selama ini para pelaku industri kecil, khususnya para pengrajin keramik Dinoyo selalu dihadapkan pada modal yang cukup terbatas.

Permasalahan modal ini sebenarnya merupakan faktor klasik dalam menjalankan suatu usaha. Selama ini para pengrajin keramik kesulitan untuk mencari tambahan modal usahanya, untuk melakukan pinjaman ke bank, banyak pengrajin yang mengalami kesulitan karena tidak mempunyai jaminan atau agunan karena kebanyakan usaha mereka masih belum memiliki

ijin usaha atau belum terdaftar. Hal tersebut membuat pihak bank menjadi terlalu beresiko untuk memberikan pinjaman ataupun bantuan modal kepada pihak pengrajin dengan pertimbangan ketidakpastian usaha yang berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pinjaman.

Disamping itu, pihak Disperindag Kota Malang sendiri juga tidak lagi memberikan bantuan modal karena sering mengalami penyelewengan dalam penggunaannya. Hal ini sebagaimana disampaikan Bapak Budi Sulistyو selaku Staf Subdin Perindustrian sebagai berikut:

“Dalam memberikan bantuan modal, pihak Disperindag Kota Malang sudah tidak pernah lagi melakukannya lagi, karena sebagian besar bantuan modal yang diberikan kepada pengusaha industri kecil tersebut, selain digunakan untuk membeli bahan baku untuk keperluan usahanya, modalnya juga digunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga pemberian modal tersebut kurang tepat sasaran”. (Wawancara hari Selasa, 06 Oktober 2009, pukul 09.00 WIB di ruang kerjanya)

### **c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pemasaran**

Dalam hal promosi dan pemasaran, diperlukan adanya dukungan dari sarana dan prasarana, mulai dari kelayakan jalan sebagai akses utama, maupun pameran sebagai sarana promosi. Selama ini para pengusaha industri kecil keramik Dinoyo merasa bahwa untuk sarana jalan masuk ke lokasi keramik Dinoyo itu terlalu sempit, tidak cukup ruang untuk lahan parkir, ditambah lagi kurangnya petunjuk promosi yang terdapat di jalan-jalan kota, sehingga konsumen terkesan mendapati kesulitan untuk datang ke lokasi keramik Dinoyo walaupun posisi keramik Dinoyo berada di pusat kota.

Selama ini pihak Disperindag Kota Malang juga masih kurang melibatkan industri kecil keramik Dinoyo untuk mengikuti pameran, hanya beberapa pengrajin saja yang pernah mengikuti pameran, sehingga pengusaha industri kecil keramik Dinoyo dalam memasarkan hasil keramiknya sering melalui pengepul atau tengkulak, dan ada juga konsumen yang langsung datang ke showroom. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Syamsul Arifin berikut ini:

“Untuk pemasaran hasil keramik saya, biasanya ada para pengepul yang datang untuk membeli dalam bentuk partai, selain itu ada juga pembeli yang

langsung datang ke showroom saya”. (Wawancara hari Kamis, 8 Oktober 2009, pukul 09.00 WIB di Cenderamata Keramik)

## **B. Pembahasan**

### **a) Analisis Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam rangka memberdayakan Industri Kecil Keramik Dinoyo**

Indonesia merupakan negara berkembang. Sebagai negara berkembang, pembangunan merupakan kegiatan yang menjadi prioritas utama yang dilaksanakan. Menurut Siagian (2003, h.4), pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Selain pembangunan fisik, pembangunan secara mental dan spiritual juga menjadi titik tekan dari pembangunan bangsa Indonesia seperti halnya dengan bangsa lain yang sedang berkembang, sedang melaksanakan pembangunan yang pada dasarnya mempunyai dua tujuan yaitu pembangunan bangsa (*nation building*) dan adanya kemajuan sosial ekonomi (*social economic progress*) masyarakat. Tujuan itu pula yang hendak dicapai bangsa Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Sehingga pada dasarnya pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan dimasa yang akan datang merupakan pekerjaan besar karena sifatnya yang multi dimensional.

Pembangunan di Indonesia saat ini dihadapkan pada suatu permasalahan yang sangat kompleks yaitu masalah kemiskinan. Dengan tingginya angka kemiskinan, hal itu berarti juga menggambarkan rendahnya taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Berbicara mengenai masalah ekonomi rakyat, tentunya tidak lepas dari pembicaraan tentang salah satu roda penggerak perekonomian rakyat, yaitu industri. Sektor industri mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan. Sektor industri juga tidak lepas dari usaha meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumber daya alam yang ada.

Namun dalam perkembangannya, sektor industri mengalami berbagai masalah. Diantaranya adanya iklim usaha yang kurang kondusif (regulasi yang overlap dan tidak efisien, ekonomi biaya tinggi, penyelundupan, dll),



terkonsentrasinya industri di Pulau Jawa, pemanfaatan teknologi yang masih rendah di tengah persaingan industri dunia yang semakin tajam, serta masih lemahnya peranan sektor industri kecil dan menengah (IKM).

Pada sektor industri, industri kecil dan UKM lebih banyak mendapat tantangan dan kendala. Bahkan tidak jarang keberadaannya mudah gulung tikar. Menurut Imam Hanafi dan Imam Hardjanto (2006, h.42), kendala/tantangan yang sering dihadapi oleh kebanyakan industri kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Kelemahan Struktural, yaitu kelemahan dalam struktur perusahaan semisal kelemahan manajemen, pengendalian mutu, penguasaan teknologi, permodalan dan terbatasnya akses pasar;
- 2) Kelemahan Kultural, yaitu merupakan kelemahan yang menyebabkan kelemahan-kelemahan kultural seperti: informasi peluang, informasi mendapatkan bahan baku, informasi pengembangan produk, dll.

Sangat disayangkan bila keberadaan industri kecil dan UKM ini hanya mampu bertahan sesaat saja. Hal ini mengingat peran dari industri kecil dan UKM ini dalam perekonomian Indonesia. Kedudukan industri kecil tidak hanya sebagai usaha bagi pemerataan pembangunan, tetapi juga sebagai struktur sosial yang dapat berproduksi dengan aktif dan merupakan mata pencaharian utama ataupun sampingan.

Begitu halnya yang terjadi di Kota Malang. Di Malang kondisi industri kecil juga mengalami penurunan. Secara keseluruhan, perkembangan sektor industri di Kota Malang tahun 2004-2008 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 20**  
**Perkembangan Industri di Kota Malang Tahun 2004-2008**

Uraian	Tahun				
	2004	2005	2006	2007	2008
Jml Perusahaan (unit)	53	27	21	27	22
Jml Tenaga Kerja (org)	2.842	1.641	1.396	837	2.164
Jml Investasi (Rp)	57.522.623	24.033.492	47.618.882.880	30.930.106	2.198.755.673
Nilai Produksi (Rp)	227.958.441	22.795.841	28.242.144,05	45.555.296	446.000.000

*Sumber: Bagian TU, Disperindag Kota Malang 2009*

Industri kecil keramik Dinoyo yang merupakan salah satu industri kecil unggulan Kota Malang dalam kenyataannya harus dihadapkan pada menurunnya jumlah pengrajin keramik yang ada di Kota Malang. Banyak diantara para pengrajin tersebut yang gulung tikar karena tidak mampu mempertahankan usahanya tersebut.

Langkah penanggulangan yang dilakukan pemerintah daerah, dalam hal ini melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang di wujudkan dalam upaya pemberdayaan industri kecil. Menurut Sulistiyani (2004, h.79), “pemberdayaan adalah upaya membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya”.

Sulistiyani (2004, h.81) juga menyebutkan bahwa “tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut”. Kemudian untuk mencapai tujuan pemberdayaan itu diperlukan pemikiran yang matang melalui program-program yang rinci dan bertahap.

Untuk meningkatkan potensi industri kecil, Pemerintah Kota Malang mengadakan program pemberdayaan industri kecil yang terdiri atas kegiatan-kegiatan pembinaan, penyuluhan dan pelatihan, penyediaan bantuan peralatan dan produksi, serta bantuan modal untuk pengembangan usaha. Semua tanggung jawab dari kegiatan tersebut dipercayakan pada bidang perindustrian yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang yang nantinya akan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota Malang.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang sebagai bagian dari perangkat daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berkewajiban menyusun sebuah Renstra Dinas dimana secara umum dapat dimaksudkan untuk memberikan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Malang. Secara khusus renstra perangkat daerah berfungsi sebagai payung program bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh perangkat daerah sehingga dapat menjadi media akuntabilitas kinerja dinas kepada Pemerintah Kota

(Pemkot) Malang. Penyusunan renstra tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan hasil sebuah rencana yang partisipatif, transparan, akuntabel dan komprehensif sehingga dapat menjadi media penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2008, yang menjadi tugas pokok dari Disperindag ini adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.

Program pemberdayaan industri kecil yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang yang meliputi kegiatan-kegiatan pembinaan, penyuluhan dan pelatihan, penyediaan bantuan peralatan dan produksi, bantuan modal untuk pengembangan usaha dan lain sebagainya pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari kebijakan pembangunan melalui pendekatan yang *bottom-up*.

Menurut Korten dalam Sulistiyani (2004, h.37), pendekatan *bottom-up* adalah pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai pusat pembangunan atau pusat perubahan sehingga terlibat di dalam proses perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai *people centre development*. Pendekatan *bottom-up* tersebut merupakan pendekatan yang berusaha menumbuhkan keberdayaan kepada masyarakat dan menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan, bukan lagi sebagai objek pembangunan. Jadi disini jelas bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang ini ingin menumbuhkan dan memotivasi para pengrajin keramik Dinoyo ini agar lebih mampu lagi bersaing dalam dunia usaha, mampu mengembangkan usaha dan tentunya diharapkan para pengrajin keramik ini nantinya bisa mandiri.

Dalam pelaksanaan program tersebut masih belum terlihat adanya partisipasi pengrajin keramik yang besar. Kebanyakan dari pengrajin keramik di Dinoyo ini hanya menunggu adanya pemberdayaan dari pemerintah, walaupun sesekali mereka juga ikut berpartisipasi yang diwakili paguyuban keramik Dinoyo sebagai perantara dengan pemerintah untuk menciptakan program pemberdayaan yang cocok.

Kondisi diatas dalam fase pemberdayaan dikategorikan sebagai Fase Parsipatoris (Pranarka dan Prijono dalam Hardjanto, 2008, h.26). Dalam fase ini,

pengrajin keramik Dinoyo di ibaratkan sebagai masyarakat. Sementara proses pemberdayaan dalam fase parsipatoris ini berasal dari pemerintah bersama masyarakat, dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam pembangunan untuk menuju kemandirian. Peran pemerintah semakin dikurangi dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

Dengan adanya program pemberdayaan ini diharapkan para pengrajin industri kecil keramik Dinoyo dapat mandiri, mampu mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi dan mampu memecahkan masalahnya. Lebih lanjut Menurut Kartasmita (1996, h.152), menjelaskan bahwa:

“pemberdayaan pada hakekatnya berada pada diri manusia, sedangkan faktor luar manusia hanyalah berfungsi sebagai stimulus, perangsang munculnya semangat, rasa atau dorongan pada diri manusia untuk memberdayakan dirinya sendiri, untuk mengendalikan dirinya sendiri, untuk mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya”.

Jadi memang para pengrajin industri kecil keramik Dinoyo lah yang harus mengetahui potensi dan masalah apa yang mereka punyai sehingga nantinya mereka mampu mandiri tanpa campur tangan pemerintah sepenuhnya.

Dilihat dari program pemberdayaan yang di buat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang ini sebenarnya sudah cukup untuk diterapkan di ranah industri kecil. Hal ini dikarenakan program-program tersebut dilaksanakan juga atas partisipasi dari kalangan industri kecil itu sendiri, sehingga mereka mengerti betul apa yang mereka butuhkan untuk menjalankan dan mempertahankan usahanya. Jadi keberhasilan dari program pemberdayaan ini sangat wajar untuk dicapai mengingat program tersebut merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dan pelaku industri kecil dalam hal ini industri kecil keramikDinoyo.

### **1) Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Keterbatasan SDM merupakan salah satu kendala serius bagi banyak UKM di Indonesia, terutama dalam aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, kualitas desain, kualitas kontrol, organisasi bisnis, akuntansi, proses data, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Sementara semua keahlian ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau

memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru (Irianto, 1996).

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan adalah tentang penciptaan SDM dari segi kualitasnya. Tidak dapat dipungkiri, adanya persaingan bisnis menuntut sebuah usaha yang bersifat responsif, baik secara teknis maupun non teknis sehingga diperlukan adanya tahap-tahap pembinaan dan pengembangan SDM yang berkesinambungan. Kemampuan manajerial yang tepat perlu ditunjang dengan keterampilan dasar yang benar supaya nantinya akan tercipta suatu pola variasi penciptaan produk dengan nilai jual yang lebih tinggi. Semua itu perlu dicoba oleh para pengusaha industri kecil keramik Dinoyo sebagai langkah berkelanjutan dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Dampaknya memang tidak bisa dirasakan secara langsung, namun di masa mendatang kualitas pengusaha industri kecil keramik Dinoyo akan semakin meningkat, seiring berjalannya pola pembinaan tersebut, berupa status pegawai yang tidak lagi sebagai pekerja kasar melainkan tenaga kerja yang ahli, terampil, inovatif, dan mampu bersaing.

Pada upaya peningkatan kemampuan sumberdaya manusia sebagaimana pendapat Prawirokusumo (2001, h.97), pembinaan dan pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dilakukan dengan memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, meningkatkan keterampilan teknis manajerial, membentuk dan mengembangkan pentingnya upaya promosi, pembinaan dan penyuluhan tentang kewirausahaan, membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha kecil serta menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil.

Upaya yang dilakukan Disperindag Kota Malang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia meliputi:

a. Diklat (Pendidikan dan Pelatihan)

Salah satu bentuk usaha dalam mengembangkan sumber daya manusia ini, Disperindag Kota Malang mengadakan diklat. Diklat ini

bertujuan agar para pengrajin industri kecil keramik Dinoyo memiliki ketrampilan yang lebih terutama yang bersifat *technical skill*. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil pada Pasal 17, yang menyebutkan bahwa salah satu cara yang harus ditempuh dalam mengembangkan sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial.

Diklat yang sering diberikan oleh Disperindag Kota Malang adalah Diklat manajemen karena selama ini salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku industri kecil pada umumnya adalah kelemahan dalam mengelola industri kecil, baik pada waktu proses produksi maupun pada saat memasarkan hasil industri kecil. Sedangkan materi yang diberikan meliputi pelatihan teknologi industri, baik itu desain keramik maupun penawaran serta diversifikasi produk. Selain itu materi lain yang diberikan adalah pelatihan manajemen yang terdiri dari gugus kendali mutu (GKM), motivasi, serta teknik dalam memasarkan hasil produksi.

Diklat yang diberikan oleh Disperindag Kota Malang ini sayangnya hanya bersifat temporer, artinya diklat tersebut tidak bisa dilakukan secara rutin. Hal tersebut dikarenakan Disperindag Kota Malang harus bergantian dengan instansi lain.

b. Studi Banding

Studi banding merupakan salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia yang bentuknya lebih konkrit. Hal ini dikarenakan dalam studi banding para pengrajin keramik Dinoyo bisa mengetahui sejauh mana perkembangan dari para pengrajin keramik di daerah lain, sehingga para pengrajin keramik Dinoyo lebih mudah memahaminya dan diharapkan akan terjadi suatu pemahaman ilmu kepada para pengrajin keramik Dinoyo sehingga nantinya dapat diterapkan dalam mengelola industri keramik yang pada akhirnya dapat terjadi peningkatan terhadap hasil dan mutu produksinya.

c. **Pembinaan Manajerial**

Agar industri kecil keramik Dinoyo bisa berkembang dengan baik maka dibutuhkan suatu manajemen yang lebih profesional dengan mengedepankan aspek administrasi yang rapi dan teratur. Hal ini dilakukan dengan jalan diadakan pembinaan di bidang manajerial. Kegiatan pembinaan terhadap industri kecil keramik yang diarahkan pada aspek manajerial atau pengelolaan usaha telah ditempuh lewat peningkatan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, teknis manajemen serta kegiatan lainnya yang menunjang berkembangnya industri kecil keramik Dinoyo.

2) **Pengembangan Teknologi Produksi**

Rendahnya penguasaan teknologi modern juga merupakan suatu ancaman serius bagi kesanggupan UKM di Indonesia untuk dapat bersaing di dalam era pasar bebas nantinya, padahal di era tersebut faktor teknologi bersama-sama dengan faktor SDM akan menjadi faktor penting dari pada faktor SDA. Dengan kata lain, dua faktor keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia atau UKM pada khususnya selama ini, yaitu ketersediaan berbagai ragam bahan baku dalam jumlah yang berlimpah serta upah tenaga kerja yang murah, akan menjadi semakin tidak berguna di masa mendatang karena tergantikan dua keunggulan kompetitif lainnya (teknologi dan SDM) (Tambunan, 2002).

Untuk menyiasati permasalahan tersebut, pemerintah kota melalui Disperindag Kota Malang mencoba memberikan solusi untuk membantu para pengusaha keramik Dinoyo dengan memberikan sarana dan prasarana berupa alat produksi yang memadai. Bantuan kompresor, boiler, molen, jenset penggerak, tungku dengan bahan bakar elpiji, berikut sosialisasi penggunaan alat secara benar hanya merupakan sebagian kecil upaya yang telah dilakukan. Maksud yang ingin dicapai adalah seiring meningkatnya kualitas SDM, maka diharapkan pula terjadi modernisasi teknologi dalam pemanfaatannya pada industri kecil, dalam hal ini industri kecil keramik Dinoyo.

### 3) Promosi Pemasaran

Dalam upaya untuk meningkatkan promosi dan pemasaran, senada dengan pendapat dari Prawirokusumo (2001, h.97), pembinaan dan pengembangan dalam bidang pemasaran adalah dengan melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran, meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran, penyediaan sarana serta dukungan promosi serta memasarkan produk usaha kecil. Dalam hal ini pihak Disperindag Kota Malang dengan mengikutsertakan pengrajin keramik Dinoyo dalam pameran, baik di tingkat lokal, regional, maupun tingkat nasional, walaupun intensitas dan jumlah pengrajin yang berkesempatan masih cukup kecil. Selain itu pihak Disperindag juga telah membuat *website* yang berisi tentang potensi industri kecil yang ada di Kota Malang.

Salah satu keberhasilan dalam pembinaan ini sebagaimana dikatakan oleh Bapak Budi Sulistyو selaku Staf Subdin Perindustrian yang menyatakan bahwa salah satu pengrajin keramik Dinoyo yang pernah mengikuti pameran ke Jepang pada tahun 2001. Hal senada juga didukung dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Syamsul Arifin yang memang pernah mengikuti pameran ke Jepang tersebut dengan para pengusaha lainnya.

### 4) Pembinaan Permodalan

Industri kecil keramik belum memiliki standar permodalan yang terpadu dan terarah. Beberapa pengusaha memulai usahanya benar-benar dari awal, yang kemudian setelah nantinya berhasil mengembangkan produksinya dapat memberikan jaminan yang cukup kuat dalam upaya memperoleh pinjaman modal. Sebagian kecil pengusaha lainnya cukup berani mengambil resiko dengan meminta bantuan dana melalui prosedur yang sebelumnya telah disosialisasikan oleh Disperindag Kota Malang.

Terkait dengan permodalan, peran Disperindag Kota Malang ini cenderung lebih menekankan terhadap pemberdayaan kelompok pengusaha itu sendiri. Secara kasat mata, tidak ada upaya yang benar-benar nyata untuk menunjang permodalan para pengusaha industri kecil keramik Dinoyo, seperti bantuan modal secara langsung dari Pemerintah Kota. Namun dengan

kebijakan tersebut diharapkan di masa mendatang para pengusaha tidak mengalami kesulitan dalam rangka menghadapi era globalisasi yang menuntut persaingan bebas.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa konsistensi keberadaan industri kecil keramik Dinoyo telah berhasil memajukan sentra bisnisnya, tidak hanya berorientasi pada pasar lokal, namun juga bersifat nasional. Dapat dikatakan bahwa peran Disperindag Kota Malang hanyalah suatu panduan dan tuntunan bagi para pengusaha untuk memperoleh pinjaman dana secara legal. Beranjak dari situ, jiwa bisnis para pengusaha memunculkan keuletan dan kegigihan dalam memajukan industrinya dengan tidak mengandalkan uluran tangan berupa bantuan dana dari pemerintah setempat. Semua itu memerlukan waktu yang tidak singkat, namun lambat laun para pengusaha dapat lebih memahami persaingan dunia bisnis, khususnya yang berkenaan dengan permodalan.

Masalah permodalan berkaitan dengan upaya pengembangan usaha. Selama ini pengusaha nyaris tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal (perbankan), sehingga sulit baginya untuk memperoleh kredit usaha. Kondisi tersebut dikarenakan sebagian besar pengusaha tidak memiliki jaminan/agunan sebagai syarat memperoleh bantuan modal di bank.

Hal tersebut senada dengan pernyataan Cahyono dan Adi (1983, h.87-88) bahwa:

“satu hal yang amat sering dijumpai adalah kurangnya barang jaminan yang perlu disediakan oleh pengusaha untuk memperoleh kredit bank. Padahal barang jaminan merupakan syarat yang penting dari bank, tidak hanya ketentuan perundang-undangan mengharuskan demikian, tetapi kurangnya keyakinan bank akan usaha calon debiturnya”.

Kalaupun ada diantara pengusaha tersebut yang mencari bantuan modal, maka lembaga keuangan tempat mereka mencari bantuan modal tersebut bersifat tidak formal dan umumnya berbiaya mahal. Segala kemudahan untuk peningkatan akses pengusaha kecil kepada lembaga keuangan, tampaknya sudah saatnya diwujudkan (Irianto, 1996).

Masih lemahnya kondisi permodalan yang dimiliki para pengusaha sehingga mereka tidak dapat mengembangkan usahanya secara maksimal. Maka upaya untuk mendorong dan memotivasi serta memfasilitasi dalam

peningkatan aksesibilitas pada permodalan kepada para pengusaha dalam meningkatkan kepercayaannya sangat diperlukan. Sebagaimana pendapat Kuncoro (1997, h.387), arah kebijakan untuk penyediaan modal perlu menentukan strategi yaitu melalui bantuan keuangan, bantuan teknis yang efektif, serta bantuan penjaminan, mengoptimalkan penunjukan bank dan lembaga keuangan mikro untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), mengoptimalkan realisasi *business plan* perbankan dalam pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK), serta memperkuat lembaga keuangan mikro untuk melayani masyarakat miskin diantaranya melalui koperasi.

#### 5) Pengadaan Bahan Baku

Pada aspek pengadaan bahan baku, sebagaimana pendapat Tambunan (2002), keterbatasan bahan baku seringkali menjadi salah satu kendala yang serius bagi pertumbuhan atau kelangsungan produksi bagi banyak UKM di Indonesia. Dalam memilih bahan baku, harus ditentukan jenis jasa penunjang yang diberikan, misalnya: (a) memudahkan perancangan jenis barang yang akan diproduksi; (b) memudahkan penyeleksian mesin dan bangunan (*machinery and plant*); (c) memberikan bantuan teknis dalam memecahkan berbagai masalah; dan (d) memudahkan penentuan harga dan perumusan pelaksanaan/pencarian kredit niaga (Cahyono dan Adi, 1983, h.100).

Berdasarkan upaya yang telah dilakukan oleh Disperindag Kota Malang, dapat dilihat adanya tingkat kepedulian yang cukup serius dalam menangani pengadaan bahan baku dari industri kecil keramik Dinoyo ini. Kemitraan bersama yang terjalin dengan BPTIK (Balai Pelaksana Teknis Industri Keramik) merupakan aplikasi nyata dalam usaha mempermudah para pengusaha industri kecil keramik Dinoyo untuk memperoleh bahan baku yang nantinya digunakan dalam proses produksi. Lokasi bahan baku yang relatif dekat merupakan faktor penunjang yang tidak kalah penting dalam pengembangan usaha. Masalah yang tersisa hanyalah bagaimana mengoptimalkan bahan baku yang sudah ada untuk kemudian diolah sebaik mungkin dengan harapan dapat meminimalkan biaya produksi dan memaksimalkan pendapatan produksi.

Untuk itulah peran BPTIK sebagai mitra kerja, harus dapat memfasilitasi para pengusaha industri kecil keramik Dinoyo untuk mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau.

**b) Faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang**

**1) Faktor Pendukung**

**a. Lokasi Industri yang Strategis**

Lokasi merupakan salah satu faktor penentu dalam kelangsungan dan perkembangan suatu usaha. Lokasi yang strategis akan membantu dalam proses pengenalan dan pemasaran sebuah produk hasil usaha. Menurut Cahyono dan Adi (1983, h.99), faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih lokasi adalah: pendekatan kepada angkatan kerja, tersedianya utilities, jenis perusahaan, hubungan dengan pasar, dan tersedianya transportasi. Industri kecil keramik Dinoyo ini terletak di Kelurahan Dinoyo yang merupakan kawasan ramai dilalui jalur perdagangan dan transportasi, selain itu kawasan Dinoyo ini juga terletak diantara universitas besar yang tentunya menyedot jumlah mahasiswa yang banyak baik dari dalam kota maupun luar kota.

Kondisi tersebut juga membuktikan bahwa lokasi juga mendekatkan produsen dalam hal ini pengrajin industri kecil keramik Dinoyo dengan pelanggannya maupun pasar. Informasi penting sering dapat diperoleh dari pelanggan dan pasar, hal ini sebagai sumber utama untuk variasi produk dan pelayanan. Struktur perusahaan kecil yang nyaris tidak terbirokratisasi memungkinkan secara cepat menangkap informasi ini karena posisinya tidak jauh dengan pelanggan dan pasar. Hasil produksi serta posisi geografis industri kecil merupakan kekuatan manajemennya. Produk dihasilkan sesuai dengan permintaan dan dengan mudah dapat dijangkau oleh pelanggannya. Situasi ini menyebabkan mekanisme produksi pemasaran menjadi efisien dan tidak memerlukan biaya yang tinggi.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Broom dan Longenecker dalam Irianto (1996, h.25), yang menyebutkan ada tiga kekuatan yang dimiliki industri kecil seperti yang disebutkan diatas, yakni:

1. *Knowledge of customers and markets* (Informasi dari pelanggan dan pasar).
2. *Product and geographic specialization* (Spesialisasi hasil produksi dan posisi geografis).
3. *Flexibility in management* (management yang fleksibel).

Dari kondisi tersebut tentunya industri kecil keramik Dinoyo ini sangat diuntungkan lokasi usahanya. Tinggal bagaimana peran pemerintah kota melalui Disperindag Kota Malang untuk lebih mengenalkan mereka ke kalayak ramai agar industri kecil keramik Dinoyo ini bisa lebih berkembang lagi.

#### **b. Kualitas Produk yang Sudah Dikenal Masyarakat**

Suatu hasil usaha akan diminati masyarakat bila memiliki kualitas produk yang memuaskan konsumennya, sehingga konsumenpun mempunyai kepercayaan terhadap produk tersebut. Para pengrajin keramik Dinoyo ini sangat memperhatikan masalah kualitas produknya, hal ini selain karena keramik Dinoyo merupakan salah satu produk unggulan Kota Malang, juga karena untuk menjaga kepercayaan konsumen terutama penikmat hasil seni.

Sebagaimana disebutkan Broom dan Longenecker dalam Irianto (1996, h.25), salah satu kekuatan dari industri kecil adalah spesialisasi hasil produk, maka tidak salah bila para pengrajin keramik Dinoyo selalu menjaga kualitas hasil produksinya. Hal ini dikarenakan pengrajin keramik Dinoyo hanya spesialis dalam menciptakan produk keramik seni maupun souvenir, sehingga bila kualitas keramik dan souvenirnya tidak dijaga maka akan kehilangan pelanggan bahkan bisa sampai gulung tikar. Dan untuk beralih ke usaha lain akan sulit karena mereka merupakan pengrajin spesialis produk keramik dan souvenir.

## **2) Faktor Penghambat**

### **a. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia**

Hal penting yang berhubungan dengan permasalahan sumber daya manusia ini adalah karena kebanyakan dari pengusaha/pengrajin tersebut

hanya memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang tergolong masih rendah. Hal tersebut menyebabkan mereka memiliki keterbatasan pengetahuan tentang manajemen. Menurut Imam Hanafi dan Imam Hardjanto (2006, h.42), keterbatasan/kelemahan dalam bidang manajemen ini diklasifikasikan ke dalam Kelemahan Struktural. Irianto (1996, h.27), menambahkan bahwa:

“Kelemahan dalam bidang manajemen ini merupakan batu sandungan yang sangat besar saat pengusaha industri kecil ini harus mengembangkan dirinya. Ketidakhandalan dalam manajemen sama saja artinya pengusaha tidak dapat mengelola perusahaan dengan optimal sehingga kelangsungan di masa depan sangat dikhawatirkan”.

Akan tetapi dalam urusan keterampilan atau *skill*, kebanyakan dari mereka memiliki kualitas yang dapat diandalkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil produksi keramik yang mereka buat yang rata-rata masih mengandalkan keterampilan mereka.

#### **b. Kurangnya Faktor Modal**

Bagi industri kecil, masalah modal merupakan kendala yang cukup besar. UKM, khususnya usaha kecil di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial, yaitu mobilitas modal awal dan akses modal kerja, dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri/sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi, apalagi untuk investasi (perluasan kapasitas produksi/pengganti mesin-mesin tua) (Tambunan, 2002, h.74).

Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan industri kecil mendapatkan pembiayaan untuk modal dasar maupun untuk langkah-langkah pengembangan usahanya, yaitu antara lain: melalui kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hibah, dan jenis pembiayaan lainnya (Anoraga dan Sudantoko, 2003, h.228).

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pengusaha industri kecil keramik Dinoyo, ternyata masih banyak pengusaha yang tidak berani

meminjam modal usaha kepada bank dengan alasan tidak memiliki jaminan atau agunan. Selain itu, pihak bank sendiri juga tidak memberikan keringanan kepada pengrajin yang meminjam modal, hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Bapak Syamsul Arifin bahwa: “*dalam meminjam modal di bank, saya tidak mendapatkan kekhususan sebagai pengrajin industri kecil*”. (Wawancara hari Kamis, 8 Oktober 2009, pukul 09.00 WIB di Cenderamata Keramik)

Pihak Disperindag Kota Malang sendiri semenjak era reformasi juga sudah tidak lagi memberi bantuan berupa modal uang, hal ini disebabkan bahwa modal yang diberikan selama ini banyak yang disalahgunakan oleh para pengrajin untuk keperluan pribadi ataupun keperluan diluar usahanya. Saat ini walaupun diberikan bantuan modal, bentuknya bukan lagi uang tetapi lebih ke modal peralatan. Hal ini merupakan kesepakatan pengrajin sendiri dan juga Disperindag Kota Malang.

### **c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pemasaran**

Salah satu bentuk pemasaran adalah dengan mengenalkan industri kecil keramik Dinoyo kepada masyarakat luas melalui pameran, memasang iklan, dan menjadi sponsor dalam kegiatan tertentu. Dalam kaitannya dengan promosi tersebut, para pengrajin keramik mengalami kendala dalam hal sarana dan prasarana. Selama ini para pengrajin merasa bahwa pemerintah masih kurang memperhatikan promosi terhadap mereka. Hal ini terbukti dengan minimnya pengadaan baliho atau papan reklame untuk kerajinan keramik, disamping itu sempitnya jalan yang terdapat di sentra industri kecil keramik Dinoyo dirasa mengakibatkan kurang leluasanya konsumen untuk berlama-lama di lokasi. Hal ini sebenarnya telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil pada pasal 16 yang menyebutkan bahwa salah satu peran pemerintah dalam melakukan pembinaan adalah dengan menyediakan sarana dukungan promosi.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Upaya pemberdayaan industri kecil keramik Dinoyo oleh Disperindag Kota Malang meliputi program:
  - a) Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang telah dilakukan Disperindag Kota Malang meliputi:
    - 1) Pelaksanaan pendidikan dan latihan (Diklat) dalam bidang teknis dan manajerial, guna memperoleh tenaga yang terampil dan terdidik. Materi yang pernah diberikan dalam diklat meliputi pelatihan teknologi produksi, baik berupa desain keramik maupun pewarnaan serta diversifikasi produk. Namun diklat tersebut tidak bisa setiap tahun dilakukan oleh Disperindag Kota Malang karena harus bergantian dengan instansi lain.
    - 2) Studi banding, Disperindag Kota Malang pernah mengirim pengrajin keramik Dinoyo untuk melakukan studi banding ke Bandung, Yogyakarta, Jepang, Taiwan dan ke Probolinggo pada pertengahan tahun 2007. Khusus untuk studi banding keluar negeri, Disperindag Kota Malang di undang oleh pemerintah negara tersebut.
    - 3) Memberikan bimbingan dan penyuluhan yang bertujuan agar para pengusaha industri kecil dan pengrajin mempunyai kemampuan yang bersifat *managerial skill*. Dengan demikian permasalahan seperti ketidakjelasan manajemen dan juga struktur organisasi perusahaan, dapat segera teratasi. Namun pelaksanaan program yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang ini masih bersifat temporer, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu, tidak secara berkelanjutan.
  - b) Pengembangan teknologi produksi, salah satu upaya yang dilakukan oleh Disperindag Kota Malang adalah dengan memberikan bantuan berupa peralatan. Tujuan Disperindag Kota Malang memberikan bantuan peralatan tersebut adalah untuk sosialisasi penggunaan teknologi tepat guna, sehingga diharapkan kepada pengusaha industri kecil khususnya keramik dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan mutu produksi.

Namun karena alasan anggaran yang terbatas, pemberian bantuan peralatan tersebut juga sangat terbatas jumlah maupun tingkat kemajuan teknologinya.

- c) Promosi pemasaran, upaya Disperindag Kota Malang yaitu dengan mengikutsertakan para pengrajin untuk mengikuti pameran, baik itu pada tingkat lokal, regional maupun nasional. Selama tahun 2002, Disperindag telah mengikutsertakan industri kecil keramik sebanyak dua belas kali baik dalam tingkat lokal maupun nasional. Namun keikutsertaan para pengrajin keramik Dinoyo dalam pameran tersebut masih dirasa kurang, karena pihak Disperindag Kota Malang hanya mengikutsertakan pengrajin industri kecil yang ada di Kota Malang ini secara bergantian. Selain mengikutsertakan dalam pameran, pihak Disperindag Kota Malang juga membuat *website* yang berisi tentang potensi industri kecil yang ada di Kota Malang. Tujuannya adalah untuk mempromosikan industri kecil yang ada di Kota Malang, utamanya industri kecil unggulan seperti keramik Dinoyo agar menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas. Namun langkah promosi tersebut sayangnya tidak dibarengi dengan pemasangan iklan-iklan di sudut-sudut kota, sehingga yang mengetahui keberadaan industri kecil ini juga terbatas.
- d) Pembinaan permodalan, yaitu dengan memberikan informasi tentang bantuan modal atau kredit serta pemberian bimbingan dan saran terhadap pengajuan proposal yang baik kepada lembaga keuangan. Saat ini Disperindag Kota Malang sudah tidak lagi memberikan bantuan modal dalam bentuk uang lagi. Alasannya karena banyak terjadi penyelewengan jika diberi bantuan modal dalam bentuk uang. Namun sayangnya pembinaan ini kurang mendapat antusias yang baik dari pengusaha industri kecil. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengusaha industri kecil tersebut belum mempunyai legalitas usaha sehingga sangat sulit untuk mendapatkan pinjaman modal. Dari kondisi tersebut, banyak para pengusaha industri kecil keramik Dinoyo yang dalam menjalankan usahanya menggunakan modal sendiri.

e) Pengadaan bahan baku, kebijakan yang diberikan Disperindag Kota Malang adalah dengan melakukan kerjasama dengan BPTIK (Balai Pelayanan Teknis Industri Keramik) melalui penyediaan bahan baku yang berkualitas, melakukan uji terhadap mutu produk keramik, memberikan penyuluhan dan merangkap konsultan bagi permasalahan seputar industri keramik. Dengan demikian produk yang dihasilkan industri kecil keramik memiliki kualitas/mutu produk yang bagus.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

a) Faktor Pendukung

1) Lokasi Industri yang Strategis

Faktor lokasi industri kecil keramik Dinoyo ini sudah merupakan modal tersendiri dalam pengembangan industri kecil keramik agar bisa lebih meningkatkan produksinya. Selain mengenalkan produk dari kerajinan industri keramik, pemerintah juga mengadakan semacam kegiatan pameran. Hal ini akan membuat masyarakat tertarik untuk melihat dan membeli hasil kerajinan tersebut.

2) Kualitas Produk yang Sudah Dikenal Masyarakat

Kerajinan keramik Dinoyo merupakan salah satu sentra industri kecil yang kualitas produknya sudah terkenal. Produknya yang berupa keramik hias dan souvenir keramik banyak dipesan oleh beberapa konsumen misalnya untuk souvenir pernikahan atau untuk dipajang dirumah. Pemesan keramik ini banyak juga yang berasal dari Jakarta, Bandung, Surabaya, dan juga luar Jawa.

Jika dilihat dari kualitas produk dan harganya, keramik Dinoyo ini sangat terjangkau bagi masyarakat kalangan atas dan kalangan bawah. Karena sebab itu juga produk yang dihasilkan pengrajin industri keramik Dinoyo ini banyak dikenal oleh masyarakat luas.

b) Faktor Penghambat

1) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kendala dalam upaya pemberdayaan industri kecil keramik Dinoyo. Hal ini disebabkan latar belakang pendidikan formal para pengrajin keramik ini masih tergolong rendah yaitu antara lulusan SD sampai SMA. Secara tidak langsung hal ini berpengaruh terhadap pola pikir dan pola hubungan dengan pihak luar. Selain itu mereka juga kurang merespon adanya kegiatan-kegiatan seperti pelatihan dan pengembangan yang diadakan pemerintah. Mereka berasumsi bahwa kegiatan itu tidak akan berpengaruh banyak terhadap perkembangan usaha mereka.

2) Kurangnya Faktor Modal

Salah satu kendala terbesar bagi pengrajin keramik Dinoyo adalah kurangnya modal usaha. Untuk mendapatkan bantuan modal kepada lembaga keuangan seperti bank, sebagian besar dari pengrajin keramik masih belum berani karena tidak mempunyai jaminan atau agunan, disamping itu para pengrajin itu juga masih belum memiliki legalitas usaha. Sedangkan dari Disperindag Kota Malang sendiri saat ini sudah tidak memberikan bantuan modal dalam bentuk uang lagi, hal ini disebabkan banyak terjadi penyelewengan oleh pengrajin.

3) Kurangnya Sarana dan Prasarana Pemasaran

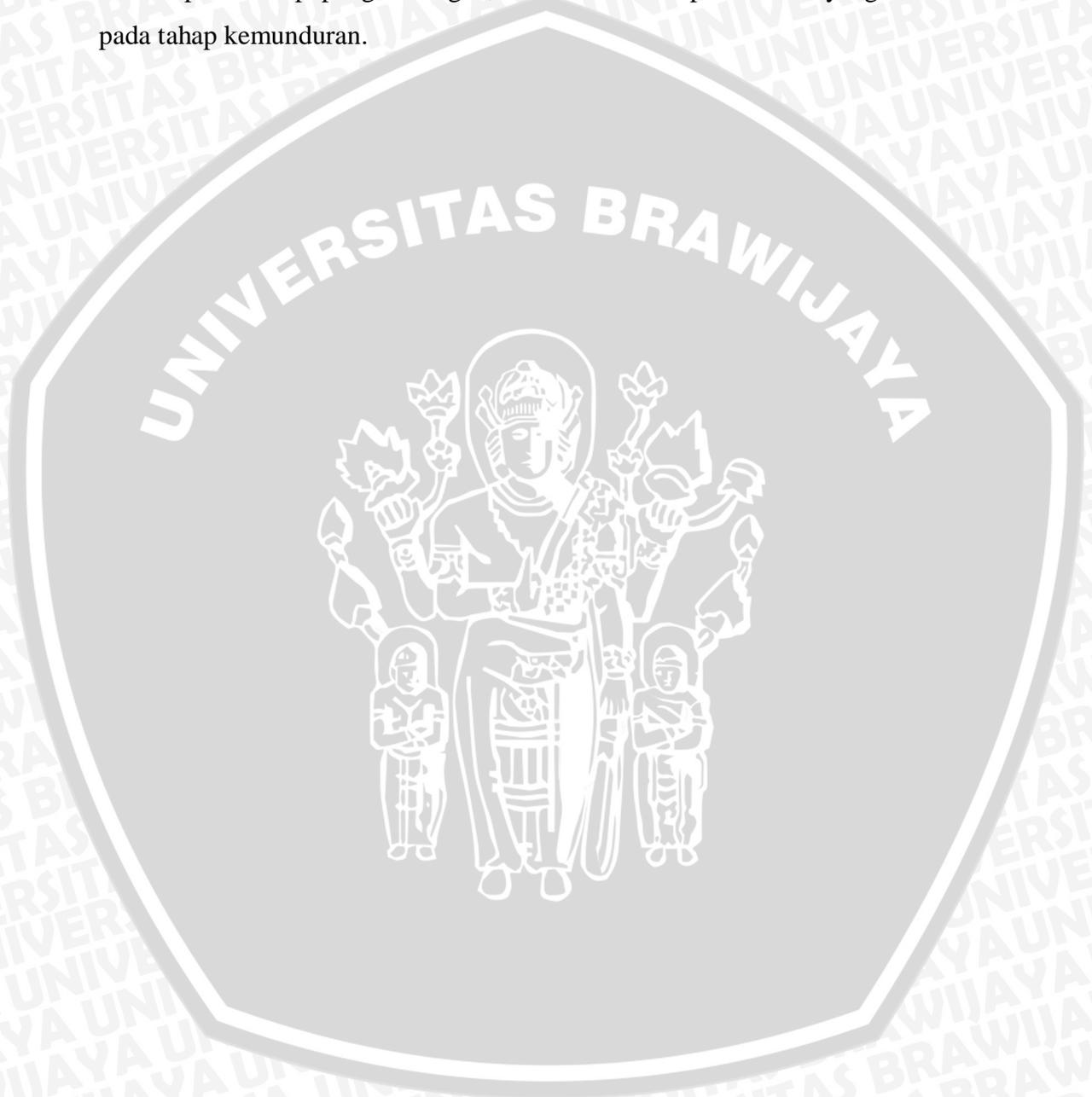
Sarana dan prasarana, ternyata para pengrajin keramik Dinoyo selama ini mengeluhkan kurangnya peran dan perhatian pemerintah dalam hal pengadaan sarana dan prasarana promosi, seperti baliho, iklan, papan promosi sebagai petunjuk keberadaan industri kecil keramik yang ada di Kota Malang. Sehingga untuk saat ini para pengrajin sering menjual hasil usahanya kepada para pengepul.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu antara lain:

1. Untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia maka cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengikutsertakan pengrajin keramik dalam setiap pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhannya, serta diperlukan juga peningkatan dari segi materi pelatihan maupun frekuensi penyelenggaraannya. Yang perlu segera diutamakan adalah memberikan pelatihan dalam hal teknologi produksi, hal ini untuk lebih meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna agar dimanfaatkan secara optimal.
2. Untuk mengatasi masalah manajemen usaha khususnya dalam pengelolaan administrasi keuangan dimana pada umumnya para pengrajin seringkali belum mampu melaksanakan pemisahan manajemen keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga. Sehingga para pengrajin kesulitan dalam hal melakukan perhitungan hasil kegiatan usaha secara akurat, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembentukan modal usaha. Untuk itu maka sebaiknya materi pelatihan di bidang manajemen ini dikoordinasikan terlebih dahulu, sehingga bentuk maupun materi pelatihan di bidang ini akan lebih relevan dengan kebutuhan para pengrajin keramik tersebut.
3. Untuk masalah promosi pemasaran maka perlu adanya perbaikan yaitu perlu diciptakannya iklim usaha yang sehat, pelaksanaan kemitraan yang seimbang dan saling menguntungkan, arus informasi yang merata, serta peningkatan peran lembaga baik pemerintah, asosiasi, maupun lembaga lain. Sementara untuk mengatasi kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam hal pemasaran, maka perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah kota Malang, khususnya Disperindag Kota Malang agar serius menanggapi perihal mendesaknya sebuah fasilitas pendukung berupa pengadaan maupun perbaikan infrastruktur. Selain itu juga lebih diperbanyaknya sarana iklan dan reklame untuk memperkenalkan hasil produksi industri kecil terutama keramik.
4. Masalah keterbatasan modal bagi pengusaha industri kecil akan sangat mempengaruhi perkembangan usaha, sehingga diharapkan campur tangan pemerintah untuk mencari alternatif bantuan modal kepada pengusaha industri kecil. Kemudian alternatif yang memungkinkan adalah: a) memperluas jaringan kerjasama dengan pihak swasta untuk menjadi bapak angkat dalam

pemberian modal kepada para pengusaha industri kecil, b) modal ventura, merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk pengembangan perusahaan yang pada tahap awal biasanya mengalami kesulitan modal, membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan, dan membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran.



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Anonymous. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anoraga, Pandji dan Djoko Sudantoko. 2003. *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Cahyono, Tri Bambang dan Sugiyo Adi. 1983. *Manajemen Industri Kecil*. Yogyakarta: Liberty.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Hanafi, Imam dan Imam Hardjanto. 2006. *Entrepreneurship Kewirausahaan*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Hardjanto, Imam. 2008. *Berbagai Dimensi Administrasi Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Irianto, Jusuf. 1996. *Industri Kecil Dalam Perspektif Pembinaan dan Pengembangan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Juwaini, Ahmad. 1996. Pemberdayaan Usaha Kecil Menyongsong Pasar Bebas. *Pikiran Rakyat*, Th. XXX No 343, Hal X/3-9.
- Kartasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan & Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kartasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Kristanto, Philip. 2002. *Ekologi Industri*. Jogjakarta: Penerbit Andi.
- Kuncoro, Mudrajat. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: Akademi Perusahaan Manajemen YKPN.
- Mangunhardjono, A. 1986. *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, Cetakan I. Yogyakarta: P.N. Panisius.
- Marpaung, Happy. 1994. *Himpunan Undang-undang dan Peraturan Perindustrian Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta.
- Mashoed. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Surabaya: Papyrus.



- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi, Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Ndraha. T. 1984. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bina Aksara.
- Poerwadarminto, W.J.S. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasojo, Eko. 2004. People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. IV, No 2.
- Prawirokusumo, Soeharto. 2001. *Ekonomi Rakyat: Konsep, Kebijakan dan Strategi*. Yogyakarta: BPFE.
- Prijono dan Pranarka. 1996. *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Saleh, Irsyan Ansyhari. 1986. *Industri Kecil Sebuah Tinjauan dan Perbandingan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sedamaryanti. 2003. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah (Upaya Membangun Organisasi Efektif & Efisien Melalui Restrukturisasi & Pemberdayaan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah & Pemberdayaan Masyarakat*, Edisi Kedua. Jakarta: PT Bina Pena Pariwara.
- Sumodiningrat, dkk. 2000. *Kajian Paradigma Pemberdayaan Rakyat*. SPAMEN Angkatan VI.
- Suprpto, R.R. 2002. Strategi dan Model Pembinaan dan Pengembangan UKM Kota Pasuruan. *Jurnal-jurnal Ilmu Sosial*, Vol 14, No 2.
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press).

Suryono, Agus dan Trilaksono Nugroho. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.

Suseno T. W., dkk. 2005. *Reposisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perekonomian Nasional*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.

Syaifudin, Hetifah. 1995. *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*. Bandung: Yayasan Akgita.

Syarif, Syahril. 1991. *Industri dan Kesempatan Kerja*. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas.

Tambunan, Tulus. T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat.

Thoha, Miftah. 1993. *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: Rajawali Press.

Tjokroamodjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.

Zauhar, Soesilo. 2001. *Administrasi Publik*. Malang: penerbit Universitas Negeri Malang.

#### Website

Anonymous. 2003. *Keramik Rakyat dari Dinoyo*. Diakses pada Tanggal 22 Mei 2009 dari <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0305/11/foto/306818.htm>.

Anonymous. 2003. *Peran Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Pembangunan Nasional*. Diakses pada Tanggal 27 Juni 2009 dari [http://www.depkop.go.id/renstra-2004-2009/doc\\_details/651-03-bab-ii-peran-koperasi-dan-ukm-dalam-pembangunan-nasional-.html](http://www.depkop.go.id/renstra-2004-2009/doc_details/651-03-bab-ii-peran-koperasi-dan-ukm-dalam-pembangunan-nasional-.html).

Anonymous. 2006. *Hanya Tersisa 10 Persen Perajin di Dinoyo, Malang*. Diakses pada Tanggal 22 Mei 2009 dari <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0603/13/ekonomi/2502776.htm>.

Anonymous. 2008. *Angka Kemiskinan Indonesia Turun 2,21 Juta*. Diakses pada Tanggal 24 Mei 2009 dari <http://hariansib.com/2008/08/angka-kemiskinan-indonesia-turun-221-juta/>.

Anonymous. 2008. *Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Jepang dan Proposal Pengembangan IKM Nasional*. Diakses pada Tanggal 24 Mei 2009 dari <http://io.ppi-jepang.org/article.php?id=256>.

Anonymous. 2008. *Perajin Keramik Dinoyo Beralih ke Gypsum*. Diakses pada Tanggal 06 Juli 2009 dari [http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/04/22/1818268/perajin\\_keramik.dinoyo.beralih.ke.gypsum](http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/04/22/1818268/perajin_keramik.dinoyo.beralih.ke.gypsum).

Anonymous. 2009. *Kota Malang*. Diakses pada Tanggal 30 Agustus 2009 dari <http://www.pemkot-malang.go.id.htm>

Anonymous. 2009. *Kota Malang*. Diakses pada Tanggal 04 September 2009 dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Malang](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang).

Pandia, Agnes Swetta. 2007. *Perajin Keramik Dinoyo Banting Haluan*. Diakses pada Tanggal 07 Juli 2009 dari <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0701/24/jatim/61478.htm>

